



**MENGGUGAT “DUNIA KABUT”:
TELAAH KEADILAN DALAM NOVEL *KALATIDHA*
KARYA SENO GUMIRA AJIDARMA**



TESIS

**Dian Susilastri
NPM 0606012863**

**PROGRAM STUDI ILMU SUSASTRA
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
2008**



**MENGGUGAT “DUNIA KABUT”:
TELAAH KEADILAN DALAM NOVEL *KALATIDHA*
KARYA SENO GUMIRA AJIDARMA**

TESIS

**Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Humaniora pada Program Studi Ilmu Susastra
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya**

**Dian Susilastri
NPM 0606012863**

**PROGRAM STUDI ILMU SUSASTRA
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
2008**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah diujikan pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2008, pukul 13.00—14.30 dengan susunan penguji sebagai berikut.

Tanda tangan

1. **Prof. Melani Budianta, Ph. D.**
Ketua

.....

2. **Dr. Bambang Wibawarta**
Pembimbing I/Anggota

.....

3. **Dr. Lily Tjahjandari**
Pembimbing II/Anggota

.....

4. **Karsono Hardjasapoetra, M. Hum.**
Anggota/Sekretaris

.....

Disahkan oleh

Ketua Program Studi Susastra
Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia

Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia

Dr. Titik Pudjiastuti
NIP 131635535

Dr. Bambang Wibawarta
NIP 131882265

KATA PENGANTAR

Kalatidha karya Seno Gumira Ajidarma merupakan novel yang bagi saya mempunyai daya magnet luar biasa untuk selalu dibaca dan dibaca lagi. Seperti penggalan kalimat dalam novel tersebut: *kabut itu seperti puisi yang penuh misteri, yang setiap kali dibaca kembali akan menjadi baru*. Setiap kali membaca *Kalatidha* lagi, dalam benak saya akan timbul penemuan-penemuan baru yang menakjubkan dari novel itu. Berbagai pemaknaan yang selalu bermunculan tersebut menggoda saya untuk menjadi serakah dan ingin membuka misteri-misteri yang ada di balik novel yang tidak terlalu tebal itu. Namun mustahil bagi saya untuk menuangkan seluruhnya, kemampuan saya terbatas untuk bisa mengungkap sisi-sisi yang tersembunyi dalam *Kalatidha*.

Pada akhirnya saya harus menentukan pilihan. Kajian sosiologi sastra dengan fokus pada keadilan yang menjadi tema dalam penggugatan *Kalatidha* terhadap narasi resmi Pemerintah Orde Baru. *Kalatidha* dengan berlatar peristiwa yang menjadi realita dalam sejarah Indonesia menunjukkan bahwa karya sastra berada dalam jalinan intertekstual, bukan sebagai karya otonom, *ia ada karena ada dalam keberadaan masyarakat yang mengadakannya*.

Kuliah yang berujung pada pengerjaan tesis saya di Departemen Susastra ini tidak akan terlaksana tanpa uluran bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Pertolongan yang paling utama datang dari kasih karuniaNya, terima kasih ya, Allah. Hamba juga tahu, Engkau tidak pernah tega membiarkan hamba semakin merasa berdosa karena membuat keluarga hamba mengorbankan jiwa, raga, dan materi untuk hamba. Kedua buah hati

tercinta yang sering membuat saya terharu dengan bertanya, *Ma, kapan Mama selesai kuliah dan kita pulang ke Palembang?* menjadi sumber inspirasi dan memotivasi saya agar segera menyelesaikan studi. Suami yang selalu setia mendampingi, memotivasi, dan menjaga saya adalah ‘teman kuliah’ yang setiap saat bersedia untuk diajak diskusi. Ibu, mbak dan keluarganya di Yogya, tidak akan pernah saya lupa, dua tahun ini saya telah memaksa pengorbanan mereka untuk mengasuh dan mendidik kedua anak saya. Kepada orang-orang terkasih itu, ucapan terima kasih tidak mampu membayar pengorbanan, perhatian, dan doa mereka untuk saya.

Kedua dosen pembimbing saya, Pak Bambang dan Bu Lily, kesabaran dan ilmu pengetahuan yang mereka berikan kepada saya ketika membimbing penulisan tesis ini tentu membuat saya tidak bisa berkata selain terima kasih yang tidak terhingga. Mohon maaf atas gangguan saya di tengah kesibukan sebagai dekan dan sekretaris departemen. Bu Melani, ketua penguji sekaligus dosen yang selalu saya kagumi dan Pak Karsono, anggota penguji, yang pernah memberi saya wawasan tentang kekayaan sastra Jawa, terima kasih yang tulus saya sampaikan atas saran dan masukan yang sangat berguna bagi penulisan tesis ini.

Sege nap dosen di Departemen Susastra, yang memberi saya banyak pengetahuan tentang ilmu susastra dan aplikasinya, tidak ada yang bisa saya berikan sebagai ucapan terima kasih selain mendedikasikan pengetahuan tersebut pada keseriusan penelitian saya di dunia sastra.

Kepala Pusat Bahasa dan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberi kesempatan saya untuk melanjutkan studi melalui beasiswa; teman-teman kantor di Jakabaring maupun Daksinapati yang telah memberi

semangat dan membantu kelancaran studi saya; teman-teman dekatku di FIB, Diyan, Ria, Dina, karibku yang baik hati, dengan cara mereka telah memberi semangat kepada saya untuk terus menimba ilmu di usia saya yang jauh lebih tua dari mereka; Bram, Nandika, Lina, Hana, dan Come' teman seperjuangan yang juga masih belia pernah sama-sama merasakan harap-harap cemas menanti saat-saat presentasi; terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada mereka. Petugas bagian administrasi (mbak Nur, mbak Rita, mas Nanang), petugas perpustakaan, sekretariat dekan, serta satpam, yang sering saya recoki dengan selalu minta bantuan di tengah kesibukan mereka, permohonan maaf serta ucapan terima kasih tentu akan selalu saya ucapkan.

Tesis ini dapat selesai berkat bantuan mereka, namun bukan berarti mengurangi tanggung jawab saya terhadap isinya. Saya menyadari karya ini jauh dari sempurna. Sekalipun demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pembaca.

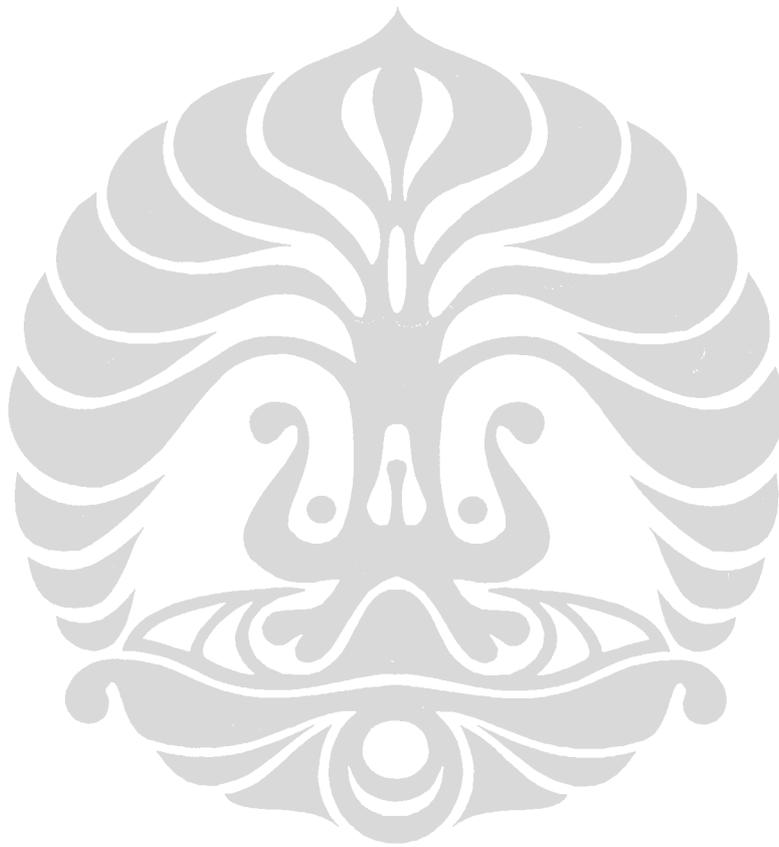
Depok, Juli 2008

Dian Susilastri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tinjauan Pustaka.....	8
1.3 Masalah	14
1.4 Tujuan.....	14
1.5 Landasan Teori	14
1.6 Metode Penelitian	18
1.6 Sistematika Penyajian	19
Bab II REPRESENTASI NARASI PEMERINTAH ORDE BARU MENGENAI G 30 S/PKI	20
2.1 Narasi Pemerintah Orde Baru tentang G 30 S/PKI	20
2.1.1 Penumpasan G 30 S/PKI	20
2.1.2 Pembubaran dan Pemberantasan PKI	26
2.2 Representasi Narasi Pemerintah Orde Baru tentang G 30 S/PKI	29
Bab III NARASI METAFORA “DUNIA KABUT” DALAM KALATIDHA: SEBUAH GUGATAN TENTANG KEADILAN TERHADAP NARASI PEMERINTAH ORDE BARU MENGENAI G 30 S/PKI	33
3.1 Pengertian Keadilan..	33
3.2 “Dunia Kabut” dalam <i>Kalatidha</i>	45
3.2.1 Kisah Kekerasan Kolektif dan Pemarginalan dalam <i>Kalatidha</i>	49
3.2.2 Simbol-simbol Tokoh dan Tempat dalam <i>Kalatidha</i>	70
3.3 “Skenario” Representasi “Dunia Kabut”	89
3.3.1 “Skenario” Representasi Penggusuran Hutan Bambu....	89
3.3.2 “Skenario” Representasi Perburuan Sang Mata	90

Bab IV PENUTUP	93
4.1 Kesimpulan	93
4.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	101



ABSTRAK

Nama : Dian Susilastri
Program Studi : Ilmu Susastra
Judul : Menggugat “Dunia Kabut”: Telaah Keadilan dalam Novel
Kalatidha Karya Seno Gumira Ajidarma

Tesis ini membahas keadilan dalam novel *Kalatidha* karya Seno Gumira Ajidarma. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik. Kajian sosiologi sastra digunakan dengan alasan *Kalatidha* dipandang sebagai teks yang diciptakan oleh pengarang sebagai bentuk usaha menanggapi realitas di sekitarnya, berkomunikasi dengan realitas, atau menciptakan kembali realitas itu. *Kalatidha* mengangkat persoalan keadilan dalam kisah-kisah di balik G 30 S/PKI tahun 1965 dengan cara metaforis yaitu sebagai “dunia kabut”, sebuah sisi suram dari peristiwa yang bersifat nasional. Pemerintah Orde Baru telah membuat narasi resmi tentang G 30 S/PKI; terhadap realitas sosial tersebut *Kalatidha* berfungsi sebagai penegasi.

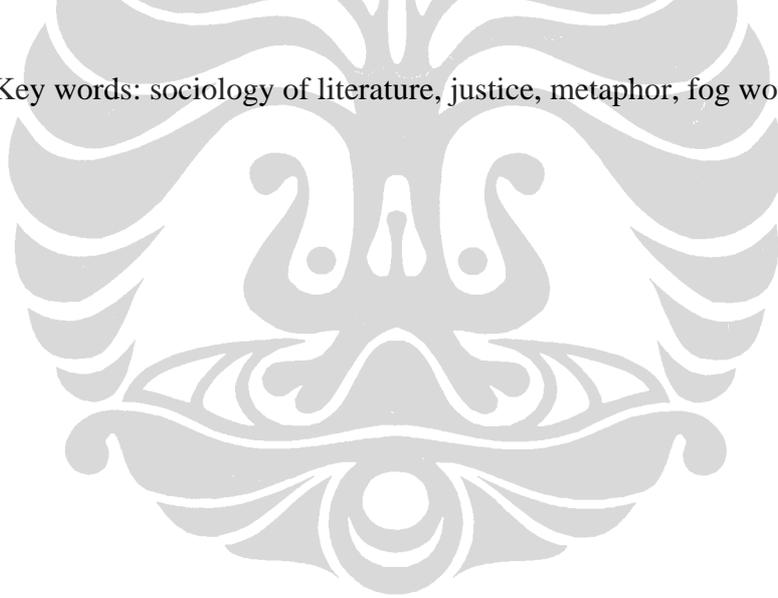
Kata kunci: sosiologi sastra, keadilan, metafora, dunia kabut

ABSTRACT

Name : Dian Susilastri
Study Program: Literature Department
Title : Criticize the “Fog World”: Analyze the Justice in *Kalatidha* by Seno Gumira Ajidarma

This thesis studies about justice which is represented in *Kalatidha*, a novel by Seno Gumira Ajidarma. This research is using analytic descriptive method. The sociology of literature is used because *Kalatidha* as a text created by author as effort to answering of reality, communicating with reality, or re-create that reality. *Kalatidha* criticize the problem of justice behind G 30 S/PKI in 1965, by using metaphor. It is represented as a “fog world”, a dark side of national incident. New Order government had created official explanation about G 30 S/PKI; *Kalatidha* has a function as a negation of that social reality.

Key words: sociology of literature, justice, metaphor, fog world.



BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kalatidha adalah sebuah novel karya Seno Gumira Ajidarma (selanjutnya disingkat SGA), terbit di awal tahun 2007.¹ Fiksi ini terbit tahun 2007 dan ditulis medio Januari—Juni 2006. Sebagai sebuah karya imajinatif, *Kalatidha* banyak dilhami oleh peristiwa traumatis bangsa Indonesia, yakni Gerakan 30 September (G 30 S) 1965. Dalam novel ini tokoh utamanya digambarkan mengalami suatu realitas yang berkenaan dengan permasalahan sosial² yang kompleks pada masanya dan melakukan semacam “pembacaan ulang” terhadap realitas masa lalu dengan pemahaman-pemahaman baru.

Realitas dalam sebuah fiksi, yang ditampilkan melalui struktur penceritaan, seringkali merupakan tanggapan, gambaran, sindiran dan sebagainya dari sebuah realitas sosial yang nyata di dalam masyarakat. Demikian pula novel *Kalatidha* menghadirkan sebuah realitas imajiner di seputar peristiwa G 30 S. Novel ini menampilkan tema yang berkaitan dengan persoalan-persoalan sosial yang lahir terutama disebabkan oleh otoritas kekuasaan yang menghendaki penghapusan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan kelompok sosial politik yang berafiliasi

¹ Cetakan pertama, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 234 halaman termasuk lampiran dan viii halaman depan. Novel ini adalah buku SGA yang ke-28.

² Permasalahan sosial yaitu situasi yang mengganggu kehidupan umum di suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu yang harus diatasi secara institusional. Institusional menunjuk pada semua instansi pemerintah, bukan pemerintah atau masyarakat sipil/*civil society*, dan dunia usaha sebagai komponen utama dari *governance*. (Robert M.Z. Lawang, *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik: Suatu Pengantar* (Depok: FISIP UI Press, 2005), hlm. 143-144).

dengan partai politik tersebut. Suatu realitas imajiner yang diilhami oleh realitas sosial dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Indonesia pada akhir September 1965 telah menorehkan sejarah politik yang pahit dan menyakitkan. G 30 S yang juga disebut Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu)³ menjadi pemicu dan dianggap biang keladi petaka yang berkelanjutan di Indonesia. Malapetaka sebagai akibat yang ditimbulkan oleh gerakan tersebut melanda hingga ke pelosok negeri. Kekerasan kolektif yang berakibat pada pembunuhan massal, penganiayaan fisik dan mental, berlangsung dengan restu penguasa sebagai upaya pembalasan dendam atas perlakuan G 30 S⁴ dan pemberantasan sisa-sisa pengikut paham komunis.⁵

Hingga rezim Orde Baru berkuasa kemudian (sebagai pengganti Orde Lama), gerakan anti-komunis atas nama stabilitas nasional berlanjut dan berakibat buruk pada kehidupan masa depan bekas tahanan politik dan generasi baru atau keturunan para pengikut PKI. Para bekas tahanan politik beserta generasi baru tersebut, yang mungkin belum lahir ketika peristiwa G 30 S, menjadi generasi yang tereksklusi.⁶ Pada perkembangan selanjutnya, ekses yang diakibatkan oleh

³ Istilah Gestapu merujuk pada Gerakan 30 September 1965 atau dikenal juga dengan istilah Pengkhianatan G-30-S/PKI yang menurut sejarah politik Indonesia yang dibuat oleh pemerintah didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Istilah Gestapu tersebut sengaja diciptakan oleh Brigjend Sugandhi dengan tujuan menyamakannya dengan kejahatan yang tersirat dalam istilah “Gestapo” Nazi rezim Hitler di Jerman (lihat dalam Michael van Langenberg, “Gestapu dan Kekuasaan Negara di Indonesia” dalam Qasim Ahmad (ed.), *Kekerasan dalam Sejarah: Masyarakat dan Pemerintah* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia, 1993), hlm. 131—132).

⁴ Isu dan propaganda yang dilakukan oleh petinggi KOSTRAD sepanjang Oktober-November 1965 bertujuan mewujudkan suasana penuh takut dan dendam/kebencian meluas terhadap PKI dan pendukungnya (*ibid.* hlm. 132). Operasionalnya bahkan dilandasi oleh Keputusan Presiden/Panglima Besar KOTI No. 179/KOTI/1965 tanggal 6 Desember yang memberi kuasa kepada KOPKAMTIB untuk memulihkan otoritas negara/pemerintahan melalui upaya fisik/ketenteraan dan mental. Operasi tersebut berlaku hingga ke perkampungan (*ibid.* hlm. 134 dan 146).

⁵ *Ibid.* hlm.131—148.

⁶ Individu yang tereksklusi adalah individu yang termarjinalkan akibat proses eksklusi sosial. Menurut Francisia SSE Seda proses eksklusi sosial yaitu individu tidak dapat berperanserta secara penuh di dalam masyarakat karena secara sistemik dan struktural tidak mendapatkan

peristiwa G 30 S menjelma menjadi permasalahan sosial yang serius dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan sangat keras pemerintah melarang semua bentuk atau hal yang berhubungan dengan komunisme. Demi keamanan dan stabilitas nasional, pemerintah berusaha menghapuskan komunisme di Indonesia hingga ke akar-akarnya.

Sebagai penopang untuk mengukuhkan posisi Orde Baru di republik ini, rezim tersebut kemudian membuat “pembenaran-pembenaran” terhadap peristiwa G 30 S. Narasi pembenaran versi pemerintah tersebut sengaja diwacanakan dengan berbagai cara untuk membuat *image* tentang apa dan siapa PKI, “dosa” seperti apa yang telah dibuat, dan peran Orde Baru di dalamnya. Salah satu yang paling efektif dan efisien dan mengakar untuk penyebarluasan narasi tersebut adalah melalui penulisan sejarah. Sejarah yang dikonstruksi tersebut selanjutnya dijadikan sebagai satu-satunya sumber resmi yang harus dipedomani sebagai bagian dari sejarah Indonesia hingga berpuluh-puluh tahun dan tertanam di benak sebagian besar masyarakat Indonesia.

Pernyataan tidak selalu sama dengan kenyataan. Demikian juga dengan narasi Orde Baru tentang peristiwa G 30 S tersebut. Peristiwa kekerasan kolektif dan pembunuhan massal yang mengiringi peristiwa G 30 S nyaris tidak pernah terungkap selama periode Orde Baru. Kenyataan tersebut seolah disembunyikan

kesempatan dan akses yang setara dengan anggota masyarakat lainnya (dalam “Persoalan Disparitas Sosial dan Proses Eksklusi Sosial” dalam *Masyarakat Indonesia 2006-2007: Ulasan dan Gagasan*, editor Iwan Gardono dan Hari Nugroho, (Depok: LabSosio UI, 2006), hlm. 44). Konteks di Indonesia pada masa Orde Baru, individu-individu yang tereksklusi contohnya adalah para bekas tahanan politik G 30 S dan keluarganya. Bekas tapol tersebut mendapat stigma buruk dan secara hukum dikukuhkan pemerintah Orde Baru dengan mengeluarkan Instruksi Mendagri No. 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G-30-S/PKI. Instruksi tersebut ditandai dengan pencantuman kode ET (eks tapol) dan OT (organisasi terlarang) di Kartu Tanda Penduduk terhadap ± 1,4 juta orang. Instruksi tersebut baru dicabut pada 17 Agustus 1995 (sumber diambil dari Majalah Berita Mingguan *Gatra*, 12 Agustus 1995).

oleh penguasa “penentu” historiografi Indonesia. Dalam kondisi yang masih penuh dengan “kekaburan” akan fakta sejarah tersebut, *Kalatidha* muncul sebagai “penggugat” dengan meletakkan fakta-fakta sejarah sebagai sebuah fiksi yang ironis.

Peristiwa bersejarah yang “kebenarannya” masih selalu dipertanyakan tersebut⁷ telah melahirkan banyak karya sastra yang berlatar peristiwa pasca G 30 S tahun 1965. *Para Priyayi* karya Umar Khayam, *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu* dan *Bumi Manusia* karya Pramoedya Ananta Toer, *Larung* karya Ayu Utami, *Kubah* dan *Ronggeng Dukuh Paruk* karya Ahmad Tohari, merupakan sebagian kecil dari sejumlah karya sastra Indonesia yang menyajikan tema dan latar yang berkaitan dengan peristiwa pasca G 30 S 1965.

Kalatidha karya SGA menyajikan sudut pandang lain dalam menanggapi peristiwa G 30 S dan pascaperistiwa itu. Rekonsiliasi fakta dan fiksi⁸ sangat dominan membangun imajinasi dan tema keadilan yang tersebar dalam novel tersebut. Fakta-fakta empiris dalam sejarah yang dimanfaatkan secara imajinatif dalam kisah-kisah kekerasan kolektif dan kliping koran yang ditampilkan secara acak bergabung dan berbagi tugas dengan tindak tokoh dan latar imajiner yang ditampilkan sebagai resistensi sekaligus utopia tentang keadilan dan peradaban dunia.

⁷ Lihat misalnya John Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto* (Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra, 2008); John Roosa, Ayu Ratih, dan Hilmar Farid (eds.), *Tahun yang Tak Pernah Berakhir, Memahami Pengalaman Korban 65: Esai-Esai Sejarah Lisan* (Jakarta: Elsam, ISSI, dan Tim Relawan untuk Kemanusiaan, 2004); Haryo Sasongko dan Melani Budianta (ed.), *Menembus Tirai Asap: Kesaksian Tahanan Politik 1965* (Jakarta: Amanah-Lontar, 2003).

⁸ Meminjam istilah Savitri Scherer dalam resensi buku *Kalatidha*.

Isu yang didengungkan penguasa otoritas⁹ demi keamanan dan stabilitas nasional dipandang tidak selamanya memberi dampak positif bagi rakyat. Rakyat yang tidak bersalah bahkan menjadi tumbal zaman¹⁰ bagi keberlangsungan jargon penguasa tersebut. Tuduhan dengan anggapan kesalahan kolektif organisasi yang dituduh sebagai biang keladi pemberontakan menjadi alasan bagi penguasa otoritas untuk “membinasakan” mereka.¹¹

“Keamanan” yang ingin diciptakan oleh penguasa otoritas kadang justru mengorbankan rasa keamanan itu sendiri. Artinya, ada pihak-pihak yang justru menjadi tidak nyaman akibat *policy* tersebut. Pihak yang dikorbankan tersebut di antaranya adalah mereka yang langsung maupun tidak langsung pernah “bersentuhan” dengan PKI dan keluarganya. Di samping itu, eksekusi dari kondisi sosial yang tidak nyaman tersebut mengusik kehidupan kemanusiaan lainnya seperti masalah moral dan keadilan. Hal tersebut tertuang dalam kisah-kisah yang dialami para tokoh dalam novel *Kalatidha*. Salah tangkap kemudian disiksa, dibakar, dibunuh, menjadi gila, mendapat tekanan fisik, mental, dan sebagainya

⁹ Penguasa otoritas adalah istilah untuk menunjuk rezim yang berkuasa di pemerintahan setelah peristiwa G 30 S 1965 sebelum pergantian presiden. Rezim ini tidak berada di belakang Presiden Sukarno atau Pemimpin Besar Revolusi/PBR, karena tidak sepaham dengan PBR yang selalu menyerukan Nasakom yang artinya tidak anti komunis; hal tersebut sangat bertentangan dengan kelompok “penguasa baru” yang mengendalikan roda pemerintahan yang anti paham komunis. Kelompok ini didominasi oleh militer. Suara yang keluar atas nama pemerintah atau penguasa otoritas adalah suara-suara dari kelompok militer (di media massa). Di samping itu, pasca G 30 S kendali keamanan nasional dilakukan sepenuhnya oleh militer, padahal sebelum G 30 S, PBR yang orang sipil adalah sebagai Panglima Tertinggi ABRI/militer. Kekuasaan superstruktur penguasa otoritas tersebut berlanjut dan menjadi pemegang otoritas penguasa yang sah.

¹⁰ Kata “tumbal zaman” menyitir ungkapan SGA yang dihadirkan lewat tokoh bekas tahanan politik yang mengungkapkan pengalaman dan perasaannya pada tokoh utama setelah keluar dari penahanan selama 14 tahun di Pulau Buru: “Saya telah menjadi tumbal zaman agar lakon dunia bisa berjalan”. Ketika ditangkap ia berstatus sebagai pengurus Himpunan Sarjana Indonesia yang baru tiba dari seminar di luar negeri untuk mewakili organisasi atas nama Indonesia. Hingga akhirnya dibebaskan, ia tidak paham dengan alasan pengkapannya itu karena ia merasa sebagai nasionalis namun dituduh mengkhianati negeri sendiri (dalam *Kalatidha* hlm. 65).

¹¹ Menurut John Roosa prinsip kesalahan kolektif, yang merujuk pada batasan bahwa setiap anggota partai bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil para pimpinan (misalnya prinsip organisasi PKI yang berbunyi keputusan pimpinan partai mengikat seluruh anggota) merupakan prinsip yang sudah ditolak oleh semua negara di dunia berdasarkan *rule of law* (dalam John Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto* (Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra, 2008), hlm.5).

merupakan korban “kebijakan” pemerintah (selaku pemegang otoritas penguasa) yang banyak disorot dalam novel tersebut.

Korban kebijakan pemerintah tersebut dapat ditinjau sebagai sebuah eksekusi dari perbedaan pandangan ideologi politik, dan pemaksaan melalui kekerasan oleh otoritas pemegang kekuasaan superstruktur. Pemerintah melakukan tindakan kekerasan dan represif terhadap ideologi yang dipandang sebagai lawan politik sehingga menimbulkan gejolak di dalam masyarakat. Sudah jamak bahwa kekacauan kehidupan politik dalam suatu negara menyisakan permasalahan sosial terutama ketidakadilan yang berakibat pada terjadinya proses eksklusi sosial menuju pemarginalan sebagian masyarakat.

Kalatidha diwarnai dengan rangkaian kisah imajinatif berupa kekerasan massal yang memunculkan berbagai persoalan ketidakadilan. Penggambaran tersebut dituturkan oleh tokoh utama yang ada di dalam penjara, yang merupakan pencerita, dengan mengenang peristiwa-peristiwa seputar tragedi kemanusiaan 1965 yang disaksikan, dialami, dan dirasakannya. Dengan membaca guntingan koran yang terbit pada waktu itu, sekalipun secara acak, ia mencoba mengurai sejarah yang banyak menimbulkan tanya baginya. Di situlah tokoh utama menjalani proses pembacaan ulang terhadap peristiwa ketidakadilan pasca G 30 S 1965. Oleh “kuasanya” sebagai narator dalam pemilihan lakon dan pelakunya serta suara hati nuraninya, terangkailah jaringan wacana keadilan bagi kelompok termarginal yang teridentifikasi lewat kisah-kisah di dunia nyata maupun dunia maya di balik kabut. Memang persoalan ketidakadilan yang dimunculkan dalam berbagai kisah imajinatif sebagai sebuah gambaran realitas kehidupan sosial, namun persoalan ketidakadilan tersebut seolah sebuah sarana penceritaan yang

dikotomis bagi persoalan yang sesungguhnya, yakni persoalan keadilan yang merasuk ke dalam seluruh alur cerita.

Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya.¹² Namun keadilan yang keberlangsungannya menghadirkan subjek (pelaku) dan objek (penderita), adalah sebuah kondisi yang abstrak dan relatif. Kerelativan tersebut dapat mengakibatkan keadilan dipandang secara terbalik dengan perspektif objek atau penderita. Artinya, konsep keadilan bagi subjek, dapat menjadi ketidakadilan bagi objek dan sebaliknya. Keadilan sebagai sebuah wacana berakar dalam praktik-praktik kehidupan, dalam lembaga-lembaga dan tindakan manusia pada umumnya.

Realitas sosial di masyarakat yang kadang tampak sebagai sesuatu yang berjalan benar dan wajar (bagi rezim penguasa otoritas), tidak selamanya demikian bagi pandangan pengarang. Tokoh dan peristiwa yang diciptakan oleh pengarang dalam karyanya seringkali justru merupakan perlawanan bagi kondisi yang berlaku dalam realitas sosial atau masyarakat yang sesungguhnya. Hal tersebut terimplementasi melalui sistem nilai atau gagasan dan tindakan tokoh-tokoh imajinatif pengarang dalam karya fiksinya.

Elemen-elemen dalam *Kalatidha* seperti kolase,¹³ kisah-kisah ilustratif, dan pandangan tokoh menjadi alat untuk menggugat¹⁴ ketidakadilan yang terjadi. Ketidakadilan secara metaforis ditampilkan sebagai kabut; kabut dalam dunia

¹² Diambil dari wikipedia Indonesia.

¹³ Istilah kolase dalam *Kamus Istilah Sastra* susunan Panuti Sudjiman (Jakarta: UI Press, 1990) yaitu teknik penyusunan karya sastra dengan cara menempelkan bahan-bahan seperti alusi, ungkapan asing, dan kutipan yang biasanya dianggap tidak berhubungan satu dengan yang lain.

¹⁴ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, 2003) menggugat berarti mendakwa, menuntut, mencela dengan keras, dan menyanggah.

maya dan kabut dalam dunia nyata yang di dalamnya terdapat kisah-kisah dan tokoh-tokoh simbol ketidakadilan.

Kalatidha juga menyajikan perlawanan tokoh-tokohnya terhadap ketidakadilan yang direpresikan oleh penguasa otoritas, seolah-olah para tokoh itu menggugat sebuah dunia berkabut, dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Usaha menggugat itu seperti sebuah perlawanan terhadap wacana penguasa otoritas masa lalu yang telah menciptakan berbagai persoalan yang samar-samar di kemudian hari khususnya persoalan keadilan.

1.2 Tinjauan Pustaka

Kalatidha disajikan sebagai sebuah novel, sebuah karya fiksi. Namun, ketika membaca beberapa bagian *Kalatidha* yang ditempli dengan kolase-kolase guntingan koran¹⁵ serta nama dan peristiwa-peristiwa seolah membaca sejarah lisan yang tertuang lewat autobiografi. Sejarah kelabu yang terjadi di Indonesia dituturkan oleh saksi sekaligus korban tragedi kemanusiaan pasca peristiwa G 30 S 1965 lengkap dengan penyajian bukti atmosfer hegemoni politik yang terselubung dan ekspresi-impresif dari penuturnya. Bedannya dengan buku-buku sejarah adalah *Kalatidha* menyajikan realitas yang disertai dengan hadirnya tokoh fantastis dan peristiwa transendental yang menjadi bangun yang paralel dengan realitas tersebut.

Semenjak terbukanya “keran” kebebasan bersuara atau demokrasi di semua bidang dalam era reformasi di Indonesia tahun 1998, mulai bermunculan buku-buku penelitian sejarah yang mencoba menguak sisi lain dari peristiwa

¹⁵ Dalam realitas sosial, guntingan koran tersebut merupakan fakta sejarah yang mengindikasikan realitas dalam kehidupan masyarakat pada masanya (bukti kliping koran dapat dilihat di Perpustakaan Nasional RI).

pasca G 30 S. Penelitian tersebut cenderung berusaha melawan narasi pemerintah rezim Orde Baru yang mengabaikan peristiwa-peristiwa pasca G 30 S. Bahwa telah terjadi pembantaian massal, kekerasan kolektif, pembunuhan karakter, penyiksaan, perkosaan, dan penghukuman penjara tanpa pengadilan yang dialami oleh ratusan ribu orang yang menjadi korban tuduhan kesalahan kolektif organisasi politik. Semua itu nyaris tidak ada dalam dokumen resmi pemerintah maupun di dalam buku-buku pelajaran di sekolah, bahkan media massa koran pun pada waktu rezim Orde Baru tidak ada yang memuat berita maupun foto tragedi tersebut.¹⁶ Juga, tidak ada yang menarasikan penderitaan korban tragedi 1965 setelah kembali di masyarakat yang berjuang melawan stigmatisasi dan pemarginalan demi kelangsungan hidup dirinya, keluarga serta keturunannya.

Buku-buku sejarah lisan yang mengungkap tragedi kemanusiaan 1965 dari para saksi dan korban baik selama masa pencidukan, penahanan, hingga perjuangan untuk hidup dan diterima kembali di masyarakat di antara sekian banyak adalah buku *Menembus Tirai Asap: Kesaksian Tahanan Politik 1965* (2003)¹⁷ dan *Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65* (2004)¹⁸. Sebagai sejarah lisan terutama dari perspektif korban dan saksi, kedua buku tersebut telah memberi sumbangan untuk (meminjam istilah dalam

¹⁶ Media massa tidak memuat berita tragedi berdarah tersebut dapat dipahami karena penguasa otoritas yang juga militer telah menguasai media massa dan pemberitaan yang beredar cenderung tentang kejahatan PKI (lihat dalam John Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto* (Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra, 2008), hlm. 40). Hal tersebut dikuatkan dengan esai Satyagraha Hoerip yang menyatakan bahwa pembunuhan massal telah terjadi dan beredar dari mulut ke mulut namun tidak ada satu berita atau foto pun mengenai hal itu yang dimuat di koran dan majalah, di dalam maupun di luar negeri (Satyagraha Hoerip, "Pemberontakan Gestapu/PKI dalam Cerpen-cerpen Indonesia" dalam *Cerpen Indonesia Mutakhir: Antologi Esai dan Kritik*, Pamusuk Eneste (ed.) (Jakarta: Gramedia, 1983) hlm. 56—57).

¹⁷ Sasongko, Haryo dan Melani Budianta (ed.), *op.cit.*

¹⁸ Roosa, John, Ayu Ratih, dan Hilmar Farid (eds.), *op.cit.*

buku pertama) merekat ingatan kolektif mengenai gejolak politik di tahun 1965.¹⁹ Korban yang sedemikian banyak dengan berbagai latar belakang dan tersebar di seantero negeri, menyebabkan keterbatasan pengumpulan bukti sejarah yang disajikan oleh buku-buku tersebut yang dulu (sengaja) tidak pernah dipublikasikan. Namun, keterbatasan tersebut sudah cukup memberi bukti bahwa kekerasan kolektif, pembunuhan massal, penahanan tanpa pengadilan, dan sebagainya itu pernah terjadi dan oleh karenanya menggugah rasa keadilan dan kemanusiaan bagi pembacanya sekalipun tidak pernah mengalami, serta memberi kesaksian atas fakta sejarah yang dulu pernah ditutup-tutupi.

Seperti halnya dalam *Kalatidha*, kedua buku tersebut mengungkapkan sisi kemanusiaan dan mewacanakan keadilan bagi korban-korban kekerasan kolektif serta dampak bagi kelangsungan hidup bersosial mereka. Para korban menyadari ketidakadilan telah terjadi dalam hidup mereka dan ribuan orang lain. Namun mereka seolah tidak mempunyai suara untuk memperjuangkan nasib mereka sendiri. Suara mereka telah dibungkam oleh kekuasaan superstruktur. Hal inilah yang diisi oleh *Kalatidha*, yaitu menyuarakan “kesakitan”, ketidakadilan, dan sekaligus berimajinasi untuk melakukan “tindakan pembalasan” atas nama keadilan.

Perlawanan narasi pemerintah atau setidaknya pengungkapan sisi lain dari sejarah 1965 yang tidak diungkapkan dalam historiografi konstruksi pemerintah sesungguhnya sudah ada. Hanya saja, kebebasan berbicara secara verbal yang diatur dengan ketat telah membuat narasi perlawanan dituangkan dalam bentuk fiksi. Beberapa karya sastra fiksi tersebut misalnya novel *Anak Tanah Air* karya

¹⁹ Menjadi judul dalam Pendahuluan oleh Melani Budianta (Sasongko dan Melani Budianta (ed.), *op. cit.*, hlm. xv).

Ajip Rosyidi, *Durga Umayi* karya Romo Mangunwijaya, *Para Priyayi* karya Umar Khayam, *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu* dan *Bumi Manusia* karya Pramoedya Ananta Toer, *Larung* karya Ayu Utami, *Leontin Dewangga* karya Martin Aleyda, *Jentera Lepas* karya Ashadi Siregar, *Mencoba Tidak Menyerah* karya Yudistira ANM, *Kubah* dan *Ronggeng Dukuh Paruk* karya Ahmad Tohari, *Nyali* karya Putu Wijaya, *Jamilah* karya K. Usman, dan *Tapol* karya Ngarto Februana. Majalah *Horison* dan *Sastra* yang terbit antara periode tahun 1966 – 1970 memuat cerpen-cerpen yang secara eksplisit membicarakan tragedi 1965. Cerpen-cerpen tersebut adalah "Pada Titik Kulminasi" karya Satyagraha Hoerip, "Perempuan dan Anak-anaknya" karya Gerson Poyk, "Maka Sempurnalah Penderitaan Saya di Muka Bumi" karya Zulidahlan, "Sebuah Perjuangan Kecil" karya Nugroho Sosiawan, "Perang dan Kemanusiaan" karya Usamah, "Musim Gugur Kembali di Connecticut" dan "Bawuk" karya Umar Kayam, "Malam Kelabu" karya Martin Aleyda, "Bintang Maut" dan "Domba Kain" karya Kipanjikusmin, "Ancaman" karya Ugati, H.G., "Maut" karya Mohammad Sjoekoer.

Sebagai sebuah novel yang relatif baru, *Kalatidha*, sejauh informasi yang dapat dihimpun, belum pernah diteliti dengan landasan kajian ilmiah²⁰. Kenyataan ini membuka peluang yang seluas-luasnya kepada setiap kajian dari sudut pandang yang berbeda-beda.

²⁰ Tanggapan terhadap *Kalatidha* hanya berupa artikel dan komentar yang dimuat di koran dan sejumlah blog di internet. Pembicaraan atas karya SGA lainnya berupa sejumlah cerpen –yang sesungguhnya kurang relevan dalam penelitian ini karena penelitian ini tidak menyinggung karya SGA lain maupun sisi kepengarangannya meskipun dapat dijadikan sebagai informasi tambahan— di antaranya adalah skripsi karya Efrizan (1996) berjudul "Timor-Timur di Mata SGA", tesis karya Agus Nuryatin (2001) berjudul "Fakta dalam Fiksi: Teknik Penceritaan Cerpen SGA", skripsi karya Purwanto (2002) berjudul "Cerpen-Cerpen SGA: Sebuah Tinjauan Stilistika". Ketiganya dari Universitas Indonesia.

Dalam khasanah kesusastraan Indonesia SGA merupakan salah satu tokoh penulis yang tidak disangsikan lagi kemampuannya²¹. Bahkan pesona untaian kata SGA dalam karya-karyanya telah melahirkan sidang *mailing-list* [senogumiraajidarma @yahoogroups.com](mailto:senogumiraajidarma@yahoo.com) dan blog <http://sukab.wordpress.com> yang berisi profil, karya, komentar, dan sebagainya yang berkenaan dengan SGA.

Dalam komentar yang dapat dilihat di *mailing-list* SGA, *Kalatidha* menuai berbagai pujian sekaligus cercaan (dianggap sebagai “sampah” karena seperti coretan-coretan orang sedang stres)²². Namun, ada beberapa esai atau komentar atas *Kalatidha* yang dimuat di koran maupun di internet yang disampaikan dengan landasan berfikir yang cenderung serius, meskipun tidak dalam kerangka kajian ilmiah. Pendapat-pendapat tersebut di samping menawarkan ide-ide penelitian juga mendukung hipotesa ideologi pengarang dalam membagi fase kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang dengan konsep-konsep idealistiknya.

Esai yang ditulis Savitri Scherer dengan judul “Rekonsiliasi Fakta dan Fiksi”²³ yang mengupas *Kalatidha* antara lain mengetengahkan perihal cita rasa tersendiri SGA untuk menyajikan rahasia hidup, yaitu fakta yang berupa guntingan koran yang berfungsi sebagai pengingat suatu sebab kejadian/peristiwa masa lalu dan fiksi di satu pihak yang membandingkan kejadian/peristiwa yang sempat mewujudkan dengan kerancuan bayangan yang dipikirkan oleh tokoh yang

²¹ Setidaknya ia telah mengantongi beberapa penghargaan atas kepenulisannya baik di tingkat nasional (beberapa cerpennya terpilih menjadi cerpen terbaik pilihan *Kompas*, bahkan menempati ranking teratas frekuensi keterpilihan cerpen-cerpennya dalam ajang itu, memenangi Katulistiwa Literary Award 2004 dan 2005) maupun internasional (penghargaan SEA Write Award 1987, Dinny O’Hearn Prize for Literary 1997).

²² Lihat dalam <http://sukab.wordpress.com/seno-gumira-ajidarma/#comment>. Komentar-komentar ini hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa karya-karya SGA banyak diminati pembaca, bukan sebagai acuan ilmiah.

²³ Dimuat di *Kompas*, Senin, 20 Agustus 2007, rubrik : Pustakaloka.

gila. Peristiwa yang sudah lewat itu (fakta maupun fiksi) masing-masing mempunyai rasanya sendiri. Rasa pada waktu kejadian dan rasa dari ingatan mengenai kejadian itu tidak mungkin sama. Menurut pandangan Scherer, Seno seolah ingin membawa pembacanya menerima segala kontradiksi kehidupan sebagai urusan yang tidak akan selesai diuraikan namun berusaha membawa nilai khusus bagi pembaca Indonesia untuk memikirkan prioritas apa saja yang harus didahulukan dalam memajukan kesejahteraan kehidupan bersama di tengah dunia yang selalu rancu. Sesuai dengan judulnya, esai tersebut menyoroti keterkaitan antara fakta yang berupa fakta cerita dan realitas sosial di Indonesia yang diramu dengan fiksi yang dibangun pengarang, atau dengan kata lain Scherer menunjukkan bahwa *Kalatidha* merupakan rangkuman cerita sejarah suram yang dituangkan dalam fiksi berdasar sudut pandang pengarang. Masyarakat yang tereksklusi, yaitu penghuni rumah sakit jiwa dan para narapidana, dan permasalahan sosial lain disinggung juga dalam tulisan tersebut. Bahkan ia mengatakan bahwa peradaban yang aturan dan kodenya dibuat oleh setiap penguasa zamannya, neraka dunia ini, penjara dan rumah sakit jiwa sudah dijabarkan ahli filsafat Perancis Foucault. Hanya saja Savitri tidak mengimplementasikannya dalam bentuk analisis lengkap. Ini membuka peluang bagi penelitian lain untuk melakukannya.

Beberapa komentar lewat blog di internet cenderung bersifat impresionistik²⁴. Secara garis besar komentar tersebut menyatakan bahwa novel *Kalatidha* tidak ada *ending* yang jelas, yaitu penjelasan yang akan merentangkan

²⁴ Lihat dalam <http://www.bukukita.com/infodetailbuku.php?idBook=3845>, diakses 24 September 2007, pukul 14.51, <http://qyu.blogspot.com/2007/03/kalatidh.html>, diakses 6 Oktober 2007, pukul 09.04., dan <http://evolia.wordpress.com/2007/05/22/>, diakses pada 24 September 2007, pukul 15.23, serta <http://deathrockstar.info/comet/2007/05/14/kalatidha/>, diakses pada 6 Oktober 2007, pk. 09.07.

semua benang merah antara setiap khayalan, setiap catatan, setiap klipng koran, setiap memori masa lalu, menjadi satu rangkaian yang utuh dan membentuk cerita yang lengkap, pembaca diajak berlompat-lompat dalam cerita yang real dan sureal. Menurut saya, tidak adanya benang merah yang diharapkan dari komentar tersebut pada dasarnya justru membuka peluang bagi pembaca untuk menginterpretasikan *Kalatidha* dengan lebih beragam.

1.3 Masalah

Persoalan keadilan dalam *Kalatidha* karya SGA sangat dominan mewarnai kisah demi kisah atau dapat dikatakan keadilan menjadi tema cerita. Persoalan tersebut berkaitan dengan sejarah G 30 S yang kontroversial bagi masyarakat Indonesia. Narasi tentang G 30 S yang dibuat oleh Orde Baru merupakan realitas sosial yang dinegasi oleh *Kalatidha* dengan cara metaforis dan ironis. Masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah tema keadilan dalam novel *Kalatidha* yang dikaitkan dengan narasi Orde Baru tentang G 30 S PKI.

1.4 Tujuan

Berdasarkan masalah yang diajukan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian terhadap novel *Kalatidha* karya SGA yaitu memahami tema keadilan dalam novel *Kalatidha* yang dikaitkan dengan narasi Orde Baru tentang G 30 S PKI.

1.5 Landasan Teori

Karya sastra diciptakan oleh pengarang dengan mengangkat masalah kehidupan sebagai suatu proses dan kenyataan sosial, sehingga karya sastra merupakan hasil

pengaruh yang rumit dari faktor-faktor sosial budaya.²⁵ Salah satu faktor penyebabnya adalah bahwa sesuatu yang dikerjakan oleh pengarang dalam karyanya dapat sebagai bentuk usaha menanggapi realitas di sekitarnya, berkomunikasi dengan realitas, atau menciptakan kembali realitas itu.

Pendekatan terhadap sastra yang mencoba menghubungkan karya sastra dengan realitas sosial adalah pendekatan sosiokultural terhadap kesusastraan atau sosiologi sastra. Pendekatan ini mempunyai kecenderungan antara lain menjadikan teks sastra sebagai bahan penelitian pokok untuk memahami gejala dalam teks karya sastra, dan selanjutnya dipergunakan untuk memahami lebih lanjut gejala di luar sastra.²⁶

Karya sastra juga memberikan kepada kita wawasan mengenai kenyataan dalam masyarakat.²⁷ Dengan demikian dapat dikatakan karya sastra mempunyai hubungan yang hakiki dengan masyarakat. Namun, hubungan karya sastra dengan masyarakat dapat berupa negasi, inovasi, atau afirmasi.²⁸ *Kalatidha* memberi gambaran kenyataan dalam masyarakat dengan cara menegasi sebuah narasi dominan dalam masyarakat yang kehadirannya merupakan hasil konstruksi dan dilegitimasi secara superstruktur oleh lembaga resmi pemerintah, yaitu peristiwa seputar G 30 S PKI dan sesudahnya.

Fungsi karya sastra sebagai pembentuk gagasan yang aktif ditunjang oleh konsep tentang representasi.²⁹ Representasi adalah tindakan yang menggantikan

²⁵ Sapardi Djoko Damono, *Novel Sastra Indonesia Sebelum Perang* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1979), hlm. 3

²⁶ Sapardi Djoko Damono, *Sosiologi Sastra Sebuah Pengantar Ringkas* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1983), hlm. 3.

²⁷ Jan Van Luxemburg, Mieke Bal, dan Willem G. Weststeijn, *Tentang Sastra* (Jakarta: Intermedia, 1989), hlm. 45.

²⁸ Nyoman Kutha Ratna. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra* (Yogyakarta, 2007), hlm. 334.

²⁹ Melani Budianta, "Sastra dan Ideologi Gender" dalam *Horison* XXXII/4/1998, hlm. 8.

sesuatu yang tidak dapat terjadi atau tidak mampu menghadirkannya sendiri.³⁰ Dalam konsep representasi yang diperbarui, fungsi karya sastra bukan lagi semata-mata sebagai “cermin” masyarakat. Peristiwa, struktur, hubungan memang memiliki kondisi yang riil di luar wilayah diskursif, tetapi hanya dalam wilayah diskursiflah struktur, peristiwa-peristiwa, dan hubungan-hubungan yang terjadi dalam kenyataan itu diberikan makna. Hubungan-hubungan itu dapat membentuk sebuah “skenario” representasi yang memiliki makna tersendiri.³¹

Seperti kata Swingewood yang dikutip oleh Damono bahwa sastra berurusan dengan dunia sosial manusia, dengan usaha manusia untuk menyesuaikan diri, dan dengan keinginan manusia untuk mengubah.³² Berkaitan dengan hal tersebut, elemen-elemen dalam *Kalatidha* secara imajinatif dapat dimanfaatkan dalam usaha memberi evaluasi terhadap situasi dan kondisi yang berhubungan dengan masih “kaburnya” peristiwa G 30 S PKI 1965 di Indonesia dan keadilan bagi para korban kekerasan kolektif dan pemarginalan. Dengan demikian, karya di dalam karya sastra juga terkandung ideologi tertentu yang tertuang di dalam gagasan. Batasan tentang ideologi dari Raymond William adalah: (1) sistem nilai atau gagasan yang dimiliki oleh suatu kelompok atau lapisan masyarakat tertentu, (2) kesadaran atau gagasan yang keliru tentang sesuatu, (3) proses-proses yang bersifat umum dalam produksi makna dan

³⁰ Joseph Childers dan Gary Hentzi, *The Columbia Dictionary of Modern Literary and Cultural Criticism*, 1995, hlm. 261.

³¹ Budianta, *loc. cit.*

³² Sapardi Djoko Damono, *Pedoman Penelitian Sosiologi Sastra*. (Jakarta: Pusat Bahasa, Depdiknas, 2002), hlm. 12.

gagasan.³³ Berkaitan dengan representasi, batasan ideologi yang dipakai terutama pengertian yang ketiga.

Elemen-elemen dalam *Kalatidha* yang dimaksud antara lain yang dominan adalah adanya kolase atau tempelan yang bervariasi. Kolase tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang ditampilkan secara imajinatif untuk mendukung pemaknaan karya.

Kolase yang ada di dalam *Kalatidha* dapat juga diartikan sebagai teks, demikian juga dengan novel *Kalatidha* sendiri. Menurut Luxemburg kita menulis dan membaca dalam suatu “interteks” suatu tradisi budaya, sosial, dan sastra yang tertuang dalam teks-teks. Setiap teks sebagian bertumpu pada konvensi sastra dan bahasa dan dipengaruhi oleh teks-teks sebelumnya.³⁴ Di samping itu, George Lukacs dalam *Le Roman Historique* pernah mengatakan bahwa manusia, karya, dan genre sastra tidak bergerak dalam *ex nihilo*, tetapi ia dipersiapkan dan dikondisikan oleh suatu konteks historiko-sosiologis.³⁵ Sastra bukan sebagai hasil karya yang otonom; *Kalatidha* sebagai karya adalah hasil persentuhan antara pengarang, lingkungan, dan sejarah nasional Indonesia.

Teks terdiri atas bagian yang saling bertalian dan mempunyai hubungan dengan konteks, yaitu pengarang, pembaca, dan dunia nyata. Teks yang secara dominan merujuk kepada dunia nyata disebut teks referensial. Teks referensial dimaksudkan untuk memberi informasi tentang apa yang terjadi di dunia nyata dengan apa adanya, sekalipun tidak selalu tercipta gambaran yang objektif tentang kenyataan. Di satu sisi dapat juga secara sadar teks ditampilkan dengan cara

³³ Raymond William, “Ideology” dalam *Ideology*, editor Terry Eagleton (London: Longman, 1994), hlm. 175

³⁴ Luxemburg, Mieke Bal, dan Willem G. Weststeijn, *op.cit.* hlm. 10.

³⁵ Dalam Asvi Warman Adam, “Imajinasi yang Terus Bertanya” dalam *Kompas* edisi Sabtu, 22 Desember 2007, rubrik Humaniora.

membelokkan kenyataan dan memanipulasi fakta.³⁶ Pendapat tersebut dapat digunakan sebagai acuan tentang kemungkinan *Kalatidha* berada dalam posisi yang bersimpangan dengan teks lain dalam memandang satu permasalahan yang sama.

Kolase, kisah suatu peristiwa, tokoh, pandangan tokoh, dan elemen lain dalam *Kalatidha* merupakan bahan yang bila diolah dengan memanfaatkan unsur estetis misalnya metafora, ironi, simbol, dan sebagainya dapat menjadi alat untuk upaya penggugatan terhadap ketidakadilan dalam *Kalatidha*. Untuk memahami gejala lain di luar karya sastra dipergunakan teori-teori sosial umum yang berkaitan dengan keadilan.

1.6 Metode Penelitian

Langkah dalam penelitian ini akan melalui tiga tahap, yaitu pengumpulan data, analisis data, dan penyajian hasil analisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara menemukan data primer berupa teks *Kalatidha* karya SGA dan data sekunder berupa kliping koran, sumber sejarah resmi, dan arsip lainnya yang menjadi referensi atau sumber acuan untuk mencari hubungan peristiwa yang tersebar di dalam teks.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik, yakni dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis.³⁷ Deskriptif analitis tidak hanya menguraikan melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. Penelitian ini memandang dan mendudukan karya sastra sebagai teks. Oleh karena itu, dalam prosedur kerja penelitian, dilakukan terlebih

³⁶ Luxemburg, Mieke Bal, dan Willem G. Weststeijn, *op.cit.* hlm. 54—55.

³⁷ Nyoman Kutha Ratna. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra* (Yogyakarta, 2007), hlm. 53.

dahulu analisis teks untuk keperluan deskripsi dan selanjutnya diikuti oleh proses analisis.

Dalam penelitian ini *Kalatidha* dipandang secara intertekstual dengan narasi resmi pemerintah. Dengan demikian, analisis dikerjakan dengan membangun representasi-representasi atas kedua teks tersebut agar terlihat jalinan keterkaitannya dan fungsi *Kalatidha* sebagai sebuah karya dalam wilayah yang lebih luas dari konteks dunia sastra.

1.7 Sistematika Penyajian

Penelitian ini akan disajikan dalam 5 bab. Bab kesatu berupa pendahuluan yang berisi latar belakang, tinjauan pustaka, masalah, tujuan, landasan teori, metode, dan sistematika penyajian. Bab kedua berupa deskripsi narasi Orde Baru tentang pemberontakan G 30 S/PKI dan representasinya.

Inti dalam bab tiga adalah analisis narasi metafora “dunia kabut” dalam *Kalatidha* sebagai sebuah gugatan tentang keadilan terhadap narasi pemerintah Orde Baru mengenai G 30 S PKI beserta representasinya. Namun, sebelum penyajian analisis tersebut akan disampaikan batasan tentang keadilan yang dijadikan sebagai alat menggugat narasi lain dan pengantar tentang “dunia kabut” dalam *Kalatidha* dengan pengertian metaforis. Bab keempat berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi pokok-pokok temuan penelitian sesuai masalah yang telah diajukan dalam bab pendahuluan.

BAB II

Representasi Narasi Pemerintah Orde Baru tentang G 30 S/PKI

2.1 Narasi Pemerintah Orde Baru tentang G 30 S/PKI

Opini-opini masyarakat dibangun dari teks-teks yang beredar di masyarakat. Peristiwa G 30 S tahun 1965 merupakan peristiwa nasional yang memunculkan banyak opini. Pemerintah Orde Baru (Orba) yang mempunyai kompetensi dengan peristiwa tersebut telah mengeluarkan narasi resmi tentang G 30 S dalam satu versi dengan nama Pemberontakan G-30-S/PKI. Nama PKI (Partai Komunis Indonesia) dicantumkan dan tidak terpisahkan karena dianggap sebagai pelaku pemberontakan.

Berikut ini disajikan narasi tentang PKI dan Peristiwa G-30-S menurut versi pemerintah Orde Baru (Orba). Narasi ini dipetik dari sumber resmi pemerintah Orba, khususnya buku pelajaran sejarah yang diwajibkan atau sebagai pegangan bahan pendidikan sejarah di seluruh Indonesia, yakni *Sejarah Nasional Indonesia VI* karangan Marwati Djoenet dan Nugroho Notosusanto, terbitan Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 1993.

2.1.1 Penumpasan G 30 S/PKI

PKI telah melakukan kudeta kepada pemerintah yang sah pimpinan Presiden Soekarno yang dimulai pada tanggal 30 September 1965 pada malam hari dan dilanjutkan keesokan harinya secara sistematis. Pemberontakan itu dimulai dengan pembunuhan para perwira tinggi di lingkungan Angkatan Darat yang

dikenal sebagai tragedi Lubang Buaya. Peristiwa ini dikenal sebagai Pemberontakan G-30-S/PKI dan memakan korban para perwira militer yang kemudian dikenal sebagai Pahlawan Revolusi. Enam orang ditemukan di dalam sumur Lubang Buaya.³³

Rencana pemberontakan G-30-S/PKI telah dimulai sejak tahun 1964 dengan dibentuknya Biro Khusus langsung di bawah pimpinan DN Aidit. Biro Khusus ini aktif melakukan pematangan situasi bagi perebutan kekuasaan dan melakukan infiltrasi ke dalam tubuh ABRI dibarengi dengan usaha penyusunan kekuatan dengan menggunakan tenaga-tenaga dalam bidang kemiliteran dari kalangan anggota PKI dan organisasi satelitnya terutama Pemuda Rakyat dan Gerwani.

Sejak tanggal 6 September 1965 pimpinan Biro Khusus PKI berturut-turut melakukan rapat rahasia dengan beberapa oknum ABRI. Mereka melemparkan isu adanya Dewan Jenderal, yakni sekelompok perwira militer yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno yang sedang sakit parah. Ketua Pelaksana Biro Khusus PKI, Sjam Kamaruzzaman, menyampaikan instruksi DN Aidit untuk mendahului kudeta Dewan Jenderal. Dewan Jenderal sendiri hanya sebuah isu untuk memanaskan situasi politik dan melegalkan kudeta yang akan dilancarkan oleh PKI.

Pada tanggal 22 September 1965, yakni pada rapat yang ketujuh dalam usaha kudeta secara sistematis itu, ditetapkan sasaran gerakan pasukan. Pasukan

³³ Keenam perwira yang ditemukan mayatnya di dalam sumur Lubang Buaya tersebut adalah: 1. Menteri/Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani, 2. Deputi II Pangad, Mayor Jenderal R. Soeprapto, 3. Deputi II Pangad, Mayor Harjono Mas Tirtodarmo, 4. Asisten I Pangad, Mayor Jenderal Siswondo Parman, 5. Asiaten IV Pangad Brigjen Donald Izacus Panjaitan, 6. Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat Brigjen Soetojo Siswomihardjo.

Pasopati akan bergerak untuk menculik dan membunuh para jenderal Angkatan Darat. Pasukan *Bimasakti* bertugas menduduki gedung RRI dan gedung Telekomunikasi, dan pasukan *Gatutkaca* bertugas mengkoordinasi kegiatan di Lubang Buaya. Sesuai dengan keputusan rapat terakhir tanggal 29 September 1965 gerakan ini diberi nama Gerakan 30 September atau Gestapu.

Biro Khusus PKI juga melakukan koordinasi dan rapat-rapat rahasia dengan oknum ABRI dan Biro Khusus di daerah-daerah, melakukan indoktrinasi ajaran Marxisme dan Leninisme khususnya ke kalangan militer yang dipersiapkan untuk melakukan pemberontakan. Secara fisik-militer gerakan pemberontakan akan dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalyon I Cakrabirawa (pasukan pengawal presiden) selaku pimpinan formal seluruh gerakan.

“Mereka mulai bergerak pada dini hari 1 Oktober 1965, didahului dengan gerakan penculikan dan pembunuhan terhadap enam perwira tinggi dan seorang perwira pertama Angkatan Darat. Kesemuanya dibawa ke desa Lubang Buaya sebelah Selatan Pangkalan Udara Utama Halim Perdanakusuma. Secara kejam mereka dianiaya dan akhirnya dibunuh oleh anggota-anggota Pemuda Rakyat, Gerwani, dan lain-lain organisasi satelit PKI. Setelah puas dengan segala kekejamannya, semua jenazah dimasukkan ke dalam sumur tua lalu ditimbun dengan sampah dan tanah.” (hlm. 390)

Penculikan dan pembunuhan itu tidak semuanya berhasil sesuai target. Salah satu target terpenting, yakni Jenderal A.H. Nasution (Menteri/Panglima ABRI) lolos dari upaya pembunuhan, namun anaknya yang bernama Ade Irma Suryani dibunuh oleh PKI dalam peristiwa dini hari itu. Sesuai dengan rencana awal, pasukan *Bimasakti* menguasai sarana telekomunikasi guna memperoleh dukungan dari masyarakat.

“Bersamaan dengan gerakan penculikan mereka juga menguasai dua buah sarana komunikasi yang vital, yaitu studio RRI

Pusat...dan Gedung PN Telekomunikasi...Antara lain diumumkan bahwa gerakan mereka ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta...Untuk menutupi tujuan yang sebenarnya fitnah dilancarkan terhadap tokoh-tokoh pimpinan Angkatan Darat.” (hlm.390—391)

Pada hari itu juga Pangkostrad Mayor Jenderal Soeharto menerima laporan dan segera bertindak untuk menguasai keadaan. Hal itu sesuai dengan tata cara yang berlaku, yakni apabila Menteri/Panglima Angkatan Darat (Jend. Ahmad Yani) berhalangan maka Pangkostrad ditunjuk sebagai penggantinya. Sambil menunggu petunjuk dari Presiden selaku Panglima Tertinggi ABRI maka Mayjen Soeharto memegang pucuk pimpinan tertinggi Angkatan Darat. Soeharto segera mengambil langkah-langkah koordinasi dengan pimpinan angkatan lain, kecuali Menteri/Penglima Angkatan Udara Omar Dhani yang kemudian diketahui terlibat Pemberontakan G-30-S/PKI.

Menghadapi situasi itu Pangkostrad menilai bahwa pembunuhan terhadap petinggi militer tersebut merupakan upaya perebutan kekuasaan pemerintahan. Dengan alasan tersebut, selanjutnya dengan berpegang pada Saptamarga, Soeharto melancarkan operasi menumpas G-30-S/PKI. Indikasi bahwa telah terjadi pemberontakan diperkuat dengan pengumuman dekrit Dewan Revolusi dan pendemisioneran Kabinet Dwikora. Dengan cepat dilakukan operasi penumpasan G-30-S/PKI pada tanggal 1 Oktober 1965 tanpa melalui konsultasi dengan Presiden Soekarno, karena presiden sedang berada di Lanuma Halim Perdanakusumah yang sedang dikuasai PKI.

Pada hari itu juga, setelah mengetahui terbunuhnya Jend. A. Yani, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah agar ABRI mempertinggi kesiapsiagaan, dan untuk sementara pimpinan tertinggi Angkatan Darat dipegang

oleh Presiden dan untuk pelaksanaan keseharian dilakukan oleh Asisten III Men/Pangad Mayjen Pranoto. Perintah tersebut ternyata tidak segera diketahui oleh petinggi ABRI yang berada di luar daerah Halim Perdanakusumah sehingga Mayjen Soeharto menyatakan untuk sementara memegang pimpinan Angkatan Darat.

Dalam operasi yang dipimpin Soeharto, dalam waktu yang relatif pendek, Lanuma Halim Perdanakusumah sebagai pusat pemberontakan dapat dikuasai oleh pemerintah. Pada tanggal 4 Oktober, mayat para korban kekejaman PKI ditemukan dan dimakamkan keesokan harinya (tanggal 5 Oktober 1965).

Sehubungan ada dualisme kepemimpinan di tubuh Angkatan Darat karena terhambatnya informasi maka pada tanggal 2 Oktober 1965 Presiden memanggil semua pimpinan Angkatan ke Istana Bogor. Untuk sementara Pimpinan Angkatan Darat dipegang langsung oleh Presiden, pelaksana tugas sehari-hari Mayjen Pranoto, dan kepada Mayjen Soeharto diberi tugas melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban sehubungan dengan peristiwa Pemberontakan G-30-S/PKI. Tugas yang diberikan kepada Soeharto merupakan awal dari esensi kehadiran lembaga Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib).

Menanggapi penyelesaian G-30-S Presiden Soekarno dalam sidang kabinet pada tanggal 6 Oktober 1965 mengatakan bahwa selaku Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi, dia mengutuk petualang-petualang kontra-revolusi yang menamakan dirinya G-30-S, dan tidak membenarkan adanya Dewan Revolusi serta pendemisioneran kabinet seperti yang diumumkan oleh PKI melalui radio.

Pernyataan presiden tersebut semakin mengungkap fakta bahwa G-30-S didalangi oleh PKI dan hal ini menyebabkan meningkatnya kemarahan rakyat kepada PKI. Kemarahan itu antara lain tampak pada pembakaran kantor pusat PKI. Demikian pula rumah-rumah para tokoh PKI menjadi sasaran kemarahan rakyat dan aksi coret-coret, demonstrasi menuntut pengadilan dan pembubaran PKI. Aksi-aksi massa menuntut hal yang sama juga terjadi di daerah-daerah. Komando Daerah Militer (Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah) membekukan PKI dan ormas-ormasnya.

“...dengan dibakarnya kantor pusat PKI...rumah-rumah tokoh PKI dan kantor-kantornya menjadi sasaran kemarahan rakyat, aksi-aksi corat-coret menuntut supaya pimpinan PKI diadili dan demonstrasi-demonstrasi menuntut pembubaran PKI...Gerakan operasi pembersihan terhadap sisa-sisa G 30 S terus ditingkatkan...” (hlm. 396)

Pada masa pemberontakan G-30-S, di daerah-daerah dilukiskan telah terjadi berbagai penculikan terhadap petinggi Angkatan Darat oleh Dewan Revolusi yang dibentuk PKI. Di Yogyakarta, misalnya, Dewan Revolusi pada tanggal 1 Oktober dengan menggunakan kekuatan Batalyon L menguasai markas Korem 072 dan menculik Kepala Staf Korem 072 Letkol Sugijono, dan mengeluarkan perintah agar mendukung G-30-S. Pada hari itu juga PKI menculik Kolonel Katamso, Komandan Korem 072. Di Solo, PKI menculik Komandan Brigade 6 Kolonel Azhari, Kepala Stafnya Letkol Parwoto, Komandan Kodim 0735 Letkol Ezi Soeharto, Mayor Soeparjan, Kapten Prawoto, Mayor Darso. Di Semarang terjadi kudeta terhadap Pangdam VII/Diponegoro dan berdiri Dewan Revolusi, demikian pula di kota Solo. Menghadapi kenyataan tersebut dilakukan penumpasan terhadap para pemberontak.

Setelah pemberontakan PKI berhasil ditumpas, tanggal 1 Desember 1965 di Jakarta dibentuk Komando Operasi Merapi di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhie, yang bertugas melakukan pembersihan terhadap sisa-sisa PKI. Operasi ini menembak mati para pendukung pemberontak seperti Kol. Sahirman, Kol. Maryono, Kol. Usman, Mayor Samadi, dll.

2.1.2 Pembubaran dan Pemberantasan PKI

Setelah gerakan kudetanya gagal dan sebelum tertangkap, Ketua Central Komite PKI D.N. Aidit mengeluarkan 10 butir instruksi tetap.³⁴ Berdasarkan instruksi itu, beberapa tokoh partai PKI yang belum tertangkap melakukan konsolidasi. Usaha mereka selanjutnya tercantum dalam Tri Panji Partai yang di antaranya menyebutkan mempersiapkan pemberontakan tani bersenjata. Secara rahasia mereka mendirikan basis-basis dan komite proyek di seluruh daerah bagi kembalinya PKI. Mereka juga melakukan gerakan 3T (tidak tahu, tidak mengerti, tidak kenal) dan mulai mengadakan propaganda bersenjata (prota) dalam bentuk penculikan, perampokan, dan pembunuhan.

“Tampaknya bahwa instruksi tetap DN Aidit mencerminkan bahaya latent PKI yang selalu akan menyusun kekuatan kembali, yang mungkin dalam permulaannya akan berbentuk lain sebagai bentuk penyamaran, dan pada waktunya akan membuka kedoknya serta memperlihatkan wajah yang sebenarnya...” (hlm.402)

³⁴ Sepuluh butir instruksi DN Aidit adalah (1) menjamin berlangsungnya partai, (2) daerah-daerah basis di Jawa tetap dipertahankan, (3) pembubarab partai dan lain-lain sebagai taktik demi terjaminnya perjuangan jangka panjang dan kami anjurkan membuat CDB, CS, dan lain-lain, (4) mulai sekarang hindari perlawanan frontal, kita bergerak dengan program C, sesuai dengan instruksi CC Partai tanggal 25 Septembet, (5) tindakan-tindakan pengamanan, teror, sabotase dijalankan secara sistematis, (6) usahakan agar pemerintah dan rakyat yakin partai kita masih tetap berdiri dan kuat, (7) Khusus di Jakarta, baik DD maupun Sosro/Ceweng, harus tetap dapat rasakan bahwa kita adalah faktor bahaya besar dan tidak begitu saja dapat ditiadakan, (8) tiap-tiap anggota partai adalah patriot, tiap-tiap anggota partai adalah informan, (9) tiap-tiap anggota partai adalah jiwa perang, tiap-tiap anggota partai adalah penghubung, (10) perlu dijamin, hubungan segitiga, Sosro dan Ceweng, yang paling aman adalah melalui perwakilan negara tetangga.

Gerakan operasi penumpasan G 30 S/PKI dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, di daerah-daerah dilakukan dengan gerakan operasi teritorial yang antara lain mengadakan penangkapan terhadap tokoh orpol dan ormas PKI.

Situasi yang menjurus ke arah konflik politik semakin bertambah panas oleh keadaan ekonomi yang memburuk. Pada tanggal 12 Januari 1966 dipelopori oleh KAMI dan KAPPI, Front Pancasila mengajukan tiga tuntutan, yakni (1) pembubaran PKI; (2) pembersihan kabinet dari unsur-unsur G 30 S/PKI; (3) penurunan harga/perbaiki ekonomi.

“Perkembangan selanjutnya mengenai masalah tuntutan pembubaran PKI, dilaksanakan oleh Letnan Jenderal Soeharto tanggal 12 Maret 1966 sehari setelah menerima *Surat Perintah 11 Maret.*” (hlm.404)

Di bidang politik telah terjadi krisis kepemimpinan. Bung Karno melakukan reshuffle kabinet yang mengecewakan rakyat karena kabinet baru tersebut beranggotakan 102 menteri dan banyak berasal dari unsur PKI, sementara Jenderal A.H. Nasution tidak dilibatkan. Oleh karena itu rakyat menjuluki kabinet tersebut sebagai “Kabinet 100 menteri” atau “Kabinet Gestapu”. Krisis politik dan kepemimpinan nasional ini berimbas pada keresahan masyarakat dan demonstrasi terjadi dimana-mana.

“Dalam masa 1966—1967 terdapat dualisme dalam kepemimpinan nasional, yaitu di satu pihak Presiden Sukarno yang masih aktif dan di pihak lain adanya tokoh Jenderal Soeharto yang semakin populer. Ia populer berkat prestasinya menumpas pemberontakan G 30 S/PKI dalam waktu yang singkat...” (hlm.415)

Dalam menghadapi persoalan PKI, Presiden Soekarno dinilai tidak tegas dan tidak adil terhadap PKI yang telah melakukan pemberontakan. Antara

Presiden Soekarno dan Mayjen Soeharto terdapat perbedaan dalam menyelesaikan persoalan G-30-S/PKI dan pergolakan di masyarakat.

Menurut Soeharto, pergolakan rakyat tidak akan reda sebelum rasa keadilan rakyat dipenuhi dan rasa ketakutan rakyat dihilangkan dengan jalan membubarkan PKI yang telah melakukan pemberontakan yang menimbulkan banyak korban. Sebaliknya, Soekarno tidak mungkin membubarkan PKI sehubungan dengan doktrin “Nasakom” yang dia keluarkan dan dicanangkan di seluruh dunia.

Pada tanggal 11 Maret 1966, Jenderal Soeharto memperoleh Surat Perintah Sebelas Maret yang dikenal sebagai Supersemar. Surat sakti ini yang menandai awal zaman Orde Baru. Menindaklanjuti surat itu, langkah pertama Soeharto adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi massanya di seluruh Indonesia terhitung tanggal 12 Maret 1966. Tindakan kedua adalah mengeluarkan Surat Keputusan penahanan 15 orang menteri yang dinilai terlibat dalam pemberontakan G-30-S/PKI atau memperlihatkan itikad tidak baik dalam menyelesaikan masalah itu.³⁵ Akibat tindakan itu Soeharto menjadi populer sehingga timbul kesan dualisme kepemimpinan nasional.

Pada Sidang Umum MPRS tahun 1966, masalah Pemberontakan G-30-S/PKI diminta pertanggungjawabannya kepada Presiden Soekarno. Dalam pidato pertanggungjawabannya yang berjudul “Nawaksara” tidak disinggung mengenai pemberontakan G-30-S/PKI. Akibat lanjut dari hal ini, MPRS mencabut mandat Presiden Soekarno dan beberapa gelar kebesaran serta meninjau kembali ajaran-

³⁵ Para menteri yang ditahan itu adalah: Dr. Subandrio, Dr. Chairul Saleh, Ir. Surachman, Ir. Setiadi Reksoprodo, Oei Tjoe Tah, S.H., Jusuf Muda Dalam, Mayjen Achmadi, Drs. Achadi, Sumardjo, Armunanto, Sutomo Martopradopo, Astrawinata, S.H., J. Tumakaka, Mayjen dr. Sumarmo, dan Letkol Sjafei.

ajaran Panglima Besar Revolusi. Koreksi total terhadap kepemimpinan dan kebijakan masa Presiden Soekarno itu tertuang dalam TAP-TAP MPRS. Selanjutnya kepemimpinan nasional diserahkan kepada Jenderal Soeharto sebagai Mandataris MPRS.

Dalam masa transisi kepemimpinan yang berlangsung antara tanggal 1 Januari dan 26 Maret 1968, pemerintah Orde Baru mencanangkan tiga masalah besar bangsa yang harus segera diatasi.³⁶ Salah satu masalah besar itu adalah tetap waspada dan sekaligus memberantas sisa-sisa kekuatan laten PKI.

2.2 Representasi Narasi Pemerintah Orde Baru tentang G 30 S/PKI

a. Kekerasan Kolektif

Narasi tentang G 30 S/PKI versi Orde Baru menunjukkan bahwa peristiwa Pemberontakan G 30 S/PKI telah menimbulkan berbagai bentuk kekerasan yang mengarah pada kekerasan kolektif, seperti pembakaran, pencidukan, penangkapan dan pembunuhan yang dilakukan secara massal. Kekerasan kolektif tersebut dilakukan oleh militer (ABRI, khususnya Angkatan Darat) terhadap anggota PKI dan simpatisannya. Kekerasan itu dilakukan sebagai bentuk “pembalasan” terhadap pembunuhan yang dilukiskan dilakukan secara kejam terhadap para perwira militer angkatan darat. Dalam sudut pandang Orba, PKI sebelumnya telah melakukan berbagai kekerasan kolektif serupa dan melakukan kegiatan teror bersenjata kepada rakyat dan pemerintah.

³⁶ Dua masalah lainnya adalah: (1) berusaha memperkuat pelaksanaan sistem konstitusional, menegakkan hukum, dan menumbuhkan kehidupan demokrasi yang sehat sebagai syarat untuk mewujudkan stabilitas politik, (2) melaksanakan pembangunan lima tahun yang pertama sebagai usaha untuk memberi isi kepada kemerdekaan.

Kekerasan kolektif ini setidaknya terjadi selama penumpasan pemberontakan G 30 S, pembubaran organisasi PKI dan organisasi di bawahnya, hingga kerusuhan massa yang disebut sebagai “kemarahan massa” mulai 1 Oktober 1965 hingga tahun 1967. Gerakan penumpasan PKI yang sangat gencar dilakukan, tentu saja menimbulkan berbagai bentuk kekerasan, dilaksanakan setelah keluarnya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) tahun 1966, yakni dalam wacana yang berupa pemulihan keamanan dan ketertiban di bawah Panglima Komando Pemulihan keamanan dan Ketertiban Letnan Jenderal Soeharto. Supersemar adalah penanda awal rezim Orde Baru.

b. Pemarginalan

Setelah transisi kepemimpinan dari Orde Lama ke Orde Baru, yakni dari 1 Januari hingga 26 Maret 1968, salah satu wacana besar yang melandasi berbagai kebijakan pemerintah Orde Baru adalah “tetap waspada dan sekaligus memberantas sisa-sisa kekuatan laten PKI.” Implikasi kebijakan Orba ini membawa dampak tersendiri kepada keluarga anggota PKI dan mereka yang diduga terlibat atau dekat dengan PKI atau keluarganya.

Setelah organisasi PKI dibubarkan dan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan PKI dibekukan, pemerintah Orba secara represif juga melakukan pelarangan terhadap semua bentuk ajaran komunisme, leninisme dan marxisme di seluruh Indonesia.

Pembekuan dan pelarangan semua aktivitas PKI juga telah menimbulkan stigma negatif terhadap organisasi dan semua ajaran PKI, termasuk pemberian stigma terhadap mantan anggota PKI dan organisasi bawahannya beserta seluruh

keluarga. Tidak hanya stigmatisasi, deskriminasi juga diberikan kepada kelompok yang dicap sebagai “PKI”. Kedua hal ini, stigmatisasi dan deskriminasi, telah menimbulkan bentuk-bentuk pemarginalan kepada mereka yang dicap PKI dan keluarganya.

Di dalam masyarakat, deskriminasi cenderung diikuti dengan proses eksklusi sosial atau pengucilan orang-orang yang berdampak pada tidak adanya kesempatan memperoleh hak-hak publik, seperti pekerjaan dan pergaulan. Dampak lainnya adalah kekhawatiran yang luas untuk mempelajari ideologi atau ajaran-ajaran komunisme dan marxisme. Dampak yang paling nyata adalah pada mereka yang menjadi mantan tahanan politik karena diduga terlibat G 30 S. Para tahanan politik ini, selain yang berasal dari kalangan militer, ditangkap dan ditahan tanpa proses pengadilan atau pembuktian kesalahan secara hukum. Mereka yang berasal dari kalangan militer dihukum setelah melalui proses pengadilan militer. Setelah bebas dari tahanan, mantan tahanan politik ini masih memperoleh perlakuan deskriminatif dengan pencantuman “ET” (eks tapol) pada kartu tanda penduduk mereka sehingga membatasi ruang gerak mereka di dalam masyarakat karena akan selalu diawasi gerak-geriknya sebagai bentuk “kewaspadaan”.

c. Indoktrinasi dan Pengaburan Sejarah

Dari narasi Orde Baru tentang PKI diketahui bahwa PKI dipahami sebagai “tabu” dalam masyarakat. Pembicaraan tentang PKI di luar narasi resmi dapat dianggap sebagai bentuk lain dari pengajaran dan penyebaran ajaran-ajaran PKI, termasuk di dalamnya membicarakan ideologi atau paham komunisme dan marxisme. PKI

adalah dosa masa lalu bangsa sehingga harus “dikubur” dalam-dalam dan segala ajarannya merupakan bahaya laten yang sewaktu-waktu dapat muncul dan membahayakan.

Narasi Orde Baru yang demikian menyebabkan persoalan sejarah tentang PKI cenderung diabaikan dan kehilangan fakta-fakta sehingga semakin kabur. Narasi yang cenderung merupakan indoktrinasi atas stigma PKI yang negatif menimbulkan pemahaman yang sebaliknya tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Kekerasan kolektif dan pemarginalan sebagian anak bangsa yang dilakukan oleh Pemerintah Orba terhadap pengikut PKI (dan mereka yang dituduh terlibat) diabaikan dan dijadikan sebagai tindakan yang “benar” atas nama keadilan karena telah menghukum PKI.

Pemahaman terhadap narasi Orba yang membenarkan semua tindakan kekerasan dan pemarginalan terhadap mereka yang terlibat (dituduh) PKI dijadikan sebagai bahan ajaran bagi semua anak bangsa khususnya di lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini dapat dipahami sebagai bentuk indoktrinasi ajaran dan menutup kemungkinan penafsiran-penafsiran dan penemuan-penemuan fakta baru yang berlawanan dengan narasi pemerintah.

BAB III

Narasi Metafora “Dunia Kabut” dalam *Kalatidha* : Sebuah Gugatan tentang Keadilan terhadap Narasi Pemerintah Orde Baru mengenai G 30 S PKI

Dalam bab ini akan disajikan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dalam novel yang berkaitan dengan "dunia kabut" dan pemaknaannya secara metaforis, yakni sesuatu yang memberikan makna pencitraan lain dengan menampilkan bentuk seperti kabut, samar-samar dan penuh misteri. Selanjutnya berbagai hal tersebut dihubungkan dengan narasi pemerintah Orde Baru mengenai G 30 S PKI. Sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu mengenai batasan pengertian keadilan secara umum dan dari pandangan tokoh utama. Tokoh utama adalah narator serba tahu yang menuturkan sekaligus menyatakan pendapatnya mengenai kisah-kisah ketidakadilan yang ada di *Kalatidha*.

3.1 Pengertian Keadilan

Inti keadilan adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. John Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Namun menurut berbagai teori juga, keadilan belum lagi tercapai: kita tidak hidup di dunia yang adil. Banyak orang yang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum,

sehingga banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan.³⁷

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Keadilan tersebut diperhitungkan dari segi moral. Moral (dari Bahasa Latin *Moralitas*) adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang mempunyai nilai positif. Manusia tidak memiliki moral disebut amoral artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Tanpa moral manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral pada zaman sekarang mempunyai nilai implisit karena banyak orang yang mempunyai moral atau sikap amoral itu dari sudut pandang yang sempit. Manusia harus mempunyai moral jika ia ingin dihormati oleh sesamanya. Moral adalah nilai keabsolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh.³⁸

Bila ditinjau dari etimologi kata, keadilan merupakan bentukan dari kata adil yang pada hakikatnya berarti tidak memihak³⁹. Menurut Foucault, keadilan dalam pengertian humanisme atau masyarakat adil yang berbasiskan martabat humanistik manusia berpaut secara spesifik dengan kepentingan penguasa (*ruling class*).⁴⁰

Dengan demikian, sekalipun konsep keadilan merupakan suatu kondisi yang nilainya universal yang dilandasi atas dasar moral-kemanusiaan, keadilan

³⁷ Diambil dari Wikipedia Indonesia.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, 2003.

⁴⁰ Suyono, *op.cit.* hlm 309—310.

dalam konteks tertentu akan tergantung pada ruang dan waktu. Konsep tentang keadilan pada suatu waktu dan tempat tertentu dapat berbeda pada waktu dan tempat yang berbeda. Namun bisa juga terjadi pada tempat yang sama tetapi waktu yang berbeda, oleh karena sesuatu hal misalnya perubahan ideologi atau rezim penguasa, konsep keadilan menjadi berubah.

Dalam *Kalatihda* tokoh utama aku merupakan narator yang serba tahu sehingga setiap kisah adalah berdasarkan pilihannya. Kisah-kisah yang disampaikan oleh tokoh utama tersebut menghadirkan pandangan tentang keadilan yang secara tidak langsung menjadi penyampai pesan kelompok yang diwakilinya, yaitu korban-korban ketidakadilan. Berikut ini akan diuraikan beberapa pandangan tokoh utama tersebut.

a. Mendefinisikan sikap adil-tidak adil

Dalam kisah 'kesaksiannya', tokoh utama menceritakan rangkaian kisah pencidukan yang anarkis yang disaksikan, didengar, dan dibaca oleh tokoh utama ketika kecil. Pada waktu gelombang pencidukan itu, bentuk-bentuk pencidukan disertai adanya penyiksaan, pembunuhan dan pembakaran. Pencidukan dengan berbagai bentuk dan akibat tersebut mengarah ke satu tuduhan, sebagai orang PKI atau organisasi terkait yang disangka sebagai dalang G 30 S.

Demi menyaksikan dan mendengar kisah-kisah pencidukan tersebut, hati nurani tokoh utama seolah mengatakan bahwa semua itu tidak benar. Bahkan secara eksplisit tokoh utama mempunyai pendapat tentang perilaku yang tidak patut dibenarkan tersebut karena tidak adil bagi sesama manusia.

“Hari ini kami melihat dan mendengar segala sesuatu yang tidak pernah dibenarkan. Kami melihat betapa seseorang bisa dikutuk dan dihakimi begitu rupa.” (hlm.20)

Tokoh utama sampai pada suatu penentuan sikap mengenai perilaku anarkis tersebut.

“Aku tidak mau menjadi orang yang teraniaya itu, tetapi aku juga tidak mau menjadi salah satu di antara mereka yang menganiaya.” (hlm. 20)

Suara hati tokoh utama mencerminkan sikap kemanusiaan yang adil dan beradab serta penghargaan terhadap kebebasan individu yang hidup dalam alam kedamaian. Ia tidak menyukai adanya tindak kekerasan dan penghilangan nyawa secara semena-mena kepada orang lain karena itu bukan sikap manusia yang baik dan tidak dibenarkan. Secara implisit tokoh utama juga menginginkan adanya kondisi yang *balance*, tidak adil baginya bila ada orang yang berada pada posisi superior lalu bertindak semena-mena atau pada posisi inferior untuk ditindas.

Di samping secara tegas tokoh utama menentukan pandangan mengenai hal yang adil dan tidak dalam pencidukan, ia memandang faktor penyebab kisah pencidukan dan prediksi akibatnya merupakan hal yang membahayakan bagi korbannya.

“Setiap kali teringat kisah itu, aku juga teringat kisah lain yang tidak kalah gawatnya—dan baru sekarang aku mengerti betapa gawatnya keadaan seperti itu.” (hlm. 21)

“Kamu jangan menggambar palu arit lagi,” katanya lagi, “nanti bapakmu ditangkap dan dibawa ke hutan jati itu.” (hlm. 44)

Pencidukan merupakan suatu kisah yang gawat, artinya suatu keadaan yang jauh dari nyaman, aman, atau tenang. Ucapan teman tokoh utama tersebut

selain menyatakan empati, juga memperingatkan bahayanya akibat melakukan kesalahan yang tampaknya sepele, yaitu menggambar palu arit. Akibat yang akan ditimbulkan setelah dicituk atau ditangkap pun dapat dibayangkan. Di bawa ke hutan jati berarti dibunuh. Itulah yang membuat tokoh utama berkesimpulan bahwa pencidukan itu gawat. Karena menimbulkan ketidaknyamanan itulah pencidukan dianggap oleh tokoh utama sebagai hal yang tidak adil bagi korban atau calon korban yaitu orang yang dituduh mempunyai kaitan dengan PKI.

Dalam menanggapi kekejaman pencidukan yang disertai pembantaian serta penyiksaan dalam tahanan, serta akumulasi dari kisah-kisah kekejaman yang dilihatnya ketika kecil, tokoh utama mengibaratkan pelakunya sebagai sang rajapati, yaitu makhluk purba haus darah yang menikmati pencabutan nyawa dalam penyiksaan. Dalam bayangannya, pulau Jawa berubah menjadi kubangan penuh darah dan suatu ketika dalam sejarahnya tiada lebih dan tiada kurang menjadi ladang pembantaian terkejam dalam sejarah peradaban.⁴¹ Mengenai keadilan terhadap pembantaian itu tokoh utama berpandangan demikian:

“Penjagal yang kelak kuharap mendapat balasan, tersiksa oleh ketakutan dan mimpi-mimpi mengerikan sepanjang zaman, karena jika tidak apakah memang ada yang disebut keadilan?” (hlm. 68)

Dengan demikian, bagi tokoh utama keadilan untuk perilaku pembantaian adalah adanya pembalasan. Anarki *versus* anarki. Untuk itu ia pun secara tidak langsung menyetujui dengan membiarkan berlangsungnya pembalasan dendam yang dilakukan oleh jiwa gadis kembar yang meraga sukma ke dalam tubuh kembarannya yang meninggal karena disiksa.

⁴¹ *Kalatidha*, hlm. 66.

Roh gadis pujaannya yang lepas dari ancaman sang mata di samudera cahaya, secara ajaib telah masuk ke dalam raga yang mati dan menjelma menjadi wanita perkasa. Pada saatnya, tokoh utama juga menyaksikan jiwa yang meraga sukma itu dengan menggunakan tangan lembutnya melakukan balas dendam terhadap orang-orang yang telah memperkosa saudara kembarnya dan orang-orang yang telah membakar rumah dan keluarganya. Bagi tokoh utama, mereka yang telah mendapat balasan dari gadis itu memang pantas mendapatkan balasan. Dalam pandangan tokoh utama, mereka yang senang melihat nasib manusia lain yang buruk karena dipermalukan, direndahkan, dihina, disiksa, dan dianiaya—setidaknya mereka tidak berbuat apa-apa menyaksikan penindasan manusia yang satu kepada manusia yang lain di depan hidung mereka—adalah manusia-manusia yang jika dilahirkan kembali akan jadi kecoa, kelabang, atau tikus-tikus got.⁴²

Pandangan tokoh utama yang menyatakan akibat perbuatan pencidukan itu sesuatu yang tidak adil bagi korbannya juga ditujukan kepada nasib salah satu gadis kembar yang rumah beserta keluarganya telah mati dibakar massa di depan matanya.

Apakah yang bisa diduga dari sebuah pandangan mata yang sayu, wajah sendu, dengan mulut mengucapkan kata-kata tertentu? ...Bisakah dibayangkan bagaimana seorang anak yang bahagia tiba-tiba kehilangan segala-galanya? (hlm. 47)

Pertanyaan-pertanyaan retorik ini merupakan sebuah ekspresi tokoh utama ketika menyaksikan nasib gadis yang disebut sebagai gila itu sering berdiri berlama-lama di depan rumahnya dengan pandangan sayu. Rumah yang penuh kenangan indah dan bahagia dengan keluarganya sekaligus kenangan buruk akibat

⁴² *Kalatidha*, hlm. 129—130.

pembakaran, penganiayaan, dan pembunuhan yang ia saksikan sendiri ketika kecil. Penggambaran antara ekspresi si gadis dan nasib keluarga si gadis dalam pertanyaan retorik tokoh utama tersebut secara tidak langsung menyuarakan sikap tokoh utama yang empati terhadap kondisi yang tidak adil bagi si gadis. Kondisi atau nasib yang kontradiktif antara “bahagia” dan “kehilangan” mempertajam retorika keberpihakan tokoh utama terhadap nasib malang si gadis, yaitu kebahagiaan yang lenyap karena adanya kehilangan-kehilangan yang dimilikinya. Kutipan berikut juga menunjukkan empati terhadap nasib gadis itu dan keluarga lain yang mempunyai anggota keluarga dituduh PKI.

“...keluarga yang rumahnya dikepung orang banyak sembari berteriak “Ganyang!” bukanlah jenis keluarga yang mudah diakui sebagai sanak keluarga tanpa risiko diperlakukan sama” (hlm. 46)

Gejala stigmatisasi demikian tidak luput dari pengamatan tokoh utama yang secara implisit menyatakan bahwa tidaklah adil bagi keluarga lain itu karena memperlakukan keluarganya dengan kecurigaan yang tidak terbukti benar. Keluarga lain yang tidak mau mengakui tersebut mungkin saja karena takut tersangkut. Namun diluar kesalahan yang mungkin saja tidak dilakukan, keluarga adalah orang terdekat yang semestinya bisa memberi pengayoman dan pembelaan manakala kerabatnya tertimpa musibah.

Dari kisah yang dialami, dilihat, dibaca, dan didengar mengenai keluarga orang yang dituduh terlibat G 30 S, tokoh utama mempunyai empati yang mendalam. Ia merasa kehidupan mereka yang terlanjur terstigma buruk oleh masyarakat akan terus menyandang stigma tersebut dan mengalami nasib yang kurang beruntung selama hidupnya.

“...terlanjur terbutakan oleh perbincangan yang sejak lama tertanam dalam kepalanya tentang golongan yang disebut PKI itu...
“(hlm. 159)

“...apakah yang akan dialami seseorang yang seolah-olah akan hidup terus dengan gambar palu arit di jidatnya?” (hlm. 157)

“Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan mereka yang harus mengalami pengasingan masyarakat sebagai anak PKI. Pengasingan yang sungguh-sungguh tidak adil dan tidak bisa dipertanggungjawabkan” (hlm. 212)

Stigma tersebut seolah menjadi seperti dosa asal yang dibawanya sejak mereka lahir. Seolah tidak ada lagi jalan untuk merehabilitasi nama baik yang tidak seharusnya mereka terima. Suatu bentuk ketidakadilan yang berkepanjangan. Diskriminasi tersebut bagi tokoh utama tentu saja tidak beralasan. Ia tahu bahwa mereka yang dicituk bukan semuanya PKI, Gerwani, atau yang lain. Ia juga tahu bahwa orang yang dituduh PKI kemudian dicituk itu tidak melakukan pembunuhan para jenderal seperti yang dijadikan dalih penguasa otoritas yang dibacanya di koran. Menjadi lebih tidak adil lagi bila keluarga yang bersangkutan pun menerima akibat tuduhan kebersalahan yang tidak pada tempatnya.

b. Sikap skeptis

Terhadap tulisan di kliping koran yang berisi pernyataan para perwira tentang pelaku G 30 S dan makna Lubang Buaya, tokoh utama menanggapi justru dengan pernyataan ironis dan sikap skeptis. Tulisan-tulisan tersebut dan tanggapan tokoh utama adalah sebagai berikut.

“...bahwa hal itu adalah suatu pertanda bahwa dengan adanya kisah ‘Gestapu/PKI’ akan terbuka djalan terang, dimana dapat diketahui siapa kawan dan siapa pula lawan” (hlm. 41)

Tidak tertutup kemungkinan bahwa berita tersebut mengandung maksud terselubung atau propaganda penguasa otoritas terhadap peristiwa yang disebut Gestapu/PKI. Tanggapan tokoh utama terhadap berita tersebut dapat mengimplisitkan hal tersebut. Dengan pikiran kecendekiaan seorang anak, ia mampu menganalisis berita yang tidak menunjukkan akurasi data dan fakta itu. Tanggapan tokoh utama tersebut adalah sebagai berikut.

“...apakah orang-orang yang dicituk selama ini termasuk manusia-manusia biadab yang membunuh para jenderal itu—jika tidak, mengapa mereka harus dicituk dan tidak pernah kembali lagi? Kalau aku sebagai anak kecil mampu membedakan wirog satu dari wirog-wirog yang lain, mengapa orang-orang yang memberi perintah untuk melakukan pencidukan sambil membawa golok, pentungan dan celurit itu tidak?” (hlm. 42)

Tanggapan tokoh utama juga mengimplisitkan mengenai praduga tak bersalah dan tuduhan atas kesalahan kolektif. Baginya, menangkap penjahat harus tahu kesalahan yang bersangkutan sehingga tidak akan salah tangkap. Intuisinya dalam menangkap wirog yang memangsa ikan piaraannya dianggapnya lebih akurat dibanding orang-orang yang memberi perintah pencidukan. Ia tahu orang-orang yang dicituk dan yang mencituk adalah orang-orang yang ada di lingkungannya yang tidak mungkin memainkan peran seperti yang dianggapan massa: membunuh para jenderal dan melakukan pencidukan dengan tidak manusiawi. Hasil proyeksi penangkapan wirog musuhnya terhadap pencidukan menimbulkan sikap skeptis tokoh utama bahwa ada misteri konspirasi di balik pencidukan-pencidukan itu. Kutipan berita dalam kliping berikut mempunyai keterkaitan dengan misteri pencidukan, namun sebagai ironi.

“Sebagai reaksi dari ‘kecawatiran’ sementara pemimpin terhadap oknum pejabat yang tersangka dalam G-30-S, oleh

Djenderal Sutjipto SH dikatakan, bahwa ABRI tidak akan membuat 'Lubang Buaja ke-II' sebab ABRI berpegang pada ajaran2 Pantjasila." (hlm. 43).

Suara yang ada dalam berita tersebut jelas mewakili suara penguasa otoritas yang militer (ABRI), dengan membuat pernyataan tidak sesuai fakta bahkan membawa Pancasila sebagai tameng. Tokoh utama tahu kondisi yang terjadi di masyarakat, bahwa telah terjadi pembantaian massa bahkan didukung oleh aparat negara terhadap rakyat biasa, bukan pejabat seperti yang dimaksud suara itu. Sebagai anak sekolah, ia tahu juga bahwa tindakan pencidukan yang dihadapannya adalah bertentangan dengan sila dalam Pancasila, peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk berita tersebut tokoh utama menanggapi dengan sebuah pertanyaan pula. Kutipan berikut disertai konteksnya untuk memperjelas ironi dari pernyataan perwira dan pertanyaan tokoh utama.

"Jadi, siapa yang membiarkan segala pencidukan itu berlangsung? Dari teman-teman sepermainanku kudengar cerita tentang hutan jati di luar kota tempat orang-orang yang dicituk itu ditembak mati dan dikuburkan". (hlm. 43)

Dua tanggapan tokoh utama terhadap pencidukan yang berupa pertanyaan retorik itu menjadi sebuah ironi terhadap pernyataan-pernyataan para perwira yang ada di guntingan koran. Selain itu, ungkapan tokoh utama bersifat skeptis terhadap tegaknya keadilan. Sikap skeptis tokoh utama muncul karena yang disampaikan oleh para perwira tersebut sangat bertolak belakang dengan yang terjadi di lingkungannya yang secara langsung maupun tidak dialami pula oleh tokoh utama.

Tanggapan-tanggapan tersebut meskipun diungkapkan oleh seorang anak kecil, namun dengan logikanya ia bisa membandingkan, menganalisis, dan berimpresi sehingga munculah sikap skeptis terhadap kondisi yang dihadapinya.

Sikap skeptis tersebut lebih diperkuat dengan nasib kakak perempuan tokoh utama yang menjadi salah satu korban pencidukan yang hingga berpuluh-puluh tahun tidak ketahuan rimbanya. Tokoh utama yakin kakaknya bukan anggota Gerwani seperti yang dituduhkan. Ia juga yakin bahwa kakanya hanya berteman dan sering berdiskusi dengan berbagai organisasi. Namun bukan berarti ia terlibat kisah G 30 S atau menyetujui apalagi merencanakan penculikan dan pembunuhan. Hal semacam itu – yaitu dituduh terlibat seperti kakaknya atau sebagai anggota PKI/organisasi yang dianggap dalang G 30 S— kemudian dicituk, ditahan, dianiaya, dibakar, dibunuh, atau hilang lenyap tiada berita merupakan hal yang lazim terjadi pada masa gelombang pencidukan. Tidak perlu kesalahan untuk itu. Di situlah letak ketidakadilan yang terjadi pada kisah-kisah pencidukan dan rangkaian kekejaman yang menyertainya, yang oleh tokoh utama disimpulkan: seperti tidak ada satu pun keluarga yang tidak kehilangan anggota keluarganya. Bagi tokoh utama, bangsa ini telah membantai dirinya sendiri.⁴³ Beberapa pernyataan skeptis dalam benak tokoh utama terkristal ketika dewasa.

“Berapa lama kami semua menjadi buta dalam memandang orang-orang yang dicituk? Berapa lama kami semua, anak-anak kecil yang tidak dididik di sekolah dengan semestinya mengira betapa orang-orang yang dicituk memang pantas dicituk?” (hlm. 159)

“Kebersalahan tentu merupakan tanggung jawab pelakunya. Namun bagaimana jika yang bukan pelaku tertimpa akibat kebersalahannya? Bagaimana pula kalau ia ternyata tidak bersalah?” (hlm. 196)

Tokoh utama yang sudah melihat, merasakan, dan membaca banyak ketidakadilan berusaha berpikir dengan jernih dengan mendudukan kesalahan

⁴³ *Kalatidha*, hlm. 114.

pada tempatnya. Namun fakta yang ia tahu adalah sebaliknya, sehingga muncul kekhawatiran yang diungkapkan dengan sikap skeptis.

c. Kebohongan sejarah

Tokoh utama yang pada awalnya tidak tertarik membaca koran, akhirnya menjadi tertarik karena pada awalnya ingin mengetahui perihal PKI, “istilah” yang selalu disebut orang dan menjadi biang keladi malapetaka bagi orang-orang di sekelilingnya. Ia memilih klipng kakaknya sebagai bahan bacaan, dan itu terus dilakukannya hingga ia dewasa dan menjadi narapidana kasus pembobolan bank.

Berita yang dikliping kakak perempuan tokoh utama sebagian besar tentang berita politik. Kakaknya pernah berpesan: “Jangan pernah melupakan sejarah,” katanya suatu hari, “supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama...”⁴⁴ Dari membaca klipng koran itu tokoh utama mengharapkan dapat mengungkapkan sisi kehidupan.⁴⁵ Baginya, meskipun kisahny telah berlalu, namun apa yang dicatat dalam koran itu merupakan sejarah yang sengaja dicatat untuk diingat, meskipun setiap pencatat mempunyai kepentingannya sendiri.⁴⁶

Dari sekian banyak berita yang ia baca, banyak yang menurutnya bahasanya buruk, isi berita yang memprovokasi rakyat untuk berperang, dan banyak berita yang di balik kalimat-kalimatnya masih ada sesuatu yang disembunyikan atau ada kepentingan tertentu hingga muncul pertanyaan tokoh utama:

“Apakah koran-koran, dulu maupun sekarang, memiliki dirinya sendiri? Apakah atas nama keberadaannya sebagai media boleh

⁴⁴ *Kalatidha*, hlm. 119

⁴⁵ *Kalatidha*, hlm. 155

⁴⁶ *Kalatidha*, hlm. 151

menjadi milik siapa pun yang memanfaatkannya?” (hlm. 216—217).

Baginya ini merupakan suatu ketidakadilan bagi generasi mendatang yang seharusnya mendapatkan catatan sejarah yang menampilkan realitas kisah atau sejarah. Menyelewengkan realitas sejarah bagi tokoh utama merupakan kejahatan bagi pendidikan.

“Berapa lama kami semua mendapatkan pelajaran sejarah yang ternyata kini hanya bisa dibaca sebagai pelajaran cara berbohong?” (hlm. 159)

Ungkapan skeptis tersebut sekaligus menjadi keprihatinan tokoh utama terhadap sejarah yang tidak mencerminkan realitas. Berita di koran yang sudah ditulis dengan sengaja dan terpublikasi secara tersistem merupakan salah satu sumber sejarah yang fakta penulisannya tidak bisa diubah lagi. Sehingga menjadi tanggung jawab penyebar berita (sejarah) bila terbukti isinya merupakan kebohongan pada publik dan pada gilirannya menjadi kejahatan edukasi yang berkepanjangan. Ini mencerminkan ketidakadilan bagi sumber-sumber sejarah dan orang-orang yang mempercayai atau memanfaatkan berita sebagai pengungkapan fakta, terutama terhadap generasi mendatang.

3.2 “Dunia Kabut” dalam *Kalatidha*

Kabut adalah suatu keadaan yang kelam, suram, dan tidak nyata.⁴⁷ Kabut biasanya dijadikan sebagai metafora⁴⁸ bagi sesuatu yang menyaran makna

⁴⁷ Di samping makna leksikal tersebut, kata kabut juga menunjuk pada kata nomina awan lembab yang melayang di dekat permukaan tanah (*Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, 2003).

⁴⁸ Metafora yaitu majas identitas yang membandingkan objek atau pengertian dan menyamakannya dengan cara implisit atau bagian yang dibandingkan (harfiahnya) seringkali

kedukaan, kesedihan, atau misteri. Dengan ciri warnanya yang abu-abu atau kelabu atau putih pekat, kabut mampu menjadi penghalang pandangan mata terhadap peristiwa atau sesuatu yang ada di balik kabut tersebut. Dengan demikian, “dunia kabut” dapat dimaknai sebagai sesuatu hal, peristiwa (kisah), atau keadaan tentang kehidupan yang penuh misteri.

Di dalam *Kalatidha* dikisahkan tentang dunia berkabut di balik hutan bambu yang merupakan dunia lain “ciptaan” tokoh utama (tokoh aku narator),⁴⁹ yakni dunia yang penuh misteri dan hanya dapat ditembus dengan penjelajahan sukma tokoh utama. Melalui dunia berkabut di balik bambu tersebut tokoh utama seolah selalu dapat menemukan misteri dan jawaban atas persoalan yang memenuhi hati dan kepalanya.

“Kabut adalah duniaku—dalam kabut itulah aku mengembara dan menjelajahi seribusatu kemungkinanku” (hlm. 2)

“Aku adalah bagian dari kabut dan hutan bambu itu karena tanpa keduanya tidak ada diriku” (hlm. 3)

“Aku bisa pergi ke mana pun selama aku menenggelamkan diri dalam kabut dan menguak dunia. Itulah sebabnya aku selalu membutuhkan kabut agar aku bisa tenggelam dalam kabut dan muncul kembali di dunia baru yang memenuhi impianku selama aku memang menghendakinya” (hlm. 175—176)

Kutipan tersebut mengesankan bahwa untuk dapat menjalani suatu kehidupan yang seutuhnya, tokoh utama sangat tergantung pada kabut. Artinya, mungkin ia akan merasa “mati” bila kabut dan hutan bambu tersebut tiba-tiba

tidak tereksplisit sehingga makna yang diacu harus ditentukan sendiri dari konteks (Luxemburg, Mieke Bal, dan Willem G. Weststeijn, *op.cit.* hlm. 65).

⁴⁹ *Kalatidha* disajikan dalam 25 bab dengan focalisasi orang pertama. Ada dua tokoh aku yang berbeda, yaitu tokoh aku narator tanpa nama yang berkisah dalam 22 bab serta tokoh aku narator yang bernama Joni Gila dalam tiga bab yang terpisah. Tokoh aku narator tanpa nama adalah tokoh utama dalam *Kalatidha*, sedangkan tokoh aku satunya menjadi narator dalam tiga buah Catatan Joni Gila yang dalam penelitian ini dianggap sebagai kolase sejajar dengan kolase klipng koran karena perbedaan teknik penyajian dibanding narasi yang lain. Dengan demikian, tokoh aku dalam Bab ini dan seterusnya merujuk pada tokoh aku narator /tokoh utama.

lenyap. Paralel dengan dunia berkabut di balik hutan bambu, tokoh utama juga menjalani kehidupannya di dalam “dunia nyata” yang berdarah dan berdaging (fana) yang penuh dengan persoalan. Melalui ilustrasi-ilustrasi kesaksiannya terhadap ketidakadilan kekerasan kolektif dan pemarginalan, serta kolase berupa guntingan koran yang penghadirannya sebagai ironi atas kekaburan sejarah, kisah dalam “dunia nyata” tersebut juga memberi kesan seperti “dunia kabut” yaitu sebagai metafora “dunia nyata”.

“...Dua dunia bagiku satu saja laiknya, karena keduanya menjadi satu kehidupan, dan itu adalah kehidupanku. Kapan sudah kubilang hidupku timbul tenggelam dalam kabut dan aku sangat membutuhkannya—entah apa jadinya jika tiada kabut itu untukku...”
(hlm. 31)

Tidak dibedakannya dua dunia oleh tokoh utama memberi kesan bahwa kisah-kisah di dalam *Kalatidha* mempunyai posisi yang sama. Artinya, setiap kisah yang muncul dari dunia di balik kabut hutan bambu mempunyai kaitan (sebab-akibat) dengan kisah yang ada di dunia yang disebutnya nyata. Akan tetapi, di satu sisi ungkapan tokoh utama berikut ini meyakinkan pembaca akan sikap tokoh utama dalam menghadapi “dunia nyata” dan “tak-nyata” di hadapannya.

“...aku berstatus narapidana dan hidup dalam penjara, tetapi dalam kenyataannya aku hidup dan bisa pergi ke mana-mana dalam berbagai dunia bukan? Cerita ini akan disebut sebagai cerita dari dunia nyata, tetapi bagaimanakah caranya kita membedakan yang nyata dan tidak-nyata, jika bagiku tiada bedanya antara yang nyata dan yang selama ini disebut tidak-nyata tersebut karena aku mengalami yang disebut tidak nyata sebagai sesuatu yang sangat nyata. Bahkan bagiku yang nyata terlalu sering kuhayati hanya sebagai impian atau pemandangan di permukaan, suatu kilasan selintas yang justru tidak pernah menjadi nyata, sementara diriku berpikir dan bertindak dalam dunia yang sama sekali berbeda.” (hlm. 70)

Sikap apatis tokoh utama terhadap “kenyataan” tersebut dapat dipandang sebagai petunjuk dalam menanggapi kisah-kisah yang disampaikan oleh tokoh utama di sepanjang cerita, bahwa sesuatu yang dikisahkan oleh tokoh utama sebagai sesuatu yang nyata, perlu dicurigai bahwa hal tersebut ditampilkan sebagai suatu metafora atau ironi yang merujuk pada suatu hal. Di samping itu, berkaitan dengan fokalisasi dalam *Kalatidha* yang memakai orang pertama (aku), tokoh utama sebagai narator mempunyai kekuasaan untuk memilih kisah dan menghadirkan kolase-kolase yang “dimauinya”.

Kalatidha menyajikan dunia berkabut di balik hutan bambu sebagai realitas dalam fiksi yang dialami tokoh utama. Namun, kehadiran kabut yang mempunyai dunia tersendiri bagi realitas cerita tokoh utama tersebut dapat ditafsirkan sebagai sebuah penanda dari keseluruhan kisah yang ada dalam *Kalatidha*. Selanjutnya, keseluruhan kisah yang dipandang penuh misteri (menimbulkan banyak pertanyaan) di dalam *Kalatidha* dimetaforkan sebagai “dunia kabut”.

“Dunia kabut” di dalam *Kalatidha* merupakan metafor ketidakadilan dan ketidakpastian. *Kalatidha* menghadirkan elemen-elemen yang berfungsi untuk menggugat “dunia kabut” itu. Berikut ini akan diuraikan elemen-elemen dalam *Kalatidha* dan fungsinya yang menjadi alat untuk menggugat ketidakadilan yang dimetaforkan dengan “dunia kabut”. Elemen tersebut dikelompokkan menjadi dua berdasarkan peristiwa dan simbol, yaitu kisah kekerasan kolektif dan pemarginalan serta simbol-simbol tokoh dan tempat. Selanjutnya elemen-elemen tersebut direlasikan dengan cara menganalogikan dengan wacana atau narasi Orde

Baru yang berkaitan dengan peristiwa G 30 S dan PKI. Tujuannya untuk melihat bagaimana *Kalatidha* mempersoalkan keadilan dalam narasi Orde Baru.

3.2.1 Kisah Kekerasan Kolektif dan Pemarginalan dalam *Kalatidha*

Dalam pemaknaan yang metaforis, berbagai persoalan dalam *Kalatidha* yang merujuk pada sesuatu yang samar atau tidak jelas dapat dirasakan sebagai sebuah realitas yang diselimuti oleh kabut. Dari penjara, sebelum akhirnya dunia khayalannya lenyap, tokoh utama yang narapidana kasus pembobolan bank dengan modus usaha fiktif, menceritakan pelbagai kisah yang berkaitan dengan tragedi kemanusiaan yang sempat dilihat, dialami, dibaca, dan didengarnya. Tragedi kemanusiaan yang diketahuinya tersebut berupa kekerasan kolektif dan pemarginalan yang seringkali ironis.

Tokoh utama melihat berbagai ironi yang dipahaminya dari narasi-narasi pada kolase-kolase klipung koran yang dibacanya. Ironi itu sangat berkaitan dengan ketidakadilan dan kekaburan makna akibat kekuasaan sehingga tokoh utama harus mencari-cari makna yang dibacanya. Misalnya dalam pencariannya terhadap makna PKI, tokoh narator membaca bahwa pada mulanya (pangkal permasalahan) adalah terjadinya kisah politik di negaranya yang dikenal dengan G 30 S (Gestapu) tahun 1965 yaitu penculikan dan pembunuhan 7 orang perwira yang kemudian disebut sebagai Pahlawan Revolusi.⁵⁰ Kemudian tokoh utama juga membaca:

“Sidang paripurna MPRS kemaren dengan aklamasi telah menerima perumusan keketapan MPRS yang dihasilkan oleh Komisi C tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia yang

⁵⁰ Kisah tersebut dicantumkan di dalam guntingan koran *Angkatan Bersendjata* tanggal 26 April. Lihat dalam *Kalatidha* hlm. 40.

dinyatakan sebagai partai terlarang di seluruh Indonesia serta pelarangan setiap ajaran komunisme/marxisme-leninisme di seluruh wilayah Indonesia” (hlm. 115).

Di bagian lain dia membaca bahwa PKI telah melakukan yang disebut sebagai kontra revolusi, yakni mengkhianati cita-cita revolusi Presiden Sukarno yang ditulis dalam guntingan koran *Berita Yudha* yang dibacanya.

“...Bung Karno sebagai Bapak Marhaen menjerukan agar supaya setiap dari kita berlombalah, ...dalam kompetisi mengamalkan lima azimat Revolusi, mengamalkan Pantjasila, Manipol/Usdek, Nasakom, Tri Sakti Tavip dan Berdikari.” (hlm. 153)

PKI dianggap sebagai pengkhianat azimat revolusi tersebut dan tentu saja minus Nasakom karena “kom” yang kepanjangan dari komunis merupakan ideologi mereka. Di dalam kliping koran yang dibaca tokoh utama kisah itu disebut dengan istilah kudeta, teror, dan pengkhianatan berdarah PKI.⁵¹ Akibatnya, diberlakukan pembekuan semua aktivitas organisasi-organisasi tersebut oleh penguasa otoritas. Dia pun membaca di dalam kliping koran .

“...sehubungan dengan keputusan Penguasa Perang Daerah...tentang pembekuan semua aktivitas ormas/orpol dalang “GESTAPU” jaitu PKI, PR, BTI, GERWANI,...” (hlm. 214—215)

Keputusan tersebut mendapat sambutan dari berbagai pihak dan di antaranya menyerukan pengganyangan terhadap pelaku Gestapu. Wacana “pengganyangan” terhadap PKI kemudian meluas diantaranya melalui saluran media massa. Dalam kesaksiannya, tokoh utama melihat bahwa massa dengan

⁵¹ Lihat hlm. 210 dalam *Kalatidha* yang memuat guntingan koran *Kompas*, 25 Sept. Berdasarkan pengolahan data teks, kliping koran yang dimuat setelah 30 September 1965 berisi tentang berita yang anti terhadap G 30 S, PKI dan anasirnya, serta suara-suara yang bernada propaganda terhadap pemerintah penguasa otoritas. Pelarangan ajaran komunisme di Indonesia (hlm. 115) juga mengindikasikan bahwa setiap berita yang pro atau berhaluan kiri (mengakui nasionalis, agama, dan komunis) tidak akan dimuat atau beredar pasca kisah G 30 S atau justru dilarang. Lihat juga hlm. 216-217 tentang tanggapan tokoh aku yang menduga koran sebagai media yang dimanfaatkan untuk kepentingan orang atau kelompok (menurut pengamatannya, ini terjadi pada masa lalu maupun sekarang).

beramai-ramai ikut berpartisipasi melakukan tindakan kekerasan dengan dalih penangkapan terhadap antek-antek PKI atau anasirnya. Dari klipng koran dia juga membaca bahwa kenyataan tersebut oleh pemerintah otoritas dianggap sebagai “sebuah kesadaran politik rakyat”.

“...sekalipun dalam tubuh bangsa Indonesia masih terasa adanya luka2 sebagai akibat petualangan kontrev Gestapu/PKI, bangsa Indonesia tidak hantjur dan perdjongan kita tidak mundur melainkan mendjadi bertambah meningkat, terutama terasa pada saat2 terachir ini dimana kesadaran politik rakjat telah menjapai keristalisanja...” (hlm. 37)

Dari sekian banyak klipng yang sudah dibaca, tokoh utama merasa adanya keironisan dengan kesaksian yang dialaminya bahwa telah terjadi gelombang pencidukan dan penculikan, penangkapan tanpa dakwaan, pembakaran rumah dan penghuninya, pembunuhan, penganiayaan, interogasi dengan penyiksaan, penahanan terhadap orang-orang yang dituduh terlibat. Para korban (yang diceritakan oleh tokoh utama) adalah mereka yang mengaku bukan pelaku G 30 S atau bukan anggota PKI dan anasirnya, bahkan orang-orang yang sekedar mengenal anggota atau tahu tentang organisasi tersebut. Ini dapat diketahui dari penyangkalan mereka atas tuduhan keterlibatan dengan G 30 S atau PKI dan anasirnya. Pencidukan dari rumah ke rumah, pembunuhan massal, dan penahanan berlangsung dengan cepat tanpa diduga dilakukan oleh rakyat yang dimobilisasi dan didukung penguasa otoritas. Pencidukan yang disertai penganiayaan fisik dan mental, pembunuhan, serta pembakaran yang bersifat terbuka tersebut, di samping alat negara yang ikut bertindak, secara massal dilakukan oleh warga sipil biasa yang hanya bisa mendapatkan kesenangan dalam penderitaan orang lain.

Tokoh utama juga menggambarkan bahwa sebagai akibat dari tindakan kekerasan yang direstui oleh penguasa otoritas, keluarga korban atau orang-orang

yang “dituduh” mengalami dampak yang buruk. Para korban dan keluarga mengalami penderitaan fisik, jiwa, dan material hingga berkelanjutan atau dewasa dan akhir hayatnya. Pada akhirnya sampai pada suatu kesimpulan bahwa di dunia nyata tokoh utama juga terdapat kehidupan yang samar-samar dan dibayangi oleh masa lalu, sebuah “dunia kabut” yang pangkal mulanya adalah kekuasaan yang menghasilkan kekerasan.

Seperti telah disampaikan dalam pengantar bahwa kisah-kisah dalam *Kalatidha* diasumsikan sebagai sebuah narasi yang menggugat narasi pemerintah Orde Baru tentang G 30 S/PKI. Berikut ini akan diuraikan kisah-kisah kekerasan kolektif dan pemarginalan beserta fungsinya dalam *Kalatidha* serta perbandingannya dengan narasi pemerintah Orde Baru tentang G 30 S/PKI sehubungan dengan tema keadilan.

Kekerasan kolektif yang akan diuraikan dalam bab ini pada dasarnya dalam rangkaian kisah pencidukan. Namun karena ada spesifikasi dari bentuk kekerasan lain, misalnya pembakaran, pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya, uraiannya akan dipisahkan. Sedangkan proses eksklusi sosial (marginalisasi) adalah kepada mereka yang terstigma PKI. Marginalisasi dalam konteks ini pada intinya karena adanya diskriminasi yang penandanya adalah stigmatisasi dan tidak diberinya kesempatan yang sama.⁵² Diskriminasi atau pembedaan tersebut diberlakukan terhadap korban kekerasan kolektif yang lolos dari maut dan

⁵² Dalam realitas kehidupan sosial, kelompok yang termarginalisasikan tersebut adalah mereka yang tidak terbunuh dan selamat dari pengasingan namun kemudian dilarang untuk kembali ke profesi awal mereka dan hidup di bawah awan diskriminasi peraturan pemerintah dengan penanda “ET” (eks tapol) (lihat dalam Sasongko, Haryo dan Melani Budianta (ed.), *op. cit.* hlm. xii). Seperti telah disampaikan dalam catatan kaki no.7 tesis ini, peraturan pemerintah yang berkaitan dengan hal tersebut bertahan hingga 14 tahun (1981—1995) dalam masa pemerintahan rezim Orde Baru. Stigmatisasi demikian secara *de jure* terjadi selama 14 tahun. Akan tetapi, secara *de facto* hal tersebut telah berlaku sejak 1965 hingga tahun yang tidak dapat ditentukan, sebab secara langsung maupun tidak generasi mereka akan menerima akibatnya.

kemudian hidup di tengah masyarakat, serta terhadap keluarga orang yang dituduh pelaku G 30 S. Pemarginalisasian dilakukan antara lain dengan cara pelarangan dan pemfitnahan.

a. Pencilukan

Ada beberapa bentuk kisah pencilukan dalam *Kalatidha* yang diceritakan oleh tokoh utama. Terhadap istilah pencilukan, tokoh utama mempunyai pandangan tersendiri.

“Hari-hari itu memang aku banyak mendengar kosa kata baru. Mungkin lebih tepat kosa kata lama yang mendapat makna baru, seperti misalnya kata *ciduk*. Selama ini kata itu kukenal dalam hubungannya dengan mandi...dan dalam hubungannya dengan makan...Suatu hari tetanggaku sekeluarga menghilang dan katanya mereka *diciduk*...Mereka yang sedang tidur pintu rumahnya digedor antara pukul dua atau tiga pagi, dan begitu saja dibawa pergi entah ke mana—kini aku percaya jika dikatakan mereka dibunuh...dikatakan mereka *diciduk*...” (hlm. 21)

Dari kutipan tersebut dapat diketahui logika tokoh utama tentang kata pencilukan. Berdasarkan kisah-kisah yang dilihat dan didengar oleh tokoh utama, istilah pencilukan dan prakteknya serta dampaknya dapat ditafsirkan sebagai sebuah kata yang mengalami proses perluasan arti. Dalam konteks “hari-hari itu”, yaitu pada tahun 1965—1969,⁵³ istilah pencilukan mempunyai makna metaforis yang lebih dari sekadar kata kerja yang dipakai untuk kehidupan sehari-hari, yaitu suatu “proses penangkapan” yang tidak sekedar penangkapan seperti menangkap seorang pencuri. Pencilukan yang disaksikan oleh tokoh utama dapat

⁵³ Dalam teks *Kalatidha* hlm. 129 tercantum “pencilukan dari rumah ke rumah antara tahun 1965 sampai 1969”; namun pada hlm. 206 tertulis “semenjak gelombang pencilukan pada tahun 1965—1966”. Dari kedua data tersebut semuanya merujuk pada kisah pencilukan pasca G 30 S, dengan demikian kisah pencilukan tersebut dapat dikatakan terjadi pasca G 30 S tahun 1965.

dianalogikan dengan menyiduk air mandi dari bak, tidak bisa memilih air dengan komposisi tertentu yang terciduk oleh gayung atau *ciduk*.

Kisah pencidukan yang paling terperinci dalam penyajian kisah pada teks *Kalatidha* adalah pencidukan yang terjadi di sekolahan. Pencidukan ini terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung cepat ketika tokoh utama dan murid-murid sekolah sedang belajar di dalam kelas. Seseorang yang dituduh sebagai Pemuda Rakyat, diburu dan kemudian diringkus oleh orang-orang yang membawa pentungan, golok, dan celurit. Orang tersebut berlari dengan hanya memakai pakaian seadanya. Sebelum akhirnya ia diseret sembari ditendang dan digebuk lalu dilempar ke atas truk, ia yang sudah terpojok dan tampak panik, dimaki dengan kata-kata tabu, menindas, dan kejam lalu kepalanya dipukul dengan pentungan besi hingga pingsan dan darahnya mengalir di wajahnya. Murid-murid dan guru yang sedang belajar hanya bisa ternganga menyaksikan kejadian di depan mereka.

“Di dalam kelas,...ketika tiba-tiba seseorang melompat masuk lewat jendela dan berlari serabutan sampai menabrak papan tulis...”He! Pemuda Rakyat! Menyerahlah!”... Semuanya kata-kata yang menindas dan kejam. Hari ini kami melihat dan mendengar segala sesuatu yang tidak pernah dibenarkan. Kami melihat betapa seseorang bisa dikutuk dan dihakimi begitu rupa...kulihat orang yang malang itu dilempar ke atas truk...Di atas truk sudah terdapat sejumlah orang, lelaki maupun perempuan—rupanya sekarang orang tidak menciduk pada malam hari.” (hlm. 19-21)

Kisah pencidukan semata-mata didasari oleh praduga atau anggapan bahwa semua anggota Pemuda Rakyat merupakan orang bersalah dan harus ditangkap. Nilai-nilai kemanusiaan sebagai individu dalam kisah pencidukan tersebut diabaikan. Seseorang yang sudah terpojok, terluka, bahkan sudah sekarat, dimaki dengan ucapan tabu, dianiaya, diseret, dan dilempar ke dalam truk

bagaikan barang mati yang tidak berharga. Penistaan terhadap individu secara fisik dan mental demikian jelas tidak dibenarkan dari segi-segi kemanusiaan.⁵⁴ Di luar kesalahan yang telah dilakukan oleh korban pencidukan, ia adalah manusia yang mempunyai hak yang sama dengan massa pelaku pencidukan.

Modus dan kronologi kisah pencidukan, dari awal pengejaran, peringkusan, dan akhirnya penangkapannya digambarkan oleh tokoh utama dengan jelas. Di samping itu, pencidukan tersebut juga dialami orang-orang yang digambarkan hanya mengenal organisasi PKI dan anasirnya. Misalnya kakak perempuan tertua tokoh utama, ia dicituk dan tiba-tiba menghilang untuk selamanya. Ia memang sering berdiskusi dan berteman dengan berbagai organisasi termasuk Gerwani dan PKI serta pernah mempunyai kekasih seorang anggota PKI, namun ia bukanlah anggota dari organisasi terlarang itu, bahkan tidak setuju dengan cara berfikir kaum komunis.

“Kakak perempuanku memang menghilang...Siapapun yang meski hanya mengerti sedikit saja tentang politik akan paham betapa tidak mungkin kakakku akan meyetujui apalagi merencanakan penculikan dan pembunuhan...sudah hampir 30 tahun berlalu sejak kakak perempuanku menghilang...” (hlm. 113—115)

“Aku teringat kakak perempuanku. Wajahnya begitu muram pada hari-hari sebelum ia menghilang, menggantung berita-berita dari koran dan menempelkannya pada buku yang kupegang ini...Di manakah dia sekarang? Kuingat hari-hari ketika kedua orang tuaku juga menjadi sangat muram dan aku hanya bertanya-tanya tanpa jawaban yang cukup memuaskan.” (hlm. 213)

“Sedih ingat kakakku. Entah di mana dia sekarang...cerita tentang nasib mereka yang dicituk terus menghantuiku, karena kemungkinan yang sama bisa terjadi kepada kakak perempuanku itu.” (hlm. 119)

⁵⁴ Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights/UDHR* (diakses dari situs Dephukum RI) yang dianjurkan oleh PBB dalam Pasal 5 disebutkan bahwa 'tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina'.

Kutipan-kutipan tersebut di samping menunjukkan terjadi penangkapan atau pencidukan dengan tuduhan yang tidak jelas, situasi di seputar pencidukan tersebut (pra dan pasca pencidukan) bukan sesuatu yang nyaman, baik pengaruhnya terhadap korban pencidukan maupun keluarganya. Betapa kakak perempuan tokoh utama dan kedua orang tuanya menjalani masa penuh kecemasan sebelum akhirnya ia menghilang dan tidak ada kabarnya.

Kolase di bawah ini menunjukkan ironi bahwa tokoh sastrawan pun disejajarkan dengan pelaku kejahatan.

“...sastrawan jang terkenal karena bukunja “Keluarga Gerilja” dan terkenal pula sebagai tokoh Lekra telah disergap oleh rakjat dirumahnja dan kemudian diserahkan kepada alat2 Negara jang lantas membawanja ke Kodam V Djaja.” (hlm. 121)

Kutipan tersebut juga menunjukkan bahwa pencidukan dilakukan dengan tidak pandang bulu dan tidak dilakukan dengan identifikasi yang jelas atas kesalahan korbannya.

Aktor utama kisah pencidukan adalah rakyat biasa atau massa yang berperilaku buruk yang didukung aparat negara. Gambaran karakteristik massa secara umum itu seperti dalam kutipan berikut.

“...Mereka bukan politikus, bukan aktivis, juga bukan simpatisan lawan-lawan PKI. Melainkan sekadar orang-orang yang hanya bisa mendapatkan kesenangan dalam penderitaan orang lain. Seandainya situasi politik berlangsung sebaliknya, mereka juga akan berada dibaris depan terdepan perusakan, pembakaran, penjarahan, pemerkosaan, dan pembunuhan.” (hlm. 128)

Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada alasan yang serius untuk menangkap orang-orang yang menjadi korban. Pencidukan bagi aktor pencidukan hanyalah dianggap sebagai kesenangan, permainan, atau hiburan yang

bisa memuaskan nafsu mereka. Tuduhan pencidukan yang diseru-serukan seolah hanya merupakan dalih untuk tujuan yang tidak jelas.

Keterlibatan aparat negara dalam pencidukan menunjukkan bahwa ada perintah penangkapan yang tersistem. Dalam gambaran yang disaksikan tokoh utama penangkapan tersebut dilakukan oleh massa bersenjata seolah seperti hendak menangkap penjahat besar. Namun, korban pencidukan yang disaksikan oleh tokoh utama adalah orang-orang yang lemah, tidak berdaya, dan yang ia kenal sebagai orang baik-baik, bahkan tidak ada sangkutannya dengan apa yang dituduhkan.

Pencidukan dalam *Kalatidha* dapat dianalogikan dengan narasi pemerintah Orde Baru tentang G 30 S/PKI sebagai penangkapan secara massal atau hingga ke akar-akarnya sisa-sisa PKI dalam rangka pemusnahan organisasi PKI. *Kalatidha* menunjukkan adanya realita kesalahan penangkapan yang menyebabkan ketidakadilan. Konsep pencidukan yang seolah merujuk pada penangkapan tanpa pandang bulu mempunyai perbedaan dengan narasi Orde Baru yang menangkap PKI hingga ke akar-akarnya yang seolah mengacu pada pemberantasan PKI hingga habis. Korban-korban yang tidak bersalah, yang tidak bernama, menunjukkan metafora dari para korban perlakuan salah tangkap yang tidak jelas identifikasinya.

b. Pembunuhan

Berikut ini kutipan kesaksian tokoh utama yang menunjukkan korban/objek pembunuhan, pelaku, cara, dan lokasi pembunuhan yang dilakukan secara kejam.

“...Orang-orang yang memburu masuk kelas membawa pentungan, golok, dan celurit...Orang itu diseret dan sembari terseret ia ditendang dan digebuk begitu rupa sehingga kurasa ia sebetulnya sudah mati. Ia tampak lemas dan berat seperti karung...orang yang malang itu dilempar ke atas truk...”(hlm. 19—21)

Pembunuhan tersebut dilakukan oleh massa yang beringas dan bengis. Pembunuhan dilakukan dengan cara mengeroyok dan dengan tindakan kekerasan bahkan memakai alat dengan tanpa mempedulikan korban yang sudah terpojok, sekalipun ia berusaha memberontak. Pembantaian tersebut dilakukan di hadapan siswa dan gurunya yang sedang belajar.

Cara lain untuk pembunuhan terhadap korban adalah dengan pembakaran seperti kutipan berikut ini.

“Pulang sekolah kulihat orang-orang mengepung sebuah rumah yang terbakar...Orang-orang berteriak. “PKI! Keluar!”...”Keluar kalian atau mati terbakar!”. Meskipun rumah itu terbakar, mereka tidak keluar...Berarti yang masih berada di dalam rumah adalah ayah, ibu, dan saudara kembar gadis kecil itu. Api berkobar menghabiskan rumah...Konon kedua orang tuanya yang terbakar juga mayatnya tak bisa dikenali lagi.” (hlm. 25—26)

Dalam kisah pembunuhan tidak saja terhadap satu orang yang dituduhkan namun termasuk keluarganya juga ikut terbunuh/terbakar. Dalam konteks tersebut, keluarga yang dibakar tidak berani keluar memenuhi panggilan dan ancaman dari massa yang telah mengepungnya sekalipun harus mengambil risiko terbakar bersama rumahnya. Memang ada orang yang keluar rumah tersebut, namun mengalami nasib buruk sekalipun tidak mati yaitu punggungnya dikapak hingga menembus daging.

Objek kisah pembunuhan dalam teks *Kalatidha* dilukiskan sebagai orang yang mempunyai keterkaitan dengan PKI dan ormas/orpol yang menjadi

anasirnya. Orang-orang yang berhasil diciduk oleh massa dan aparat pemerintah dalam keadaan hidup banyak yang berakhir dengan kematian.

Modus operandi pembunuhan yaitu dengan cara dianiaya terlebih dulu, kemudian ditembak langsung atau dipancung. Pelaksanaan pembunuhan ada yang disaksikan oleh orang banyak atau di tempat terpencil di sebuah hutan di pinggir kota. Setelah dibunuh mereka kemudian di kubur secara massal di suatu tempat yang sepi atau jauh dari penduduk, misalnya di hutan jati, di kebun-kebun.

Orang-orang yang diciduk dan dibunuh itu pun bukan saja orang yang jauh dari lingkungan tokoh utama, di antara mereka ada saja yang menjadi tetangga atau keluarga teman dan kerabatnya. Berikut ini beberapa kutipan yang mendukung deskripsi tersebut.

“Dari teman-teman sepermainanku kudengar tentang hutan jati di luar kota tempat orang-orang yang diciduk itu ditembak mati dan dikuburkan. “Banyak orang di bunuh di sana,” aku teringat temanku berbisik-bisik dalam kelas,” termasuk bapaknya si itu.” (hlm. 43)

“Rembulan adalah mata malam yang menjadi saksi pembantaian. Orang-orang diikat tangannya ke belakang, didorong sampai tersimpuh di depan lubang, sekali tetak nyawa melayang sekaligus badan masuk kuburan. Duapuluh sampai duapuluhlima orang akan terkubur di satu lubang,...” (hlm. 67)

“Kebun pisang, kebun karet, dan kebun kopi menjadi arena pembantaian tempat bakat-bakat para penjagal disalurkan.” (hlm. 68)

Esensi dari ketidakadilan yang terjadi dalam kisah-kisah pembunuhan adalah penghilangan nyawa orang. Dengan dalih apapun bila itu dilakukan dengan semena, kejam atau di luar perikemanusiaan, bahkan dalam rangka peradilan massa, penghilangan nyawa orang merupakan perampasan hak hidup manusia dan merupakan tindak ketidakadilan.

Kisah pembunuhan dalam *Kalatidha* dapat dianalogikan dengan narasi pemerintah Orde Baru tentang G 30 S/PKI sebagai penangkapan secara massal atau hingga ke akar-akarnya sisa-sisa PKI dalam rangka pemusnahan organisasi PKI. *Kalatidha* menunjukkan adanya realita pembunuhan yang menyebabkan ketidakadilan. Korban-korban yang tidak bersalah, yang tidak bernama, menunjukkan metafora dari para korban perlakuan pembunuhan yang tidak jelas identifikasinya.

c. Penyiksaan

Kisah penyiksaan dalam *Kalatidha* juga merupakan rangkaian pencindukan. Berikut ini beberapa identifikasi penyiksaan yang dikisahkan dalam *Kalatidha*.

“He! Pemuda Rakyat! Menyerahlah!...Para pemburu serempak maju dan meringkusnya, tetapi orang itu memberontak dengan seluruh tenaganya, ...seseorang memukul dengan pentungan besi. Ia langsung pingsan dengan darah mengalir di wajahnya. Ia diseret keluar kelas....Di luar kelas rupanya sudah banyak sekali orang masuk ke halaman sekolah. Mereka berteriak-teriak dan memaki-maki... Orang itu diseret dan sembari terseret ia ditendang dan digebuk begitu rupa sehingga kurasa ia sebetulnya sudah mati...orang yang malang itu dilempar ke atas truk” (hlm. 19—21)

“...orang-orang mengepung sebuah rumah yang terbakar...saat itu dari dalam rumah muncul seorang lelaki...ia berlari cepat sekali ke arahku,...Namun sebelum mencapai tempatku ia sudah jatuh menggelosor. Ia meluncur tengkurap di atas tanah dan berhenti tepat di depanku. Di punggungnya terdapat sebilah kapak. Menancap erat menembus daging mematahkan tulang, tetapi ia tidak mati...namun ketika orang itu kepalanya terangkat karena rambutnya dijambak ke atas, mata kami sempat bertatapan. Aku juga tidak mampu merumuskan apa yang tersampaikan dalam tatapannya,...” (hlm. 25—26)

Dalam kutipan tersebut tokoh utama menceritakan serangkaian kisah kekerasan atau penyiksaan fisik terhadap korban berlangsung bertubi-tubi. Bila dianalogikan dalam sebuah pertandingan, jelas komposisi dua kubu tersebut tidak

seimbang: satu orang lawan serombongan orang atau massa. Dilihat dari prasarana atau alat juga tidak adil. Korban tidak membawa senjata dihadapkan dengan lawan yang menggunakan senjata tajam. Bila dilihat dari emosi atau mental, korban ada dalam posisi inferior, di sisi lain para pengepung merupakan massa yang beringas dan penuh ancaman untuk menangkap. Satu hal yang mempertajam kondisi ketidakadilan yaitu posisi korban yang sudah terpojok, lemah, dan tidak berdaya sendirian mengalami tindak kekerasan dari massa.

Kisah penganiayaan fisik tidak saja terhadap perorangan, namun juga terjadi pada sejumlah orang yang berhasil ditangkap dan dibawa ke suatu tempat. Bahkan tokoh utama mengetahui dari kisah bekas tahanan politik diketahui tentang model-model penyiksaan yang paling barbar dan yang paling kejam yang pernah ada di muka bumi.

“...perempuan-perempuan hamil dibedah perutnya...Kepala mereka ditancapkan ke ujung bambu dan dipatok berjajar di tepi jalan. Suami-suami mereka dikebiri...” (hlm. 67)

“Orang-orang diikat tangannya ke belakang, didorong sampai tersimpuh di depan lubang, sekali tetak nyawa melayang sekaligus badan masuk kuburan. Duapuluh sampai duapuluhlima orang akan terkubur di satu lubang...” (hlm. 67)

“Karena segala siksaan takkan bisa membuka mulut saya, mereka gunakan lain cara yang tidak pernah saya bayangkan ada. Saya masih ditindih ketika pengecut itu datang membawa seorang tahanan wanita. Ia sedang hamil dan katanya ia Gerwani. Saya harus melihat bagaimana ia ditelanjangi dan kakinya dibuka paksa, agar sangkur pada bayonet bisa dimasukkan...” (hlm. 63)

Orang-orang tersebut ada dalam posisi inferior. Ia mengalami penyiksaan dan tidak berdaya melawan tentunya karena ada di bawah ancaman, baik ancaman senjata maupun jumlah komposisi yang tidak berimbang. Mereka adalah kelompok yang lemah. Kondisi tersebut tentu saja tidak mengabaikan faktor

kausalitas. Bahwa mereka diburu, ditangkap, disiksa bahkan kemudian dibunuh karena alasan politis.

Seperti halnya kisah pembunuhan, penyiksaan atau kekerasan fisik juga mempunyai kaitan dengan kisah pencidukan atau usaha pencidukan. Hampir di setiap pencidukan menyertakan penyiksaan atau kekerasan fisik. Hal tersebut juga terjadi pada pasca pencidukan atau fase introgasi dan penahan. Misalnya pada kutipan berikut.

“Saya tidak tahu apa-apa sebenarnya soal Gestapu. Saya memang anggota cakraBirawa dan kenal Untung...Hampir setiap hari sebelum diberangkatkan ke Pulau Buru saya disiksa dan disuruh mengaku...setiap hari punggung saya ditetesi lelehan ban sepeda yang dibakar...saya masih ditindih ketika pengecut lain datang membawa seorang tahanan wanita. Ia sedang hamil...saya harus melihat bagaimana ia ditelanjangi dan kakinya dibuka paksa, agar sangkur pada bayonet bisa dimasukkan... Saya dimasukkan ke dalam sel isolasi...kadang diberi makan dan kadang tidak...” (hlm. 63)

Gambaran kekerasan tersebut terjadi pada fase pengintrogasian. Dua kisah kekerasan sekaligus terjadi pada dua orang yang berbeda, yaitu seorang lelaki anggota CakraBirawa⁵⁵ dan wanita yang dituduh sebagai anggota Gerwani.⁵⁶ Sebagai seorang tentara, ia pun disiksa oleh tentara yang tahu metode penyiksaan. Penyiksaan secara fisik bagi lelaki itu dapat diatasi atau ditahan. Ia tidak tahan ketika menyaksikan kekerasan yang tidak berperi kemanusiaan terhadap wanita hamil tersebut.

Dalam narasi pemerintah Orde Baru tentang G 30 S/PKI, penyiksaan fisik dilakukan oleh orang-orang PKI dan Gerwani terhadap Pahlawan Revolusi. Kisah penyiksaan atau kekerasan secara fisik dalam *Kalatidha* justru terjadi pada orang-

⁵⁵ CakraBirawa adalah pasukan pengawal istana kepresidenan

⁵⁶ Gerwani adalah ormas wanita milik PKI

orang yang dituduh PKI dan Gerwani. Ini menunjukkan keironisan dua narasi yang berbeda. Dengan demikian, *Kalatidha* menunjukkan adanya realita kesalahan narasi tentang kekerasan dan penyiksaan yang menunjukkan bukti ketidakadilan.

d. Pembakaran

Kisah pencidukan dalam *Kalatidha* menyertakan juga adanya pembakaran. Pembakaran tersebut dilakukan oleh massa disertai dengan pengepungan dan ancaman.

“Pulang sekolah kulihat orang-orang mengepung sebuah rumah yang terbakar. Orang-orang berteriak. “PKI! Keluar!”...”Keluar kalian atau mati terbakar!”...Api berkobar menghabiskan rumah” (hlm. 24—26)

Kisah pembakaran tersebut menimpa sebuah keluarga dengan anak kembar. Keluarga tersebut dituduh sebagai anggota PKI dan ayah dalam keluarga tersebut difitnah sebagai anggota Lekra karena disangka mengajarkan lagu milik PKI, *Genjer-genjer*. Ayah tersebut memang mengajarkan kesenian, kecuali menyanyi.

Kisah pencidukan dengan pembakaran rumah beserta keluarga yang tinggal di dalamnya tersebut dilakukan oleh ratusan orang yang tiba-tiba mengepung dan membakar rumah itu. Salah satu dari anak kembar tersebut selamat dari maut dan dibawa keluar rumah oleh seorang laki-laki (mungkin paman atau tamu keluarga itu) yang tak urung tetap dianiaya dengan dilempar kapak yang menembus dadanya. Salah satu anak kembar yang selamat tersebut memang selamat tubuhnya, namun pada detik itu juga penderitaan lahir dan batin

sebagai anak sebatang kara dengan trauma yang kronis ditambah stigma sebagai anak keluarga PKI telah menantinya.

Letak ketidakadilan dalam konteks ini adalah tindakan anarkis atau semena-mena sekelompok orang terhadap hak milik orang atau keluarga penghuni rumah tersebut. Hak milik dalam hal ini tidak saja material, namun penghilangan hak kehidupan, yaitu hidup di dunia sebagai makhluk Tuhan dan kehidupan sosial atau sebagai makhluk sosial.

Dalam narasi pemerintah Orde Baru tentang G 30 S/PKI terjadi pembakaran gedung-gedung PKI karena massa marah. Narasi pembakaran tersebut mempunyai kesamaan tindakan. Namun, *Kalatidha* menunjukkan hal lain yang tidak ada dalam narasi pemerintah Orde Baru tentang G 30 S/PKI, yaitu objek pembakaran dalam *Kalatidha* adalah bukan gedung tetapi rumah tinggal yang isinya adalah keluarga yang digambarkan sebagai sebuah keluarga yang bahagia. Di dalam keluarga tersebut terdapat anak-anak yang tidak berdos. Akibat dari pembakaran tersebut pun ditunjukkan oleh *Kalatidha* dengan sisi kemanusiaan yang sangat menyentuh. Hal tersebut yang terlewat dalam narasi pemerintah Orde Baru tentang G 30 S/PKI.

e. Penahanan tanpa diadili

“Stasiun itu kini telah sepi. Tinggal empat orang termangu-mangu. Empat manusia yang telah diciduk empat belas tahun lalu...” (hlm. 61)

“Saya salah satu pengurus Himpunan Sarjana Indonesia. Saya ditahan setelah kembali dari luar negeri. Ditangkap begitu saja, seusai paspor dicap petugas imigrasi tanda sudah kembali ke tanah air...saya seorang nasionalis...ditangkap tanpa kesalahan yang jelas. Diadili saja tidak pernah.” (hlm. 64)

Kutipan teks tersebut hanya merupakan ilustrasi tokoh utama bahwa para tahanan politik atau korban pencidukan yang kemudian ditahan, bahkan hingga belasan tahun, tidak pernah menjalani proses pengadilan. Proses pengadilan tentunya ada proses dakwaan, penyidikan, sidang, vonis dan sebagainya yang merupakan prosesi pengadilan dalam ranah hukum. Merupakan tindak tidak adil terhadap seseorang bila ia ditahan, bahkan hingga belasan tahun, namun tanpa melalui proses pengadilan.

Di sebuah negara yang wujud faktanya adalah adanya undang-undang dan rakyat, namun bila undang-undang yang memproduksi hukum tersebut tidak berpihak dan memperhatikan kepentingan rakyat sebagai unsur pembentuk negara, niscaya keadilan bagi rakyatnya hanyalah sebagai impian.

Penahanan yang ada dalam narasi pemerintah Orde Baru tentang G 30 S/PKI adalah terhadap orang-orang yang bersalah karena terlibat G 30 S. Di dalam teks *Kalatidha* penahanan terjadi justru pada orang-orang yang tidak tahu menahu G 30 S. Pengadilan sebagai syarat penahanan dalam narasi Orde Baru adalah terhadap militer atau pengadilan militer. *Kalatidha* menunjukkan bahwa tentara-tentara pun (serta semua korban yang dikisahkan) ditahan tanpa proses pengadilan.

f. Pelarangan

Kisah pelarangan pernah dialami oleh “tokoh utama kecil” ketika pada pelajaran di sekolah ia menggambar lambang palu arit. Seketika itu juga teman-teman dan gurunya menunjukkan reaksi negatif dengan menuduh dan mencurigainya. Tokoh utama dianggap sebagai anak seorang anggota PKI, suatu hal yang pada waktu itu

tidak pernah terlintas dalam pikirannya akibat yang ditimbulkan karena perbuatannya itu.

“Bapakmu PKI, ya?...aku sungguh tidak tahu apa hubungan gambar palu arit itu dengan PKI... Dari perangko-perangka Uni Soviet aku senang memandang gambar-gambar roket dan kosmonot, entah kenapa gambar palu arit itulah yang akhirnya kugambar...lama kemudian baru aku tahu betapa gawat dan nyaris sebetulnya keadaan semacam itu bagi jalan hidup keluargaku. Hari-hari itu banyak orang dicituk tanpa alasan yang jelas sama sekali, dan pastilah jika seorang anak menggambar palu arit di masa pencidukan maka sudah terlalu banyak alasan untuk mencurigai dan menciduk bapaknya.” (hlm. 24)

“Kamu jangan menggambar palu arit lagi,’ katanya lagi, ‘nanti bapakmu ditangkap dan dibawa ke hutan jati itu” (hlm. 44)

Palu arit adalah lambang bendera PKI yang mengadopsi lambang komunisme Uni Soviet. Tentu saja seorang anak yang menggambar lambang tersebut akan dicurigai terutama sumber pengetahuan si anak tentang gambar tersebut. Bila di sekolahnya tidak diajarkan mengenai hal itu, tentu dicurigai ia mendapat pengetahuan tersebut di rumahnya. Pada saat sensitifitas terhadap hal-hal yang berbau PKI merebak, orang tentu dengan mudah akan menghubungkan hal itu. Ironisnya, pada waktu yang bersamaan tidak ada larangan anak-anak menggambar senjata belati pasukan komando baret merah, yaitu simbol tentara. Dalam hal ini situasi politik pun telah menembus sistem pendidikan dan mengatur kebebasan berekspresi.

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang terjadi, tokoh utama dapat sedikit memahami pelarangan penggambaran palu arit. Namun, tokoh utama tidak akan membuang perangko-perangkonya.

“Aku bergidik mendengarnya. Namun tidak kuikuti anjurannya untuk membuang koleksi perangkoku yang bergambar palu arit” (hlm. 44)

Penghentian menggambar palu arit bagi tokoh utama bukan berarti berhenti mengoleksi gambarnya, sekalipun dengan diam-diam. Bentuk-bentuk pelarangan yang represif kadang-kadang justru menimbulkan reaksi yang sebaliknya, seperti sikap tokoh utama yang melakukan tindakan yang kontroversi sekalipun tahu resiko atas perbuatannya. Logikanya hanya menjangkau bahwa tidak ada alasan yang patut untuk menghentikan kekagumannya akan perangko bergambar palu arit itu.

Kisah pelarangan juga menimpa pada orang yang hanya mempunyai hubungan komunikasi baik dengan PKI dan organisasi terlarang lain. Ia akan dididik dan mendapat perlakuan yang nyaris sama dengan orang yang memang sebagai anggota organisasi dan menanggung kesalahan kolektif. Ini terjadi pada kakak tertua perempuan tokoh utama yang menghilang selamanya karena mempunyai hubungan dan sekalipun ia tidak sepaham dengan komunisme ia berkomunikasi dengan orang-orang atau organisasi yang kebetulan terlarang.

Dalam narasi pemerintah Orde Baru tentang G 30 S/PKI pelarangan yang diberlakukan adalah pelarangan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan PKI dan penyebaran komunisme. Dalam *Kalatidha* juga ditunjukkan adanya kisah pelarangan tersebut, akan tetapi pada prakteknya pelarangan yang ditunjukkan tidak proporsional. Kasus pelarangan terhadap tokoh utama dalam menggambar palu arit tidak dapat disamakan dengan pelarangan terhadap ajaran komunisme. *Kalatidha* juga menunjukkan bahwa praktik pelarangan tidak menjamin penghapusan komunisme di Indonesia, hal tersebut dapat dianalogikan dengan sikap tokoh utama yang tidak membuang koleksi perangko yang bergambar palu arit, simbol bendera PKI yang mengadopsi lambang komunisme

di Rusia. Dengan kata lain, kejahatan organisasi tidak identik dengan keburukan ideologi.

g. Pemfitnahan

Makna leksikal fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebar dengan maksud menjelekkan orang. Perkataan yang berupa tuduhan dapat berubah ke level fitnah bila sudah ada penyangkalan atas tuduhan tersebut. Fitnah dapat berupa menodai nama baik atau merugikan kehormatan orang. Dengan demikian, memfitnah merupakan perbuatan yang mencerminkan ketidakadilan.

Pemfitnahan dalam konteks ini dilakukan oleh sesama warga yang tidak bertanggung jawab, ditujukan pada orang-orang yang dituduh mempunyai hubungan dengan PKI dan organisasi lain yang berafiliasi. Hal tersebut hampir terjadi pada korban pencidukan yang mengaku dirinya tidak terlibat, tidak tahu apa-apa, atau bukan sebagai anggota organisasi terlarang.

“Bagaimanakah orang banyak bisa berkumpul di depan rumah yang kemudian akan dibakar itu? Seseorang telah melakukan fitnah kepada ayahnya, yang sehari-harinya hidup mengajar anak-anak bermain musik. “Dia anggota Lekra dan dia mengajar anak-anak menyanyikan lagu *Genjer-genjer!*”. Semua itu tidak benar dan ayahnya mengajar anak-anak memainkan semua alat musik kecuali menyanyi.” (hlm. 126)

Lekra adalah lembaga kebudayaan anasir PKI. Orang tersebut dituduh sebagai anggota Lekra dan fitnah tersebut kemudian tersebar. Situasi pada saat itu sangat sensitif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan PKI sehingga sebuah tuduhan tanpa bukti pun akan mudah menyulut tindakan massa. Sekalipun fakta

yang ada tidak sesuai dengan tuduhan, dampak dari pemfitnahan itu adalah pertarungan antara hidup dan mati.

Fitnah yang dapat berdampak pada pendiskreditan orang. Terlepas dari fungsi kliping koran dalam alur cerita, setidaknya kliping koran memberikan indikasi adanya suatu fitnah atau yang disebut oleh tokoh utama sebagai “kebohongan”.

“Berhubung dengan dimuatnja foto saja...saja, Dewi Roelyanti,...maka dengan ini saja menjatakan bantahan dgn keras dan mohon diralat...sama sekali tidak ada hubungan apa2 dengan JMD dan tidak pernah mendjadi simpanannja, djuga tidak mengenal, ketjuali bahwa mengetahui bahwa JMD adalah Menteri Urusan Bank Sentral. Sepengetahuan saja, JMD diambil oleh alat negara dari rumah...” (hlm. 116—117)

Pemberitaan demikian merupakan bentuk bantahan atas fitnah yang ditujukan kepada orang yang bersangkutan. Bantahan tersebut tidak saja untuk ketidakbenaran informasi atas statusnya sebagai wanita simpanan, namun yang terpenting adalah publikasi atas keterlibatannya dengan seorang pejabat negara yang dianggap “penjahat” (diambil oleh alat negara mengimplisitkan bahwa orang yang bersangkutan adalah orang yang bersalah sehingga ditangkap oleh alat negara). Initial JMD merupakan jaminan untuk sebuah malapetaka bagi yang mempunyai hubungan dengannya.⁵⁷ Dalam konteks kisah pasca G 30 S atau masa gelombang pencidukan, fitnah demikian bisa merugikan nama baik dan membahayakan keselamatan jiwa tertuduh dan keluarganya.

Realitas pemfitnahan dalam narasi pemerintah Orde Baru tentang G 30 S/PKI tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa *Kalatidha* telah mengungkapkan

⁵⁷ Bila dikaitkan dengan hlm. 43 yang berupa berita dari kolase yang sama (*Angkatan Bersendjata/AB*), JMD atau Jusuf MD adalah bekas Menteri atau pejabat yang tersangkut dalam G 30 S.

sis-sisi yang sesungguhnya ada dalam realitas masyarakat namun ditutupi oleh narasi pemerintah Orde Baru.

3.2.2 Simbol-simbol tokoh dan tempat

a. Gadis kecil berbaju putih dan kucing putih di hutan bambu dan di *mall*

Gadis kecil berbaju putih dan kucing putih adalah bayangan arwah yang sering muncul di hutan bambu dan kemudian di *mall*. Dua wujud dan warna dari gadis dan kucing menjadi simbol kepolosan, kesucian, kelembutan, dan ketakberdayaan.

Kematian keduanya disebabkan oleh ketakberdayaannya melawan kekuasaan yang keji, yaitu pembunuhan terhadap makhluk yang lemah dan tidak tahu apa-apa atas alasan penghilangan nyawanya. Kemunculannya tersebut berfungsi seakan-akan sebagai pembawa pesan para korban kekerasan kolektif yang tidak mengetahui letak kesalahannya hingga mereka dibunuh.

Gadis kecil yang dalam kisah tokoh utama telah menjadi korban pembakaran bersama keluarganya di dalam rumah yang dikepung massa selalu muncul memberikan kesan kematiannya penasaran karena tidak ada alasan tepat mengapa dia harus mati di usia muda. Ayahnya dituduh PKI, namun bukan menjadi alasan penghilangan nyawa anak kecil atau seseorang yang tidak tahu apa-apa dengan tuduhan semacam itu. Gadis kecil ini seolah ingin menuntut kehidupan masa kanak-kanaknya yang direnggut secara paksa. Dia muncul dan menghilang seperti berada dalam suatu kabut kehidupan yang samar-samar. Dia berasal dari kuburan di hutan bambu yang berkabut, hanya kesaksian tokoh utama yang mengerti asal-usulnya. Suara-suara di hutan bambu yang seperti merintih dan memanggil yang ditangkap oleh tokoh utama adalah suara-suara dari roh

gadis kecil itu. Salah satu penanda bahwa roh gadis kecil itu merupakan roh dari manusia yang pernah hidup di dunia adalah gelang manik-manik yang masih selalu dipakai.

Selagi hutan bambu masih ada dan keeksistensian gadis itu masih terjaga, ia pun tumbuh dewasa layaknya saudara kembarnya yang hidup sebagai gadis yang dianggap gila. Namun, ketika hutan bambu itu digusur bersama dengan gundukan tanah makamnya, ia pun seolah kembali pada penampakan semula, yaitu sebagai gadis kecil berbaju putih yang sering menampakkan diri bersama kucing putihnya. Kali ini ia tidak di hutan bambu tetapi muncul di *mall* yang berdiri megah di tanah bekas hutan bambu. Kemunculan di dua tempat ‘berbeda’ itu disaksikan oleh penduduk di sekitar hutan bambu dan *mall* itu.

“‘Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, gadis kecil yang dulu kadang-kadang terlihat di hutan bambu bersama seekor kucing itu ternyata masih ada di situ.’ Semua orang teringat dengan gundukan yang tidak bisa diratakan, tetapi seluruh tanah wilayah itu memang bisa saja digali untuk mendirikan dasar bangunan” (hlm. 187).

Jadi, sekalipun gundukan makamnya sudah tidak ada di situ, namun roh gadis kecil itu masih saja menampakkan diri di atas tanah yang sama. Artinya, tuntutan atas keadilan bukan lagi atas jasad yang telah menjadi tanah kembali, namun status keadilan bagi roh-roh yang telah dihilangkan dengan sengaja tanpa alasan yang tepat.

Kisah penampakan gadis kecil dan kucing dapat ditafsirkan sebagai dua peristiwa penampakan dengan latar belakang yang kontras. Dua penampakan dengan subjek dan lokasi sama (yaitu gadis kecil berbaju putih dan kucing putih di lokasi makam atau bekas makam gadis dan kucing tersebut), namun mempunyai perbedaan latar waktu, suasana, dan motif. Penampakan pertama

berada di seputar hutan bambu yang bersuasana damai dan senyap kadang diliputi kabut dan sinar matahari yang menembus lembut kabut tersebut; sedangkan penampakan kedua berada di *mall* atau tempat yang dapat disebut pasar gegap gempita yang gemerlapan oleh lampu-lampu listrik ditingkah musik hingar bingar. Penampakan pertama dapat diumpamakan sebagai penampakan arwah orang yang mati penasaran karena dibunuh dengan cara keji. Ia mewakili orang-orang yang mati penasaran dengan nasib yang sama, yaitu korban kekerasan kolektif di tahun 1965-an. Penampakan kedua dapat ditafsirkan sebagai arwah yang ‘rumahnya’ digusur dengan semena-mena demi kepentingan pusat perbelanjaan mewah, suatu simbol kepentingan kehidupan material di dalam dunia kapital.

Dalam kaitannya dengan narasi pemerintah Orde Baru tentang G 30 S/PKI, uraian tentang metafora penampakan gadis kecil dan kucing putih di hutan bambu dan di *mall* dapat disimbolkan sebagai korban pemberantasan PKI sampai ke akar-akarnya. Akar-akarnya merujuk pada keluarga korban tanpa memandang usia, termasuk merenggut nyawa anak kecil yang masih polos yang semestinya memiliki masa depan. Suara gadis kecil yang pernah terdengar seperti merintih dan memanggil di hutan bambu menyimbolkan jeritan suara para korban G 30 S yang mempunyai nasib yang tidak menentu.

Dalam narasi pemerintah Orde Baru tentang G 30 S/PKI dituliskan bahwa dalam peristiwa penculikan para jenderal pada 1 Oktober 1965 dini hari oleh PKI, anak Jenderal A.H. Nasution (Menteri/Panglima ABRI) yang bernama Ade Irma Suryani dibunuh oleh PKI. Sebuah ironi yang terjadi bagi seorang anak yang tidak berdosa menjadi korban kekerasan dan kepentingan politik. Gadis kecil yang terbakar dan Ade Irma Suryani yang tertembak merupakan korban

pembunuhan dengan dalih politik. Sekalipun pembunuhan itu datangnya dari dua posisi yang berbeda, kedua bocah itu telah kehilangan masa depan.

b. Hutan Bambu yang Berkabut

Hutan bambu adalah sebuah tempat yang mempunyai nuansa *magis* atau *singup* atau 'angker' karena kerimbunan dan gemerisik suara daun-daunnya seolah memberi kesan sebagai sesuatu yang bisa hidup. Namun di satu sisi, hutan bambu yang tidak berpenghuni mempunyai kesan ketenangan, kedamaian, dan kesenyapan. Hutan bambu yang ada di dalam *Kalatidha* juga memberi kesan demikian. Nuansa angker hutan bambu di dalam *Kalatidha* lebih dipertajam dengan adanya kabut yang sering menyelimuti hutan bambu serta bersemayamnya dua belas makam tidak bernama yang tidak terawat.

Di dalam *Kalatidha*, secara imajinatif hutan bambu mempunyai fungsi sebagai penghadir kabut yang menjadi sarana berkembangnya khayalan tokoh utama untuk melakukan berbagai kemungkinan perlawanan terhadap ketidakadilan-ketidakadilan yang ikut dirasakan olehnya. Dari hutan bambu itu seolah tokoh utama menemukan sisi angker sekaligus kesenyapan dan pengalaman yang sangat pribadi. Dari hutan bambu yang berkabut tokoh utama mendapatkan kenyataan bahwa di situ banyak roh yang melayang yang masih ada di alam barzakh, yaitu roh penasaran yang masih menuntut atau belum mendapatkan keadilan atas kematiannya.

Kabut di hutan bambu dapat diibaratkan sebagai sebuah kaca mata tembus pandang ajaib yang mampu digunakan untuk melihat, menerawang, bahkan pemakainya dapat ikut memainkan peranan di dalam dunia lain tersebut.

“Kabut adalah duniaku—dalam kabut itulah aku mengembara dan menjelajahi seribusatu kemungkinanku” (hlm. 2)

Tokoh utama yang mempunyai kebolehan menjelajah ke “dunia lain” sangat tergantung pada keberadaan hutan bambu tersebut. Di dalam hutan bambu itu juga seolah ia menemukan cinta yang berbalas, yaitu dari roh gadis kembar yang mati terbakar bersama keluarganya di rumah mereka yang di kepung massa.

Hasil rekonsiliasi nyata dan maya dalam dunia kabut hutan bambu, yaitu roh gadis yang meraga sukma, mampu membuat tekanan terhadap aparat keamanan yang kebingungan mencari bukti pelaku tindak pembantaian terhadap orang-orang yang kemudian diketahui sebagai pelaku pencidukan. Demikian tergantungnya kisah dalam dunia kabut tersebut terhadap hutan bambu, karena dari sanalah keajaiban rekonsiliasi tersebut pada mulanya. Kekuatan dari tokoh fantasi yang muncul tersebut dapat dianggap ‘mengancam’ kepentingan dan eksistensi penguasa superstruktur pengendali sistem dalam negeri. Langkah kuratif yang diambil yaitu hutan bambu sebagai sumber kekuatan magis digusur oleh bulldoser kencana tidak berpengemudi yang datang dari langit dengan parasut. Hutan bambu berikut kabut dan gundukan makam gadis kembar ikut tergusur, maka hilanglah dunia khayalan tokoh utama yang penuh kekuatan pembalasan dendam dan sebagai gantinya muncul *mall* yang kontradiktif dengan eksistensi hutan bambu.

Hutan bambu yang berkabut dapat dipandang mempunyai dua fungsi metaforis. Metafora pertama adalah hutan bambu dengan kabutnya yang menghadirkan kisah-kisah fantastik merujuk pada upaya-upaya perlawanan terhadap ketidakadilan yang tergambar dalam kisah-kisah kekerasan kolektif dan

pemarginalan. Kisah perlawanan tersebut tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap keadilan yang diharapkan, akan tetapi mampu menyuarakan kehendak para korban kekerasan kolektif yang menghendaki keadilan dan sirnanya kisah-kisah yang diselimuti kabut misteri.

Metafora kedua adalah hutan bambu dengan wujud ‘fisiknya’ yang beralih ke *mall* merujuk pada suatu wilayah yang terhegemoni secara total oleh penguasa. Dengan demikian, kehadiran hutan bambu di *Kalatidha* adalah sebagai metafor terhadap ruang gerak para korban peristiwa tragedi kemanusiaan yang sangat dibatasi, diatur, dan dikuasai yang dalam narasi pemerintah Orde Baru tentang G 30 S/PKI bentuknya adalah deskriminasi melalui stigmasi pada eks tapol dan keluarga mereka yang terlibat PKI.

c. Rajapati

Rajapati adalah sebuah nama yang diberikan untuk makhluk purba haus darah yang menikmati pencabutan nyawa dalam penyiksaan. Sifatnya yang kasar, kejam, dan sangat bangga dengan kejahatannya dalam *Kalatidha* diibaratkan sebagai kelompok massa yang dikisahkan telah melakukan pencidukan, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pembakaran, pemfitnahan, dan penjagalan manusia yang tidak tahu kesalahannya. Ironisnya, rajapati yang disimbolkan sebagai massa yang melakukan kekerasan kolektif tersebut adalah orang biasa yang melakukan kejahatan secara sadar atau dengan kata lain ia adalah orang waras.

“Sang rajapati yang kasar, kejam, dan sangat bangga dengan kejahatannya menyelusuri malam seperti ular naga, menyelusup masuk rumah-rumah bukan untuk mencabut nyawa selain untuk menyiksa...Rajapati hina yang berubah menjadi ratusan mengendap-endap dari rumah ke rumah untuk menculik penghuninya.” (hlm. 66—67)

“Mereka yang senang melihat nasib manusia lain yang buruk karena dipermalukan, direndahkan, dihina, disiksa, dan dianiaya—setidaknya mereka tidak berbuat apa-apa menyaksikan penindasan manusia yang satu kepada manusia yang lain di depan hidung mereka, adalah manusia-manusia yang jika dilahirkan kembali akan jadi kecoa, kelabang, atau tikus-tikus got.” (hlm. 129—130)

Rajapati dalam *Kalatidha* dikisahkan berjumlah ratusan orang yang melakukan kekerasan kolektif. Rajapati akhirnya dibunuh oleh gadis meraga sukma dengan cara yang lebih kejam dari yang dilakukan rajapati kepada korbannya. Tubuh sang rajapati yang di masyarakat wujudnya adalah kelompok massa dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya, dicacah tubuhnya, dan dipotong kemaluannya. Bahkan roh rajapati yang telah keluar dari tubuhnya tetap dikejar dan disiksa oleh gadis meraga sukma tersebut. Prosesi pembasmian rajapati tersebut bermakna sebagai sebuah tuntutan keadilan dengan pembalasan terhadap sumber ketidakadilan.

Dalam narasi pemerintah Orde Baru tentang G 30 S/PKI disebutkan bahwa rakyat marah kepada PKI karena tindakan kontra revolusi dan menimbulkan gejolak massa, Rajapati dianalogikan dengan massa tersebut.

d. Gadis Meraga Sukma

Tokoh gadis yang meraga sukma ini dilukiskan sebagai wanita pesilat⁵⁸ yang tidak sentimental untuk menjadi ‘eksekutor’ bagi para pelaku kisah pembunuhan dan pencidukan, khususnya yang telah melakukan penganiayaan terhadap

⁵⁸ Tipe gadis ini mirip dengan tokoh utama “Perempuan Preman” di Melawai yang ada dalam kumpulan cerpen SGA *Dunia Sukab* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001). Ia juga pandai silat dan mampu terbang atau melenting ke atas dengan ringan. Satu hal yang dominan adalah persamaan ideologinya, yaitu perempuan melawan kekerasan dengan kekerasan juga.

keluarganya. Selain sebagai eksekutor ia juga bertindak sebagai ‘hakim’ dalam pengadilannya sendiri.

“Dalam tubuh saudara kembarnya akan dia adili sendiri orang-orang itu.” (hlm. 127)

Tindakan dan jabatan yang sekaligus disandang oleh gadis tersebut yaitu sebagai eksekutor dan hakim merujuk pada ironi supremasi hukum yang ‘mandul’ pada waktu itu, setelah keadilan bagi pelaku pembunuhan dan pencidukan atau kekerasan kolektif yang ditunggu hingga bertahun-tahun tidak kunjung tiba.

Tokoh gadis meraga sukma ini hadir dari rangkaian kisah yang disaksikan oleh tokoh utama (narator) sebagai korban kisah kekerasan kolektif. Dia adalah hasil penyatuan roh dan raga gadis kembar yang keluarganya mati terbakar di dalam rumah yang dikepung massa. Seorang dari gadis kembar tersebut ikut terbakar bersama kedua orang tuanya berikut rumah mereka, dan satu yang lain tumbuh menjadi gadis yang disebut-sebut gila. Peristiwa pembakaran tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak kisah kekerasan massal.

Kekuatan dari dunia lain di balik kabut yang melambangkan kekuatan yang tergalang dari ribuan korban kekerasan kolektif diibaratkan menyatu dalam jiwa gadis itu dan muncul di dunia menjalankan keadilan sendiri, yaitu dengan membantai sang rajapati. Dalam hal ini terjadi kekerasan yang berulang atau kekerasan dibalas kekerasan dengan kata lain telah berlaku hukum rimba.

Gadis tersebut sangat ingat wajah-wajah 257 orang yang melakukan pembakaran atau ikut menyaksikan bahkan yang sekedar lewat di tempat dia dan keluarganya dihakimi massa dengan tuduhan yang tidak terbukti benar. Satu per satu dia mendatangi mereka, menyampaikan letak kesalahan mereka, dan akhirnya

dibunuhnya dengan cara kejam. Pembalasan baginya selalu lebih kejam. Setelah ketidakadilan yang disaksikan dan ikut dirasakan terhadap saudara kembarnya serta terhadap diri dan keluarganya sudah terlalu banyak dan lama tanpa ada yang mampu melakukan perlawanan dan pembelaan, ia harus mengadili sendiri dengan caranya sendiri. Orang-orang yang diadili tersebut dalam *Kalatidha* dimetaforakan sebagai Rajapati.

Kehadiran gadis tokoh Gadis Meraga Sukma ini menunjukkan adanya metafora perlawanan terhadap kesalahan, dan setiap kesalahan sudah seharusnya memperoleh hukuman yang setimpal. Di satu sisi, kehadirannya sebagai seorang pesilat mengesankan bahwa 'kekerasan' berbalas dengan 'kekerasan' pula tanpa harus mempertimbangkan perasaan.

e. Utopia Negeri Cahaya

Negeri cahaya adalah ilusi sebuah negeri yang sempurna yang menjadi utopia tokoh utama narator. Negeri cahaya muncul karena tokoh utama menyaksikan adanya kekacauan kehidupan dan ketidakadilan yang terjadi di sekelilingnya. Negeri cahaya tersebut merupakan gambaran sebuah negeri yang ironis dengan kisah-kisah di dalam *Kalatidha* yang dominan sebagai sesuatu yang suram tanpa cahaya atau suatu kontradiksi antara cahaya dan kabut.

“Di bumi yang terkasih yang berdarah berdaging dan bersampah bergunung-gunung sampah...Permainan yang penuh pertumpahan darah permainan yang penuh ketidakadilan permainan tentang siapa yang berhak menguasai demi rasa kemenangan yang begitu penting begitu hakiki begitu dibutuhkan asal sekadar tapi benar-benar merupakan kekuasaan” (hlm. 137—138)

“Tiada yang lebih memungkinkan dari segala dunia selain dari Negeri Cahaya, negeri di mana segala makhluk dan segala perbedaan dihargai setara.” (hlm. 135)

“Sembari melangkah aku mencoba mengerti dan mengingat kembali dunia sempurna yang pernah kubayangkan...pernah kubayangkan dan kuangankan sebuah negeri sempurna dengan segenap keindahan, kesejahteraan, dan keadilan yang paling mungkin di dunia...” (hlm. 137—138)

Kutipan tersebut menggambarkan bahwa apa yang ada atau dialami (kutipan pertama) merupakan perlawanan dari apa yang sekedar dibayangkan oleh tokoh utama (kutipan kedua dan ketiga). Dunia dengan segenap keindahan, kesejahteraan, dan keadilan bagi negara dan warganya tersebut sangat kontras dengan situasi yang ada di hadapan tokoh utama, yaitu yang ia alami, rasakan, saksikan, ikut rasakan, atau sekedar ia tau dari guntingan koran. Bahwa undang-undang sebagai wujud fakta negara haruslah indah, betapa manusia akan bisa merasa terhormat dalam kesejahteraan keadilan dan kesetaraan dalam kebebasan, dan cita-cita kesempurnaan seharusnya bukan sebagai khayalan belaka namun diperjuangkan demi kebahagiaan. Akan tetapi, realita yang ada di hadapannya adalah kekerasan demi kekerasan bagi banyak orang tanpa mampu keluar dari jerat penderitaan tersebut. Bahkan, eksekusi dari penderitaan yang disaksikan, dirasakan, dan didengarnya itu melekat hingga sepanjang hidup orang-orang yang termarginal. Dengan demikian negeri cahaya dapat diibaratkan sebagai sebuah cita-cita masa depan bagi kehidupan yang menghargai keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Di samping itu, dengan mengacu pada kata ‘cahaya’, ‘dunia kabut’ dalam *Kalatidha* diharapkan menjadi terang dengan adanya cahaya.

f. Catatan Joni Gila

Ironi antara kegilaan dan kewarasan tertuang dalam cacatan tokoh Joni Gila. Batas-batas antara kegilaan dan kewarasan menjadi sangat tipis. *Kalatidha* menampilkan tiga bab yang berisi cacatan tokoh Joni Gila.

Isi tiga bab “Catatan Joni Gila” ditulis dengan huruf cetak miring (*italic*). Cetak miring mengisyaratkan bahwa bab tersebut adalah suara lain atau berbeda dengan suara narator. Kata ‘catatan’ sebagai judul bab mempunyai arti sebagai sebuah memoar Joni Gila. Lebih jauh kata ‘catatan’ yang dikaitkan dengan ‘cetak miring’ dapat ditafsirkan bahwa tiga bab tersebut sekalipun sebagai bagian dari satu cerita utuh novel dan menggunakan sudut pandang orang pertama, namun tidak mempunyai eksistensi suara yang ‘setara’ dengan sudut pandang orang pertama dalam bab-bab yang lain.

Sekalipun mempunyai kaitan dengan kisah dalam narasi tokoh utama narator, ia seolah hadir hanya sebagai ‘kutipan’ atau gema suara dari individu yang tidak hadir (*inabsentia*). Bila ditinjau dari elemen-elemen yang hadir dalam catatan tersebut, hampir paralel dengan kisah yang dituturkan oleh tokoh utama narator, misalnya adanya samudera, sang mata, gadis gila yang dicintai Joni (tokoh utama narator mencintai gadis kembarannya yang ditemui di kabut hutan bambu), dan kesaksiannya tentang pembalasan dendam gadis tersebut terhadap orang-orang yang telah menganiaya dan memperkosa gadis yang disebut gila.

Cara pandang Joni yang filsafati tentang kematian adalah pembebasan jiwa yang terikat tubuh dan otak yang kotor. Bapaknyanya yang telah membunuh ibunya dan dua orang tua gila yang apatis bagi Joni merupakan orang-orang yang perlu dibebaskan jiwanya dari otak yang kotor. Hilangnya nyawa dari tubuh ditangan

orang lain (karena dibunuh dengan sengaja) bagi Joni bukanlah pembunuhan, tetapi 'pembebasan'. Joni juga mempunyai pandangan lain mengenai cara mati seseorang. Ia menganggap setiap orang mempunyai hak untuk mati dengan cara yang diinginkan sendiri.

Upah bagi usaha 'pembebasan' Joni dan dampak pengambinghitaman tersebut adalah hukuman dan pengasingan yaitu dikurung di dalam sel serba putih dengan tangan, kaki, diborgol dan kepala diikat serta mulut dibungkam. Sebagai orang yang dianggap gila, sel tersebut sesungguhnya adalah tempat penyembuhan, namun bagi Joni adalah tempat penyiksaan.

Terhadap kematian dokter dan petugas rumah sakit jiwa, Joni dianggap sebagai pelakunya. Tuduhan tersebut bagi Joni merupakan pengambinghitaman atas pembunuhan yang tidak ia lakukan.

Di samping dianggap sebagai pembunuh, Joni juga dianggap gila. Penalaran Joni tentang stigma gila membuat Joni semakin merasa ingin benar-benar gila, agar tidak rancu pada pikiran antara membunuh dan membebaskan jiwa. Penghancuran penalaran, kekacauan jiwa, dan kegilaan merupakan upaya pembebasan Joni dari keserbawajaran dunia.

g. Rumah sakit jiwa dan dokter kepala beserta para petugas

Rumah sakit jiwa tempat perempuan yang disebut sebagai gila berada dipandang sebagai metafor sebuah negara yang dikuasai oleh pemimpin dan aparatnya yang bobrok moralnya karena bertindak semena-mena kepada pasien yang diibaratkan sebagai rakyat yang harus diayomi.

Dokter kepala dan petugas di rumah sakit jiwa simbol penguasa otoritas yang mempunyai kekuasaan superstruktur dan absolut pada rakyat di wilayahnya. Mereka mempunyai kekuasaan menangkap orang yang pantas ditangkap sesuai kebenaran kriterianya (gila), menangani pasien seperti hewan, menangkap pasien sesuai kepentingannya, dan memperlakukan pasien dengan keji hingga tubuhnya hancur dan mati.

Pemeriksaan dan penganiayaan oleh dokter kepala dan petugas di rumah sakit jiwa kepada gadis yang dianggap gila merupakan ironi, karena seharusnya mereka melindungi/mengayomi, merawat, menjaga, menyembuhkan jiwa yang dianggap sakit, namun justru melakukan pelecehan terhadap pasien perempuan pada level yang paling rendah bagi wanita yang justru menambah beban sakit. Suatu ironi bahwa orang yang jiwanya dianggap waras tetapi justru melakukan hal yang 'gila' terhadap orang yang dianggap gila.

Pengisahan konteks rumah sakit jiwa beserta dokter kepala dan petugasnya merupakan bentuk perlawanan dengan menyampaikan gagasan yang bersifat normatif. Bahwa sudah seharusnya pemimpin negara itu mengayomi warganya.

h. Bulldoser Kencana

Bulldoser kencana adalah tokoh imajinatif yang karena kekuasaannya dapat dianalogikan dengan penguasa otoritas yang mempunyai kekuasaan superstruktur yang represif. Bulldoser secara umum adalah nama untuk sejenis traktor atau alat berat yang beroda rantai yang dilengkapi alat untuk meratakan tanah. Tokoh bulldoser dalam *Kalatidha* ini mempunyai keistimewaan, ia emas, turun dari langit dengan parasut, serta mampu bergerak tanpa pengemudi. Sosoknya yang

besar, kuat dan istimewa tersebut dapat ditafsirkan sebagai sosok penguasa otoritas yang mempunyai kekuatan yang istimewa lebih dari sekedar bulldoser biasa. Seperti halnya ia mampu memaksakan kehendaknya dengan segala upaya agar terpenuhi keinginannya. Hutan bambu yang menyimpan kisah-kisah misteri di dunia kabut dengan segala upaya digusurnya dan diganti dengan *mall*.

“Bulldoser Kencana berkilat-kilat keemasan dalam cahaya matahari pagi. Ia muncul begitu saja menyeberangi sungai kecil menyapu habis hutan bambu itu...Bulldoser Kencana itu seperti makhluk hidup dan kenyataannya bergerak tanpa pengemudi.” (hlm. 181—183)

“Tidak sampai enam bulan, berdirilah bangunan enam lantai itu. Bangunan itu rupa-rupanya membelakangi rumah penduduk...” (hlm. 185)

Banyak hal ironi dari tindakan bulldoser kencana. Ia menghapus kabut hutan bambu yang mampu memvisualkan tokoh gadis meraga sukma yang melawan supremasi hukum yang mandul. Kekuasaan penguasa otoritas *versus* kekuasaan gadis meraga sukma. Kuburan gadis kecil yang juga ikut tergusur di hutan bambu merupakan simbol penghapusan masa lalu yang penuh misteri. Ini menjadi ironis ketika kemudian bayangan gadis kecil dan kucing putih tetap muncul di *mall* menandakan pengaruh kekuasaan penguasa otoritas tidak bisa mencapai hal yang paling esensi dari hutan bambu. Sedangkan bangunan *mall* yang megah sebagai ganti hutan bambu menjadi begitu gemerlapan di tengah masyarakat miskin. Ironi tersebut lebih dipertajam dengan kutipan berikut.

“Tidak ada satu pun dari apa pun yang dijual di dalam bangunan enam lantai itu mampu mereka beli tanpa menjadi kelaparan dalam sebulan.” (hlm. 186)

Kesenjangan antara *mall* dan taraf hidup penduduk sekitar merupakan bentuk ketidakadilan lain dari ketidakadilan yang muncul karena ulah bulldoser kaca. *Mall* dengan sejuta keindahan dan impian akan nikmat duniawi, sebagai lambang kapitalisme, tidak selamanya akan menjadi manfaat bagi semua orang.

Metafora Bulldoser Kencana yang dikaitkan dengan narasi pemerintah Orde Baru tentang G 30 S/PKI dapat disimbolkan sebagai penguasa otoritas baru yang mendapat mandat untuk melakukan penhapusan PKI hingga ke akar-akarnya. Penguasa baru dengan metafor bulldoser dimaknai sebagai sosok militer yang mempunyai kekuatan super.

i. Nyanyian Hujan

Nyanyian hujan merupakan alternatif lain setelah dunia di balik kabut hutan bambu lenyap oleh bulldoser kaca. Nyanyian hujan yang menjadi substitusi kabut hutan bambu mempunyai fungsi yang sama, yaitu sarana bagi peneropongan kisah-kisah yang suram yang belum terjawabkan di kabut hutan bambu. Bedanya, nyanyian hujan merupakan metafora bagi kumpulan tangisan dari orang-orang termarginal yang tidak kunjung mendapat keadilan. Dunia-dunia lain akan terus menggantungkan bila di dunia tersebut belum juga ditemui cahaya terang atau pelindung bagi ketidakadilan.

Semenjak hutan bambu lenyap, tokoh utama telah berhenti berfikir tentang masa lalunya yang pernah disaksikan, dirasakan, dan dialaminya mengenai tragedi pencidukan, pembunuhan, pembakaran, pembantaian, dan pemarginalan di lingkungannya dan yang diketahuinya dari guntingan koran. Ia hanya berfikir dan mengembangkan kepekaannya tentang dunia di luar penjara yang lebih

mengerikan daripada di dalam penjara. Baginya, apa yang tampaknya baik-baik saja di permukaan sesungguhnya hanyalah semu. Sampai pada suatu ketika di dalam penjara itu juga, di saat tokoh utama telah nyaris kehilangan kepercayaan atas dirinya, ia bersahabat dengan hujan. Bunyi hujan seolah berkata-kata kepadanya.

“Bunyi hujan selalu kudengarkan berlama-lama, karena seringkali ia seperti berkata-kata...ia bercerita dan berlagu...seperti menyanyi... Kupikir-pikir sebetulnya bukan hujan itu sendiri yang bercerita, melainkan justru hujan itulah yang seperti menceritakan kembali berbagai cerita yang sudah ada di dalam kepalaku. Di bawah sadarku berbagai macam pengalaman terpendam dan menceritakan dirinya sendiri melalui bunyi hujan kepadaku seorang. Aku akan selalu tertegun bila hujan turun karena bunyinya seperti menyihirku masuk ke dalam sebuah cerita” (hlm. 225)

Keajaiban dalam diri tokoh utama agaknya kembali berulang. Alam telah memberinya segala kemungkinan bagi tokoh utama untuk memahami dunia dengan masuk ke dalam dunia lain. Bila dulu hutan bambu dengan kabutnya yang berpendar dan berkilau cahaya memberinya dunia dan membawanya kepada pengalaman-pengalaman transendental yang menakjubkan, kini ia bertemu dengan bunyi hujan yang menyanyikan lagu-lagu mengenai peristiwa-peristiwa atau gambaran yang mengerikan sekaligus mengisahkan tentang samudera keemasan, sosok kemilau sebagai sang mata, dan milyaran sosok kristal yang mengalir ke lembah yang penuh cahaya di baliknya. Peristiwa-peristiwa yang pernah dilaluinya itu kini dihadirkan oleh suara nyanyian hujan; dan bila hujan terus menyanyi untuknya, mungkin saja hujan akan membawa tokoh utama ke sebuah dunia baru dengan pengalaman yang tidak kalah menakjubkan.

“Selama mendengarkan hujan seringkali aku seperti tenggelam dalam cerita yang panjang itu, tetapi sayang sekali sangat sulit bagiku untuk

menceritakannya kembali. Aku mempunyai kemampuan yang buruk dalam bercerita dan setiap kali bercerita kurasa ceritaku selalu dianggap tidak menarik.” (hlm. 225)

Tenggelamnya tokoh utama ke dalam ‘sihir’ nyanyian hujan memungkinkan ia masuk ke dalam fantasi baru dalam dunia bunyi hujan, sebuah dunia baru yang terbuka untuknya dan memberi kesempatan untuk berimajinasi kembali seperti di dunia kabut. Di satu sisi, pengakuan rendah hati tokoh utama seperti itu nyaris sama dengan penuturannya ketika ia mulai memperkenalkan jati dirinya kepada pembaca, bahwa ia bukanlah penulis yang piawai juga bukan pencerita yang ulung. Suatu alasan yang tidak terlalu relevan dengan kemampuannya menjelajah dunia lain.

j. Sang Mata

Sang mata adalah metafora dari penguasa otoritas yang mempunyai kekuasaan di wilayah samudera cahaya. Kekuasaannya meruang dan mewaktu serta mempunyai nafsu untuk menguasai apa yang dikehendaki. Namun tidak selamanya kekuasaannya itu menghasilkan apa yang diinginkannya. Selalu terjadi perlawanan terhadap kekuasaannya itu.

Sang mata ‘sakit hati’ dan marah dengan gagalnya penguasaan terhadap jiwa bidadari bersayapkan cahaya, dalam keterbatasan kemampuannya yang hanya pada samudera, menangkap dan menyeret anak manusia yang bermain di pinggir pantai dengan lidah ombaknya. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah wujud kekuasaan lain dari sang mata, yaitu mengorbankan orang-orang (anak-anak) yang tidak berdosa, yang tidak mempunyai keterkaitan secara signifikan dengan sang mata yang marah terhadap bidadari yang hilang dari

penguasaannya. Bidadari bersayapkan cahaya yang telah meraga sukma dan menjelma menjadi perempuan super hero dengan tangkas menyelamatkan anak-anak tersebut.

Kisah perburuan sang mata terhadap korban-korban yang dikehendaki dapat ditafsirkan sebagai kekerasan kolektif seperti yang terjadi pada kisah pencidukan.

“Sekaliengebaskan tubuh sejuta sosok cahaya terpental...Maka kemudian sanghyang pamarah yang cintanya terpatah ini akan menyedot segenap isi samudera ke dalam tubuhnya sehingga menjadi gelap...” (hlm. 225)

Kekuasaannya yang meruang dan mewaktu di samudera cahaya, menjadikan sang mata bagaikan massa yang memburu dan ingin mencelakai siapa saja yang ia kehendaki.

k. Fungsi kolase koran

Kolase kliping koran dalam *Kalatidha* disusun dalam empat bab (Bab 5, 14, 18, dan 24) yang masing-masing menunjukkan fungsi dan makna tersendiri dalam novel tersebut. Kliping yang ditampilkan dalam *Kalatidha* adalah pilihan tokoh utama. Secara keseluruhan kolase kliping koran tersebut mempunyai fungsi ironi. Pemaknaan kolase kliping koran dalam *Kalatidha* adalah sebagai berikut.

Kolase dalam Bab 5 “Aku Membaca Koran” (hlm. 35—44) menunjukkan makna sebuah awal keadaan yang serba tidak logis atau di mana logika dikacaukan. Misalnya dalam kolase sumur yang mengeluarkan cahaya dianggap sebagai pertanda jalan terang; tujuh durian dianggap kelahiran kembali tujuh pahlawan revolusi. Orang mengacaukan atau membaurkan antara logika dan mitos.

Hal ini menunjukkan ideologi yang berupa gagasan yang keliru dengan menggabungkan antara nalar dan mitos.

Kolase dalam Bab 14 “Aku Membaca Koran Lagi” (hlm. 113—123) menunjukkan kekacauan ideologi yaitu ideologi-ideologi besar dilecehkan dan dipertentangkan, sementara di satu sisi ditunjukkan juga adanya moral yang rusak. Hal tersebut ditunjukkan misalnya dalam penghapusan ajaran komunisme, sementara ditunjukkan juga ideologi liberal (Amerika) yang tidak diterima. Moral yang rusak ditunjukkan dalam kolase adanya pelacur dan pejabat yang mempunyai watak yang sama.

Kolase dalam Bab 18 “Lagi-Lagi Aku Membaca Koran” (hlm. 151—161) menunjukkan bahwa ilmu atau ajaran-ajaran pengetahuan hanya sebagai komoditas politik atau dipolitisir. Misalnya ideologi (yang dipropagandakan lewat koran, bukan di dalam literatur) dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan negara dan menolak setiap yang tidak sesuai dengan ideologi mereka. Melalui ajaran ideologi itu ditekankan bahwa kemerdekaan harus direbut, namun di sisi lain sang pemimpin menyerukan penyerangan terhadap negara lain.

Kolase dalam Bab 24 “Koran yang Kubaca” (hlm. 205—217) menunjukkan bahwa Orde Baru dan Orde Lama mempunyai sikap yang memaksakan terhadap ajaran dan prinsip-prinsip bernegara masing-masing kepada masyarakatnya, termasuk indoktrinasi ajaran negara terhadap anak-anak generasi penerus (seperti sifat Sang Mata).

Dengan demikian, kolase-kolase dalam *Kalatidha* menunjukkan tema kekacauan zaman, sesuai dengan makna kata “kalatidha” dalam bahasa Jawa

yang berarti zaman gila atau zaman akal sehat diremehkan. Narasi Orde Baru juga menunjukkan adanya hal-hal yang berkaitan dengan pemaknaan tersebut.

3.3 “Skenario” Representasi “Dunia Kabut”

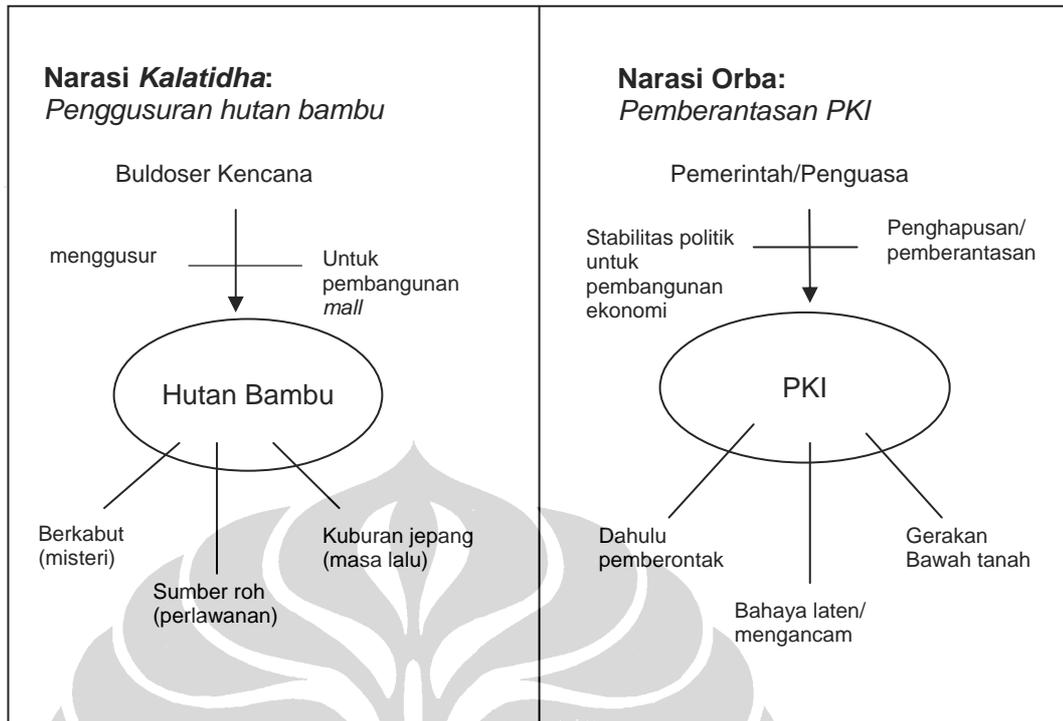
“Skenario” representasi “Dunia Kabut” dalam subbab ini hanya terfokus pada kisah-kisah dominan yang berkaitan dengan pemaknaan keadilan dalam *Kalatidha* yang dimaknai sebagai gugatan terhadap narasi pemerintah Orde Baru tentang G 30 S/PKI.

3.3.1 “Skenario” Representasi Penggusuran Hutan Bambu

Dari jalinan kisah dalam *Kalatidha* dapat dibuat skenario tentang penggusuran hutan bambu. Penggusuran hutan bambu ini dapat direpresentasikan sebagai pemberantasan PKI dalam narasi Orde Baru. Dalam narasi *Kalatidha* penggusuran hutan bambu tersebut bertujuan untuk pembangunan *mall*, sedangkan di dalam narasi Orde Baru dapat direpresentasikan untuk stabilitas politik guna pembangunan ekonomi.

Hutan bambu adalah wilayah yang berkabut penuh misteri, sumber roh korban, dan kuburan tentara Jepang. Hal ini dapat direpresentasikan dalam narasi Orde Baru bahwa PKI merupakan organisasi bawah tanah, mengandung bahaya laten atau mengancam dan memiliki masa lalu yang penuh kekerasan (pemberontak).

Berikut ini model perbandingan “skenario” representasi penggusuran hutan bambu dalam *Kalatidha* dan “skenario” representasi pemberantasan PKI dalam narasi Orde Baru.



3.3.2 “Skenario” Representasi Perburuan Sang Mata

“Skenario” representasi Sang Mata dihubungkan dengan kisah perburuan yang disaksikan oleh kakek dan cucunya dan menghasilkan narasi sebagai berikut.

Sang Mata, penguasa samudera cahaya, memburu bidadari bersayapkan cahaya. Bidadari bersayapkan cahaya adalah roh gadis kecil yang mati terbakar dan “tumbuh” menjadi dewasa di alam barzakh. Sang Mata bermaksud menguasai bidadari itu karena ia jatuh cinta. Tetapi sang bidadari menolaknya sehingga Sang Mata memburu dan ingin membunuh bidadari bersayapkan cahaya. Bidadari yang diburu tiba-tiba menghilang dan memasuki raga gadis kembarannya yang disebut-sebut sebagai gila (meraga sukma) yang mati karena disiksa dan diperkosa terus-menerus oleh dokter kepala dan petugas rumah sakit jiwa. Perburuan cahaya oleh

cahaya di cakrawala itu disaksikan oleh kakek dan cucunya yang sedang berjalan-jalan di pinggir pantai.

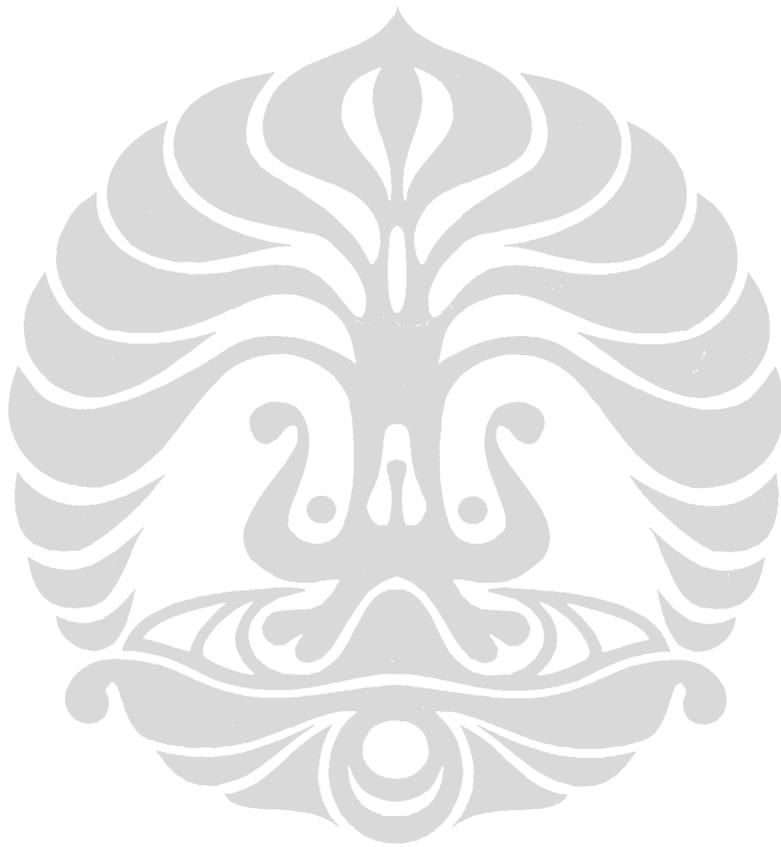
Sang Mata yang marah menjilat-jilatkan lidah ombaknya ke arah anak-anak kecil yang bermain di pinggir pantai agar masuk ke dalam samudera. Bidadari bersayapkan cahaya yang sudah meraga sukma berhasil menyelamatkan beberapa anak-anak itu.

Narasi di atas dapat dimaknai dengan metafora sebagai berikut. Sang Mata: mata adalah bagian dari tubuh yang berfungsi untuk melihat. Sang Mata adalah metafor tokoh yang berfungsi untuk melihat sudut pandang yang sama. Samudera cahaya adalah metafora dari tempat pencarian ilmu pengetahuan. Bidadari bersayapkan cahaya metafora dari tokoh yang menyimpan fakta pengetahuan sejarah masa lalu. Kakek dan cucunya sebagai metafor dimensi waktu atau generasi sebagai penerus tongkat estafet pengetahuan sekaligus saksi adanya penyimpangan sejarah. Anak-anak kecil di tepi pantai metafora dari generasi penerus yang sedang menuntut ilmu.

Jika metafora-metafora tentang narasi perburuan Sang Mata tersebut dianalogikan dengan narasi pemerintah Orde Baru tentang G 30 S/PKI akan diperoleh makna sebagai berikut.

Pengetahuan sejarah tentang G 30 S/PKI dibuat atau dikonstruksikan dan dinarasikan oleh pemerintah Orde Baru dengan menghapuskan fakta-fakta adanya korban kekerasan kolektif (tragedi kemanusiaan) di seputar peristiwa G 30 S. Pemerintah hanya membuat satu versi dan memaksakan narasinya untuk diindoktrinasikan kepada anak bangsa. Sesungguhnya fakta-fakta sejarah masa lalu itu dapat menolong anak bangsa. Metafora inilah sebenarnya sumber “dunia

kabut” dalam narasi pemerintah Orde Baru. Di satu sisi, saksi sejarah akan memberi kesaksiannya secara estafet kepada generasi penerus sebagai kontrol kebenaran kesahihan sejarah yang dibuat oleh yang berkompeten.



Bab IV

Penutup

4.1 Kesimpulan

Novel *Kalatidha* menampilkan tema keadilan melalui bentuk narasi dengan berbagai metafora. Secara keseluruhan realitas kehidupan tokoh-tokoh cerita berada dalam metafora “dunia kabut”, sebuah dunia yang dipenuhi dengan misteri masa lalu, kekaburan makna, dan kehidupan yang ironis. Kehidupan “dunia kabut” yang ironis ditampilkan melalui kolase klipings koran, catatan tokoh Joni Gila, dan berbagai ilustrasi kehidupan tentang masa kecil tokoh utama atau melalui kisah tokoh lain dan simbolnya.

Dalam hal ini tema keadilan ditampilkan melalui ilustrasi-ilustrasi kehidupan yang mengalami ketidakadilan dan dikombinasikan dengan pandangan-pandangan tokoh yang ironis. Pemunculan ilustrasi ketidakadilan justru menyampaikan pesan nilai-nilai keadilan. Kesan ini muncul karena ketidakadilan ditempatkan dalam ruang metafora dan ironi sebagai bentuk perlawanan atau gugatan terhadap ketidakadilan. Metafora-metafora yang dihadirkan dalam *Kalatidha* antara lain rajapati, gadis meraga sukma, gadis kecil berbaju putih dan kucing putih di *mall*, negeri cahaya, sang mata, rumah sakit jiwa, dan bulldoser kencana.

Dalam meraih konteks pemaknaan sosiologis, *Kalatidha* menampilkan ruang ilustrasi tentang peristiwa masa lalu yang hingga kini masih menjadi kontroversi, yakni peristiwa G 30 S yang berkelanjutan dengan pemberantasan

PKI. Melalui metafora “dunia kabutnya” *Kalatidha* menghadirkan pemaknaan yang “mengisi” ironi, kontroversi, kekaburan makna dan berbagai hal yang berkaitan dengan narasi Orde Baru tentang PKI dan peristiwa G 30 S. Kesan yang dimunculkan melalui metafora itu adalah ketidakadilan pada korban G 30 S dan PKI. Dalam hal ini, narasi *Kalatidha* telah “menyampaikan” berbagai persoalan ketidakadilan yang tidak dijumpai dalam narasi Orde Baru. Sebagai sebuah “penawaran” dari fiksi atas fakta-fakta yang tidak/belum terungkap dan masih samar-samar karena diliputi kabut sejarah yang diciptakan oleh narasi Orba.

Kalatidha juga menunjukkan bahwa dunia fiksi mampu berperan lebih sebagai narasi yang imajinatif daripada narasi yang mengatasmakan bersumber dari fakta. Realitas kehidupan dalam fiksi mampu menguak kabut sejarah. Di samping itu, *Kalatidha* sebagai sebuah karya sastra juga bersinggungan dengan ideologi-ideologi. Peran penguasa sebagai penentu dalam dinamika bernegara menjadikan sebuah ideologi mempunyai citra positif atau malah sebaliknya. *Kalatidha* menunjukkan persinggungan ideologi komunis yang diterima secara positif pada masa pemerintahan sebelum G 30 S dan secara radikal ditolak pada masa pemerintahan setelah G 30 S.

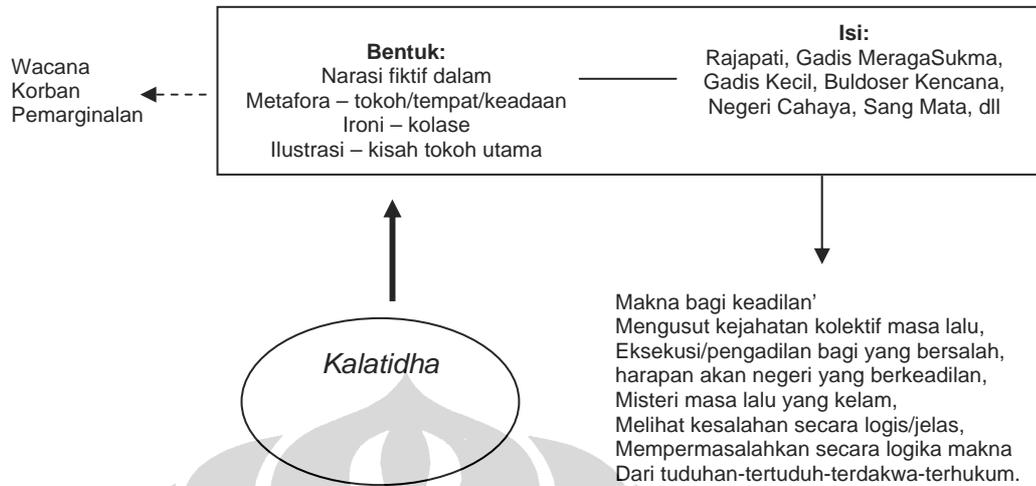
Berkaitan dengan narasi Orde Baru, *Kalatidha* menyarankan makna bahwa dalam realitas kehidupan rakyat Indonesia, penangkapan, pembunuhan, penghapusan ajaran PKI, pemberantasan PKI, sikap deskriminatif pemerintah, stigmasi terhadap pengikut PKI, dan sebagainya (semua terdapat dalam narasi pemerintah) telah menyebabkan realitas ketidakadilan, sebuah realitas yang digambarkan secara fiktif dalam *Kalatidha*. *Kalatidha* menampilkannya bukan semata-mata sebagai ilustrasi, melainkan juga memberikan pandangan-pandangan

tentang keadilan. Dengan demikian, *Kalatidha* mempunyai posisi sebagai metafora yang menggugat narasi pemerintah Orde Baru tentang G 30 S/PKI melalui wacana keadilan. Persoalan keadilan yang dipermasahkan berupa pengusutan terhadap kesalahan kolektif masa lalu, proses pengadilan terhadap pelaku kekerasan kolektif, sikap pemerintah yang lebih baik pada rakyatnya, dan harapan terhadap negara yang berkeadilan.

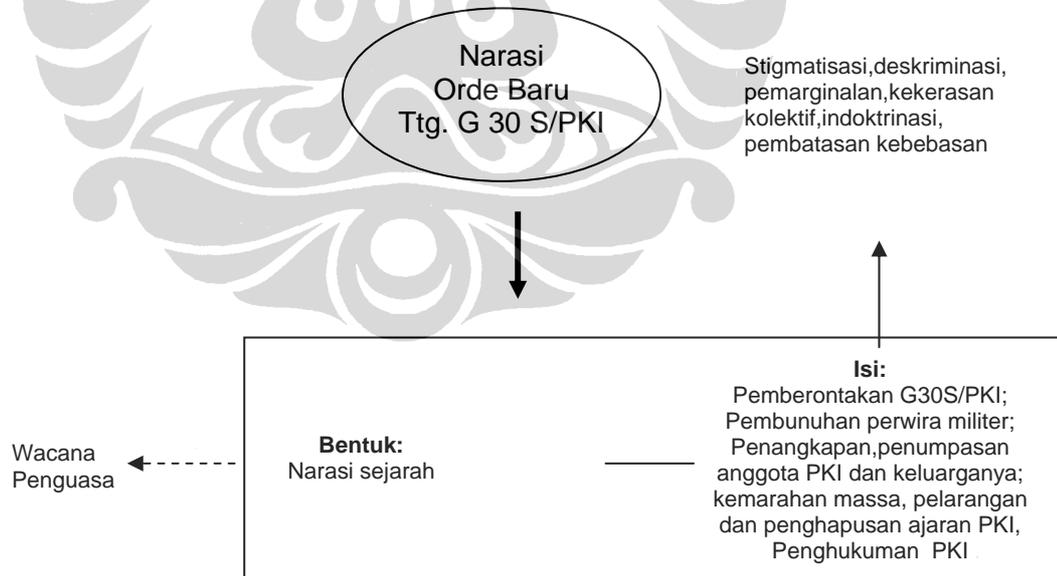
Keadilan yang disampaikan atau disuarakan dalam *Kalatidha* adalah keadilan bagi para korban tragedi kemanusiaan 1965, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Mereka yang meninggal adalah mereka yang dalam *Kalatidha* disimbolkan dengan tokoh-tokoh yang tidak bernama/tanpa identitas; serta yang tidak berdosa seperti gadis kecil berbaju putih dan kucing putih. Sekalipun rezim Orde Baru telah tumbang dan keran demokrasi telah dibuka, para korban yang masih hidup yang kemudian menjadi termarginalkan oleh sistem sosial sampai saat ini dianggap belum maksimal menyuarakan 'kebenaran' fakta sejarah yang dialaminya. Usaha-usaha ke arah itu saat ini telah ada seperti 'perekatan memori kolektif' dengan penulisan sejarah lisan tentang kesaksian para korban peristiwa tragedi kemanusiaan 1965.

Berikut ini disajikan rumusan dari uraian atas pemahaman novel *Kalatidha* dalam bentuk model. Ada dua model yang akan disajikan, pertama yaitu tentang novel *Kalatidha*, model kedua yaitu narasi pemerintah Orde Baru tentang G 30 S/PKI.

Model 1 :Novel *Kalathida*



Model 2: Narasi Orde Baru



5.2 Saran

Novel *Kalatidha* karya SGA boleh dikatakan sebagai novel yang ‘kompleks’, artinya sebagai sebuah karya sastra ia dapat ditinjau dari berbagai sudut. Tema keadilan hanyalah sisi sempit dari sekian banyak sudut yang dapat dipakai untuk memaknai karya tersebut. Banyak ruang kosong dalam *Kalatidha* yang dapat diteropong kemudian diisi oleh pembaca untuk menjadikan karya tersebut lebih bermakna.

Di antara ruang kosong tersebut salah satunya misalnya tanda yang diberikan oleh judul novel. Novel tersebut berjudul *Kalatidha*; di halaman depan lembaran buku itu, sekalipun tidak termasuk dalam urutan daftar isi, ditampilkan nukilan satu bait syair *Serat Kalatidha* karya pujangga Ranggawarsita (1802—1873). Dalam konteks tersebut syair *Serat Kalatidha* dapat dianggap sebagai hipogram novel *Kalatidha*, yang artinya ada hubungan interteks di antara keduanya. Penelitian yang ditinjau dari segi intertekstualitas akan memberi makna tersendiri bagi dua karya yang pembuatannya berpaut lebih dari satu abad tersebut. Secara harafiah *kalatidha* artinya adalah zaman gila atau zaman rusak. Merujuk asal usul katanya, zaman rusak menunjuk pada tumpukan permasalahan sosial yang terjadi pada ruang dan waktu tertentu. Dilihat dari latar tempat dan waktu, yaitu seputar peristiwa politik di Indonesia tahun 1965-an hingga awal abad ke-21 yang digambarkan sebagai negara yang ‘rusak’ yang penuh dengan ketidakadilan, novel *Kalatidha* mempunyai kondisi situasi yang hampir sama dengan isi syair *Serat Kalatidha* dengan penafsiran yang universal (bukan kontekstual).

Perbandingan *Kalatidha* dengan teks lain tidak saja dapat dilakukan karena hubungan ke-hipogram-an/intertekstualitas, tetapi dapat diperbandingkan dengan teks lain yang mempunyai bagian struktur yang sama. Peristiwa G 30 S merupakan realita sejarah bangsa Indonesia yang meninggalkan kesan yang berbeda-beda bagi setiap individu yang mengetahuinya. Latar peristiwa tersebut banyak dimunculkan di dalam karya-karya besar sastrawan Indonesia, misalnya *Para Priyayi* karya Umar Kayam, *Ronggeng Dukuh Paruk* karya Ahmad Tohari, *Jamilah* karya K. Usman, dan sebagainya. Variasi sudut pandang pada titik fokus yang sama, yaitu peristiwa seputar G 30 S, menghasilkan karya-karya yang menarik untuk diperbandingkan.

Kliping koran di dalam *Kalatidha* isinya identik dengan aslinya. Latar ruang dan waktu serta peristiwanya pun mempunyai 'kemiripan' dengan peristiwa bersejarah di Indonesia. Tanda-tanda tersebut mengindikasikan bahwa karya sastra adalah produk pengarang yang tidak terpisahkan dari lingkungan sosialnya dan merepresentasikan peristiwa-peristiwa penting menurut perspektif pengarang. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa karya sastra tidak bersifat otonom; ia mempunyai kaitan intertekstual dengan teks-teks lain, yang berupa fakta (maupun fiksi) dan yang sezaman maupun tidak. Penelitian dengan metode *new historicism* terhadap novel *Kalatidha* memungkinkan karya tersebut memberi sumbangsih (bila tidak sebagai koreksi) terhadap catatan sejarah nasional dengan perspektif yang mungkin berbeda dari teks sejarah yang telah dikonstruksi oleh penguasa otoritas.

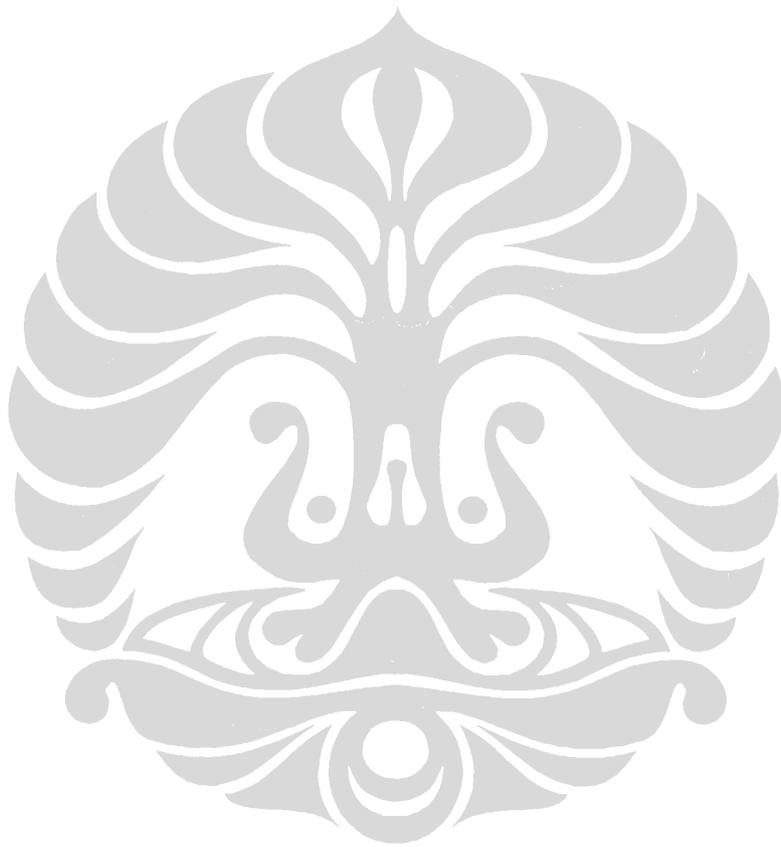
Tokoh-tokoh yang semuanya nyaris tanpa nama, alur yang bolak-balik, dan hadirnya dua dunia yang berbeda namun bisa dijelajahi oleh tokoh aku yang

narator, serta hadirnya karnaval peristiwa sebagai fakta dan fiksi yang penuh simbol, serta suara-suara dari orang-orang yang terpinggirkan, merupakan lahan penelitian dari segi struktural-semiotik.

Kebenaran bagi jiwa yang terkurung, yaitu terkurung dalam konstruksi yang dinamakan kegilaan dan terkurung oleh tubuh yang dipenjara merupakan hal menarik untuk dicermati. Suara-suara “orang yang diharuskan menjadi seseorang seperti yang diinginkan banyak orang” tersebut terenggut oleh rezim wacana klinis dan disiplin. Rumah sakit jiwa yang ‘mengobati’ orang yang dianggap gila karena konstruksi yang berasal dari para ahli jiwa dan penjara yang ‘menghukum’ orang yang karena tidak berdisiplin terhadap norma dan hukum, hanya mampu mengelola tubuh mereka tetapi tidak dengan jiwa mereka yang mampu ‘mengembara’ ke mana pun mereka suka dan berutopia sesuai kehendaknya. Apakah rumah sakit jiwa dan penjara hanya mampu mengurus tubuh dan tidak mengabaikan jiwa? *Kalatidha* mempunyai wacana-wacana tentang hal tersebut yang menarik untuk dikaji.

Kecurigaan atas keberpihakan SGA terhadap korban-korban ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa otoritas atau penyajian realitas dan fakta sejarah dari sisi lain dapat memancing pertanyaan: mengapa SGA melakukan itu dan apa motivasinya? Hal tersebut salah satunya dapat dijawab dengan menelusuri siapa SGA dan perjalanan kepenulisannya lewat karya-karyanya yang lain, ulasan kritikus tentang karyanya, reputasinya baik di bidang sastra maupun bidang lain yang mungkin mempengaruhi proses kreatifnya, dan sebagainya. Penelitian sosiologi pengarang terhadap novel *Kalatidha* dapat juga dikerjakan untuk memberi makna karya.

Tentu masih banyak celah-celah yang dapat dikaji dari *Kalatidha* agar memberi makna yang bervariasi. Di satu sisi, terbukanya ruang-ruang kosong tersebut menandakan *Kalatidha* sebagai sebuah karya yang tidak akan kering pemaknaan. Ruang kosong yang perlu diisi oleh pembaca diperlukan kecermatan dan kecerdikan dalam mengolah isi dan tanda-tanda yang tersebar dalam *Kalatidha*.



DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber buku dan artikel

- Adam, Asvi Warman. 2007. "Imajinasi yang Terus Bertanya" rubrik Humaniora, *Kompas*, Sabtu, 22 Desember 2007.
- Ahmad, Qasim (ed.). 1993. *Kekerasan dalam Sejarah: Masyarakat dan Pemerintah*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.
- , 1993. "Kekerasan dalam Masyarakat: Suatu Perhitungan" dalam Qasim Ahmad (ed.). *Kekerasan dalam Sejarah: Masyarakat dan Pemerintah*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Ajidarma, Seno Gumira. 2007. *Kalatidha* (Sebuah Novel). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budianta, Melani. 1998. "Sastra dan Ideologi Gender" dalam *Horison* XXXII/4.
- Byrney, David. 2005. *Social Exclusion (Second Edition)*. New York: Open University Press.
- Childers, Joseph dan Gary Hentzi. 1995. *The Columbia Dictionary of Modern Literary and Cultural Criticism*
- Damono, Sapardi Djoko. 1979a. *Sosiologi Sastra: Suatu Pengantar Ringkas*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- , 1979b. *Novel Sastra Indonesia Sebelum Perang*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- , 2002. *Pedoman Penelitian Sosiologi Sastra*. Jakarta: Pusat Bahasa, Depdiknas.
- Efrizan. 1996. "Timor-Timur di Mata Seno Gumira Ajidarma". Skripsi Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Firmansyah, Julizar. 2004. "Arkeologi Pengetahuan: Studi tentang Pemikiran Michel Foucault dan Pengaruhnya bagi Kritik Mansour Faqih terhadap Diskursus Modernisasi". Tesis Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

- Gatra*, Majalah Berita Mingguan, edisi 12 Agustus 1995.
- Hoerip, Satyagraha. 1983. "Pemberontakan Gestapu/PKI dalam Cerpen-cerpen Indonesia" dalam *Cerpen Indonesia Mutakhir: Antologi Esai dan Kritik*, Pamusuk Eneste (ed.). Jakarta: Gramedia.
- Langenberg, Michael van. 1993. "Gestapu dan Kekuasaan Negara di Indonesia" dalam Qasim Ahmad (ed.). *Kekerasan dalam Sejarah: Masyarakat dan Pemerintah*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Lawang, Robert M.Z. 2005. *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik: Suatu Pengantar*. Depok: FISIP UI Press.
- Luxemburg, Jan Van, Mieke Bal, dan Willem G. Weststeijn. 1989. *Tentang Sastra* (diterjemahkan oleh Akhadiati Ikram). Jakarta: Intermedia.
- Nuryatin, Agus. 2001. "Fakta dalam Fiksi: Teknik Penceritaan Cerpen Seno Gumira Ajidarma". Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Edisi ke-4. Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Purwanto. 2002. "Cerpen-Cerpen Seno Gumira Ajidarma: Sebuah Tinjauan Stilistika". Skripsi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2007. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra* (Cetakan III, Edisi Revisi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Roosa, John. 2008. *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra.
- Roosa, John, Ayu Ratih, dan Hilmar Farid (eds.). 2004. *Tahun yang Tak Pernah Berakhir, Memahami Pengalaman Korban 65: Esai-Esai Sejarah Lisan*. Jakarta: Elsam, ISSI, dan Tim Relawan untuk Kemanusiaan.
- Sasongko, Haryo dan Melani Budianta (ed.). 2003. *Menembus Tirai Asap: Kesaksian Tahanan Politik 1965*. Jakarta: Amanah-Lontar.
- Scherer, Savitri. 2007. "Rekonsiliasi Fakta dan Fiksi", esai resensi buku rubrik Pustakaloka, *Kompas*, Senin, 20 Agustus 2007.

Seda, Francisia SSE. 2006. "Persoalan Disparitas Sosial dan Proses Eksklusi Sosial" dalam *Masyarakat Indonesia 2006-2007: Ulasan dan Gagasan*, editor Iwan Gardono dan Hari Nugroho. Depok: LabSosio UI.

Sudjiman, Panuti. 1990. *Kamus Istilah Sastra*. Jakarta: UI Press.

Suyono, Seno Joko. 2002. *Tubuh yang Rasis: Telaah Kritis Michel Foucault atas Dasar-dasar Pembentukan Diri Kelas Menengah Eropa*. Yogyakarta: Lanskap Zaman dan Pustaka Pelajar.

Tim Redaksi KBBI. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka.

William, Raymond. 1994. "Ideology" dalam *Ideology*, editor Terry Eagleton. London: Longman.

2. Sumber Internet

<http://sukab.wordpress.com/seno-gumira-ajidarma/#comment>

<http://www.nabble.com/-sastra-pembebasan--Membaca-Kalatidha-Seno-Gumira-Ajidarma-t3616830.html>, diakses pada 6 Oktober 2007, pukul 20.52.

http://puisiduniaasepsambodja.blogs.friendster.com/puisi_dunia_asep_sambodja/2007/04/membaca_kalatid.html.

<http://www.bukukita.com/infodetailbuku.php?idBook=3845>, diakses 24 September 2007, pukul 14.51.

<http://qyu.blogspot.com/2007/03/kalatidh.html>, diakses 6 Oktober 2007, pukul 09.04.

<http://evolia.wordpress.com/2007/05/22/>, diakses pada 24 September 2007, pukul 15.23.

<http://deathrockstar.info/comet/2007/05/14/kalatidha/>, diakses pada 6 Oktober 2007, pk. 09.07.

<http://karangkulonklaten.blogspot.com/2007/08/serat-kalatidha-sekilas-tentang-r-ng.html>